

BaKTI Highlights 2018

Kegiatan Pertukaran Pengetahuan

Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII : Lokal dan Berkelanjutan



Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI) kembali menampilkan ide-ide cerdas dan solusi pembangunan melalui pelaksanaan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Tahun ini merupakan perayaan yang ke-VIII. Selama dua hari pelaksanaan di tanggal 24 - 25 Oktober 2018, sekitar 1000 pelaku pembangunan KTI berkumpul bersama, dan saling berbagi pengetahuan dan pencapaian pembangunan di daerah dan wilayah kerja masing-masing. Penyelenggaraan Festival Forum KTI tahun ini dilaksanakan di Four Points Hotel by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pertemuan Forum KTI senantiasa menyajikan pertemuan dalam kemasan yang berbeda dengan mengedepankan lebih banyak peluang dan kesempatan untuk saling belajar, berjejaring, berinteraksi dan membuat perubahan positif. Festival Forum KTI menghadirkan tiga program inspiratif, yaitu Panggung Inspirasi, Galeri Informasi dan *Side Events*. Ketiga susunan kegiatan ini dihadirkan untuk menguatkan tema yang diusung oleh Festival Forum KTI tahun ini, bertajuk “**Lokal dan Berkelanjutan**”.

Festival Forum KTI dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan menabuh gendang bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Direktur Eksekutif dan Dewan Pembina Yayasan BaKTI, Anggota Pokja Forum KTI, serta Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia.

Hadir memberikan Pidato Kunci pada Festival ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono bertajuk “Dari Subsidi ke Belanja Produktif” menampilkan keberhasilan dan kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia.

Lima praktik cerdas yang ditampilkan di Panggung Inspirasi adalah:

1. Kalaodi: Kampung Ekologi Penjaga Tidore

- Presenter: Abdul Riwayat Hidi, Anas Wahab, dan Rusdi Rasyid
2. Data yang Mengubah Dunia – Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik di Papua dan Papua Barat
Presenter: Henky Veky Tewu, Steven Ohee, Sonya Marzhelina Ainusi, Anna Winoto
 3. Mengubah Minyak Jelantah menjadi Biodiesel
Presenter: Andi Hilmy Mutawakkil, Achmad Fauzy Ashari, Muflihun
 4. PANADA: Portal Analisis Data Berbasis Peta di Kota Manado
Presenter: Mor Dominus Bastiaan dan Liny Tambajong
 5. Lakoat.Kujawas : Dari Pendidikan Karakter ke Wirausahaan Sosial di Taiftob, Mollo Utara
Presenter: Christianto Senda, Jeremias Sora Kewohon, Felichia Findyanti Lengga, dan Marlinda Na'u

Informasi lebih lanjut mengenai Festival Forum KTI VIII dapat mengunjungi <https://bakti.or.id/forum-kti>

Selain presenter praktik cerdas, turut berbagi cerita yang menggugah 7 Inspirator:

1. Meiske Demetria Wahyu
Sabang Merauke: Seribu Anak Bangsa Merantau untuk Kembali
2. Chaidir Syam, Ketua DPRD Kabupaten Maros; Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Kota Parepare Nurjannah, Kelompok Konstituen Kota Parepare
Reses Partisipatif, Narasi Publik di Legislatif
3. Samsul Widodo, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Inovasi Desa Membangun Tradisi Berbagi Gagasan
4. Ester Wanimbo
Laporan Dari Garis Depan
5. Adi Saifullah Putra
Mall Sampah – Layanan Pengelolaan Sampah Online
6. Mansyur Rahim
PASIKOLA, Masa Depan Transportasi Publik di Kota Makassar
7. Satriaddin “Arie Kriting”
Orang Timur Bicara

Melanjutkan kesuksesan Forum KTI sebelumnya, *side events* dilaksanakan selepas kegiatan utama untuk menambah wawasan terkait perbaikan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan dengan partisipasi kampung di Papua yang didukung oleh KOMPAK, penggunaan sumber data baru untuk penyusunan kebijakan (Pulse Lab Jakarta), inovasi peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan di desa-desa sangat tertinggal melalui pemberdayaan masyarakat (KIAT Guru), penguatan kelembagaan ekonomi desa (OXFAM), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dalam *Youth Showcase* (UNFPA), Reses Partisipatif (MAMPU), Dimensi Baru Kemitraan Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah (Knowledge Sector Initiative), serta Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Kreatif (British Council).

Festival Forum KTI VIII juga menghadirkan Galeri Informasi yaitu pameran yang menghadirkan informasi dari beragam program pembangunan, diantaranya adalah dari

Ditjen PKP (Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Pemerintah Kabupaten Maros; DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) Australia; KIAT Guru; British Council; SMERU; UNFPA; OXFAM Indonesia; Invest Co Op; CCPHI – AKATIGA; USAID-IUWASH; dan Asia Pulp Sinar Mas and Paper dan Tenoon.

Pada hari kedua Festival, dilakukan proses Curah Ide, pada sesi ini peserta Festival Forum KTI VIII bisa saling berbagi ide dan gagasan mengenai peran mereka untuk berkontribusi pada pembangunan. Setiap peserta duduk bersama, dan panitia membagikan sebuah lembar kerja berisi tiga pertanyaan yang relevan dengan tema Festival Forum KTI VIII yaitu “Lokal dan Berkelanjutan”.

Ketiga pertanyaan tersebut adalah:

1. Apa konsep Lokalitas?
2. Apa elemen pendukung keberlanjutan dan apa peran Anda?
3. Apa yang Anda akan lakukan setelah acara ini?

Setiap peserta kemudian menggali potensi dan menemukenali apa yang dimaksud dengan lokalitas dalam lokasi dan fokus kedaerahan masing-masing. Kemudian, para peserta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dari keberlanjutan, serta peran-peran apa yang masing-masing peserta mainkan dalam mendukung keberlanjutan.

Pada akhir hari kedua, Dewan Pembina Yayasan BaKTI dan anggota Pokja Forum Kawasan Timur Indonesia memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para Praktisi praktik cerdas dan inspirator yang telah berkontribusi aktif menjawab tantangan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk dokumentasi video Festival Forum KTI VIII dapat mengunjungi tautan <http://bit.ly/VideoFestivalForumKTIVIII>

Events

Jumlah peserta yang hadir pada event yang dilaksanakan di kantor BaKTI untuk periode Januari -Maret 2018 adalah 462 orang terdiri dari 210 Laki-laki dan 252 perempuan dengan jumlah event sebanyak 15 event. Periode April - Juni 2018 adalah 205 orang terdiri dari 89 Laki-laki dan 116 perempuan dengan jumlah event sebanyak 9 event. Periode Juli-September 2018 adalah **362** orang terdiri dari **142** Laki-laki dan **220** perempuan dengan jumlah event sebanyak **12** event. Periode Oktober-Desember 2018 adalah **398** orang terdiri dari **149** Laki-laki dan **249** perempuan dengan jumlah event sebanyak **12** event. Berikut ini highlight event yang dilaksanakan oleh BaKTI dan juga mitra BaKTI: di tahun 2018:

Musrenbang Kelurahan Kunjungmae

Mengawali tahun 2018, Kelurahan Kunjungmae Kecamatan Mariso Kota Makassar melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, bertempat di Kantor BaKTI Makassar (13/1). Tujuan musyawarah ini untuk mendengarkan usulan warga dari tingkat RT/RW untuk dirangkum menjadi usulan pembangunan di tingkat kelurahan yang mencakup kegiatan lingkungan, sosial dan ekonomi yang diharapkan menjadi prioritas pembangunan di kelurahan pada tahun 2019. Hadir sebagai narasumber yakni Bappeda Kota Makassar, Camat Mariso dan Lurah Kunjungmae. Kegiatan ini dihadiri oleh 45 orang

berasal dari RT/RW se kelurahan Kunjungmae, Puskesmas dan Babinkamtibmas di wilayah ini.

Diskusi Inspirasi BaKTI “Mallsampah – Layanan Pengelolaan Sampah Online”

Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, BaKTI kembali mengadakan Diskusi Inspirasi BaKTI dengan mengangkat topik Mallsampah – Layanan pengelolaan sampah online (9/2). Adi Saifullah Putra, CEO dan Founder Mallsampah hadir sebagai narasumber. Acara ini dipandu oleh moderator Luna Vidya. Mallsampah adalah layanan pengelolaan sampah online yang berdiri tahun 2015 dan menggunakan sistem bagi hasil. Mallsampah ini mempunyai visi untuk meningkatkan proses daur ulang sampah dari sekitar 10% di Indonesia menjadi 20-30% tiap tahunnya. Motor penggerak Mallsampah adalah para Pengepul dan Pemulung yang saat ini berjumlah sekitar 100 orang. Diskusi Inspirasi BaKTI kali ini juga mempertemukan narasumber dengan peserta strategis yaitu dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Polman, Bank Sampah dan juga komunitas pemulung di kota Makassar yang meminta Adi untuk hadir dan berbagi pengetahuan di tempat mereka. Diskusi dihadiri oleh 53 orang peserta terdiri dari 27 orang Laki-laki dan 26 orang perempuan berasal dari NGO/CSO di Makassar, media, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas.

Workshop Laboratorium Inovasi Kota Makassar

Pemerintah Kota Makassar saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan pelayanan publik yang inovatif di semua sektor. Inovasi-inovasi ini dilaksanakan oleh masing-masing OPD (*Organisasi Perangkat Daerah*). Sejalan dengan semangat berinovasi kota Makassar, maka dipandang perlu adanya wadah seperti laboratorium inovasi yang bisa merekatkan OPD di Kota Makassar dalam menggagas inovasi yang berbasis kebutuhan warga. Laboratorium Inovasi adalah sebuah wadah bagi ide-ide kreatif OPD terkait penyelesaian masalah pelayanan publik didiskusikan bersama, menemukan solusi dengan melibatkan multi pihak termasuk masyarakat (*co design and co create*), melakukan proses *testing* dan *prototyping*, inkubasi, dan uji coba bersama-sama.

Sebagai langkah awal pembentukan Lab Inovasi, selama dua hari di tanggal 7 dan 8 Maret 2018 diadakan workshop penggagasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) kerja sama dengan Yayasan BaKTI dan didukung oleh UNDP (United Nation Development Program). Workshop ini bertujuan untuk mengidentifikasi inisiatif inovatif apa yang telah dilaksanakan oleh berbagai OPD Kota Makassar, bagaimana pandangan OPD terkait inisiatif tersebut, bagaimana proses untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi tersebut (termasuk keterlibatan publik), apa kebutuhannya serta mengidentifikasi kebutuhan akan Lab Inovasi. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari di kantor BaKTI dengan dihadiri oleh 49 peserta di hari pertama (Laki-laki: 37 dan Perempuan: 20) dan 54 peserta di hari ke dua (Laki-laki: 34, Perempuan: 20). OPD yang hadir diantaranya adalah perwakilan dari Balitbangda, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Camat, RSUD, Disnaker, Dinas PU, dan beberapa OPD lain.

Ke depan Lab inovasi ini akan memfasilitasi diskusi-diskusi diantara pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan tantangan pembangunan. Peserta juga melakukan *stock taking* atau membuat daftar inovasi yang sedang dijalankan di kota Makassar serta mengidentifikasi *gap* (hambatan) yang ada saat ini.

Di akhir workshop disepakati bahwa Laboratorium Inovasi perlu untuk dirancang dan dibentuk dimana dan Badan Penelitian dan Pengembangan kota Makassar sebagai *leading sector*. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah lab inovasi merupakan wadah untuk mendiskusikan gagasan – gagasan, melaksanakan inkubasi, *test* dan *prototyping*, uji coba bersama-sama, perlunya pemahaman dan sosialisasi terkait arti pentingnya lab inovasi, pentingnya keterlibatan aktif stakeholder, anggaran dan komitmen dari pemerintah kota Makassar sendiri serta payung hukum yang bisa memastikan keberlanjutan lab inovasi. Workshop lanjutan dilaksanakan pada bulan April 2018 untuk mendiskusikan bersama Laboratorium Inovasi seperti apa yang akan dikembangkan dan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan.

Tes dan wawancara kandidat Program INSPIRASI 2018



Tahapan tes dan wawancara bagi kandidat peserta program INSPIRASI (Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) tahun 2018 dilaksanakan oleh UnionAID dan diikuti oleh 17 pemuda berasal dari organisasi masyarakat sipil (CSO) di wilayah Sulawesi dan Maluku selama 3 hari bertempat di Kantor BaKTI Makassar yang dilaksanakan 6 April 2018. INSPIRASI adalah program belajar selama 6 bulan di Selandia Baru yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan didanai sepenuhnya oleh UnionAID dan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT). Program ini dikelola oleh UnionAID bekerja sama dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) sebagai mitra lokal di Indonesia dan Auckland University of Technology (AUT) Selandia Baru.

Tujuan Program ini untuk membantu para pemimpin muda dari Indonesia Timur untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri mereka sehingga mereka dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat dan wilayah Indonesia Timur yang lebih luas. Turut hadir pada hari pertama kegiatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Sri Endang Sukarsih. Ibu Endang dalam sambutan singkatnya mengatakan sangat mendukung program ini karena berdampak positif untuk peningkatan kapasitas pemuda di kawasan timur Indonesia. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Utusan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Staf New Zealand Embassy Jakarta sebagai anggota tim panel seleksi.

Sharing Session Beasiswa

Bertempat di Kantor BaKTI Makassar (21/4) telah dilaksanakan kelas sesi sharing mengenai beasiswa dan panduan menulis oleh kejarAsa.com yang berkolaborasi dengan penerima beasiswa dan diikuti 10 orang peserta yang ingin berkonsultasi dan belajar langsung dengan penerima beasiswa.



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu pemuda Makassar yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa dalam pengenalan dan pengembangan diri, rencana studi, penulisan esai, serta berbagi pengalaman dengan diskusi yang lebih mendalam antara peserta dengan penerima beasiswa sebelum menghadapi tahap proses seleksi. Harapannya pemuda Makassar dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kualitas pengetahuan dan kepribadian yang baik.

Workshop Penyusunan Modul Mengelola Konflik Bagi Pekerja Sosial



Kota Makassar dan Kabupaten Gowa merupakan daerah terpilih untuk model pengembangan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Layanan yang diberikan oleh PKSAI ada melakukan intervensi berupa pencegahan, deteksi dini dan rehabilitasi dengan lebih fokus pada deteksi dini untuk anak-anak dan keluarga yang

berisiko atau terpapar kekerasan, eksploitasi, pelecehan, pengabaian, pelembagaan, dan lain-lain. UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama Tim penyusun mengadakan pertemuan untuk membahas Draft modul manajemen konflik sebagai acuan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat, bertempat di kantor BaKTI Makassar (15/5). Masing-masing tim akan menyusun draft modul yang berisi tujuan umum dan tujuan khusus penyusunan modul, langkah-langkah memfasilitasi, waktu, metode, alat dan bahan, lembar kerja dan bahan bacaan.

INSPIRASI BaKTI – Diskusi Buku “Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan”

Yayasan BaKTI kembali melaksanakan INSPIRASI BaKTI, kali ini mendiskusikan buku catatan tentang perjalanan pendampingan Program MAMPU BaKTI di 5 provinsi di kawasan timur Indonesia yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Program MAMPU sendiri berfokus pada Pendampingan penguatan perempuan untuk kesejahteraan dan keadilan dengan strategi menguatkan Anggota Parlemen Perempuan. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 5 Juni di Kantor BaKTI menghadirkan narasumber Endang Sari, S.IP. M.Si, Dosen Ilmu Politik UNHAS dan Lusya Palulungan, Program Manager MAMPU – BaKTI yang dimoderatori oleh Luna Vidya. Dalam diskusi ini beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber antara lain Penguatan Anggota Parlemen Perempuan ini menjadi pintu masuk dari berbagai inisiatif yang menyangkut perempuan di akar rumput.



Adanya berbagai inisiatif seperti terbentuknya kelompok konstituen yang berbeda dari kader partai, adanya reses partisipatif, serta membangun profil Anggota Parlemen Perempuan yang “layak wakil”. Sangat penting untuk menggunakan pembelajaran dan strategi yang telah dibangun oleh Program MAMPU – BaKTI, untuk mempersiapkan perempuan sebagai anggota parlemen maupun perempuan sebagai warga masyarakat, pemilih cerdas. Kegiatan ini diikuti oleh 83 peserta terdiri dari 28 laki-laki dan 55 perempuan berasal dari pemerintah daerah, program mitra pembangunan internasional, LSM/CSO, media, akademisi dan masyarakat umum.

Seminar Pembangunan KTI dan Bantuan Pembangunan Australia

Konsulat-Jenderal Australia di Makassar bekerja sama dengan BaKTI memfasilitasi Seminar Pembangunan KTI dan Bantuan pembangunan Australia, bertempat di Kantor BaKTI Makassar (23/7).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka kunjungan Ibu Julie Hecksher, Direktur Jenderal Asia Tenggara di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam mengelola program pembangunan yang didukung oleh Bantuan Pembangunan Australia dan dimoderatori oleh Bapak Richard Mathews, Konsul-Jenderal Australia di Makassar serta dihadiri oleh sejumlah program dan mitra-mitra antara lain KOMPAK, MAMPU, dan AIPJ 2.



Inspirasi BaKTI “Mengubah Menginspirasi – Cerita Tentang Perubahan”



Yayasan BaKTI menggelar event Inspirasi BaKTI berupa diskusi buku dari Program MAMPU-BaKTI berjudul 'Mengubah dan Menginspirasi - Cerita tentang Perubahan' (10/8). Buku ini berisi informasi mengenai perjalanan program, khususnya capaian-capaian di masyarakat dimana perempuan merupakan tokoh kunci dalam capaian-capaian tersebut. Diskusi buku ini bertujuan untuk berbagi informasi pengalaman perempuan agar menjadi cerita dan

inspirasi bagi perempuan lain untuk membuat perubahan. Hadir sebagai narasumber adalah Alwy Rahman, Akademisi UNHAS dan Husaima Husain, Aktivistis Perempuan dengan moderator Luna Vidya. Beberapa catatan dari diskusi ini yakni buku ini menjadi jembatan untuk mengetahui hal-hal lebih dalam dari sekedar catatan kehidupan orang-orang dan komunitas. Diskusi ini dihadiri oleh 68 peserta berasal dari pemerintah daerah, LSM/CSO, media, akademisi dan masyarakat umum.

Diskusi Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa Baru Provinsi Sulsel

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan melalui "RIMA 4in1" (Research, Innovation, Meeting, and Action Four in One) yang merupakan Forum Multi Stakeholder melaksanakan diskusi terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, di kantor BaKTI Makassar (20/8). Forum ini terdiri dari pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas yang bertujuan sebagai forum bersama dalam mencari solusi dan tindakan nyata dalam menyelesaikan tantangan masyarakat.



Kegiatan ini diadakan untuk saling berbagi pengalaman dan menghimpun masukan dari stakeholder yang hadir dalam memberikan tawaran solusi terkait PPDB Sistem Zonasi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir sebagai narasumber adalah Irman Yasin Limpo (Kepala Diknas Prov Sulsel), Prof. Arismunandar, MPd (Pengamat Pendidikan), Muh Ramli Rahim (Ketua Ikatan Guru Indonesia), Herman Hafid Nessa, SH (Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Makassar), dan Nielma Palamba, SH, Map (Kadis Dukcapil Kota Makassar). Diskusi dihadiri sebanyak 60 peserta berasal dari Balitbangda kabupaten/kota, Bappeda, Kepala Sekolah, Guru, NGO dan orang tua siswa.

Workshop Peran CSO Dalam Pemanfaatan Dan Replikasi Pelayanan Publik

Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan TRANSFORMASI-GIZ dan didukung oleh program KOMPAK dan BaKTI menggelar workshop peran CSO (Civil Society organization) dalam memanfaatkan dan mereplikasi inovasi pelayanan publik dan pemanfaatan SP4N-LAPOR! (27/9). Output dari workshop ini adalah rumusan strategi CSO dalam mendorong kelompok dampingan untuk memanfaatkan LAPOR! serta rumusan strategi dalam mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan publik.

Hadir sebagai narasumber Ketua Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Subhan Djoer, ST, MH dan dimoderatori oleh Ismu Iskandar. Ombudsman dalam SP4N (Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) sebagai pengawas eksternal sesuai UU 37/2008 dan UU 25/2009 dan sejalan dengan target RPJMN 2015-2019 untuk mendorong pembentukan pengelolaan pengaduan internal di tiap penyelenggara pelayanan publik.



SP4N sendiri menggunakan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai platform pengaduan. Pengaduan bisa dilakukan oleh masyarakat melalui kanal sms 1708 atau melalui website www.lapor.go.id. Workshop dihadiri oleh 20 peserta berasal dari Ombudsman, TRANSFORMASI-GIZ, Program KOMPAK dan sejumlah CSO di Sulawesi Selatan.

Diskusi Rancangan RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi Sulawesi Selatan menggelar Diskusi Rancangan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar (3/10). Diskusi ini bertujuan untuk mendapat masukan dari berbagai pihak terhadap rancangan RPJMD Sulsel tahun 2018-2023.



Rancangan RPJMD ini juga memuat 5 misi, 5 tujuan, 5 sasaran, 5 strategi, 5 arah kebijakan dan 34 program prioritas. Kegiatan ini dibuka oleh Diskusi dibuka oleh Kepala Balitbangda

Sulsel, Dr.Muh. Iqbal Suaib. Kepala Balitbangda Sulawesi Selatan dan hadir sebagai narasumber adalah A. Zulkarnaen Arief (Ketua Kadin Sulsel), Abd. Madjid Sallatu (Pengamat pembangunan daerah), A. Muh. Irfan AB (Anggota DPRD Sulsel) dan dimoderatori oleh Dr.Agussalim (Ekonom UNHAS dan Tim penyusun naskah akademik RPJMD Sulawesi Selatan). Kegiatan ini dihadiri oleh 74 peserta berasal dari unsur pemda, Kadin, Akademisi, LSM, media dan legislatif.

Inspirasi BaKTI “Diskusi Buku : Panduan Jurnalis Berspektif Perempuan dan Anak”

Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP), Yayasan BaKTI kembali menggelar acara Inspirasi BaKTI berupa Sosialisasi dan Diskusi Buku Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak (27/11). Panduan tersebut dibuat atas kerjasama Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) – Yayasan BaKTI dan AJI Makassar. Diskusi yang mengangkat tema “Peran Media untuk Pencegahan Perkawinan Anak” bertujuan untuk membuka wawasan bagi jurnalis dan berbagai pihak mengenai penulisan dan pemberitaan yang berperspektif perempuan dan anak.



Hadir sebagai narasumber adalah Qodriansyah Agam Sofyan (Ketua AJI Makassar/penulis panduan) dan Sunarti Sain (jurnalis/aktivis perempuan dan anak). Dengan adanya panduan ini, jurnalis tidak hanya diharapkan menjadi jurnalis objektif tetapi juga advokatif. Diskusi Inspirasi BaKTI ini dihadiri oleh 77 orang peserta berasal dari kalangan media, pers kampus, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah dan program mitra pembangunan internasional.

Workshop Lab Inovasi Pemerintah Kota Makassar

Balitbangda Kota Makassar bekerja sama dengan UNDP dan Yayasan BaKTI melaksanakan Workshop Lab Inovasi pada tanggal 12-13 Desember 2018 yang menghadirkan Mr. San Kim, Expert Seoul Innovation Park. Mr. San Kim berbagi pengetahuan dan pengalaman Seoul Innovation Park kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Makassar dalam rangka pengembangan Lab Inovasi Kota Makassar.



Mr. San Kim berbagi pengalaman dengan memberikan tips kepada peserta yang berasal dari OPD Kota Makassar bahwa dalam pengembangan Lab Inovasi Kota Makassar, pengelola Lab Inovasi dan OPD harus selalu berpikir terbuka/*open minded* dengan selalu bekerja bersama dengan berbagai pihak seperti LSM, Akademisi, komunitas kreatif, sektor swasta, media, mitra pembangunan dan pelaku pembangunan lainnya. Lab Inovasi Kota Makassar harus menjadi rumah bagi penggiat inovasi. Lab Inovasi harus selalu fokus pada proses seperti proses identifikasi potensi dan masalah yang ada di masyarakat, penggabungan solusi yang berpusat pada kebutuhan masyarakat daripada struktur Lab-nya sendiri.

Information Help Desk

Selama periode Januari - Maret 2018, BaKTI melayani permintaan informasi:

- Permintaan dari USAID Indonesia-MESP Program untuk menjawab pertanyaan assessment kondisi dan status CSO di Indonesia
- Permintaan dari Program TRANSFORMASI-GIZ untuk mendukung acara Launching Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan
- Permintaan dari Kementerian Desa untuk kontak detail Bumdes yang kelola listrik di level komunitas
- Permintaan dari Bappeda Sulsel untuk contact mitra internasional di Sulsel untuk diundang ke Musrenbang Prov Sulsel

Selama periode April-Juni 2018, BaKTI melayani 25 permintaan informasi antara lain:

- Permintaan dari BAPPEDA Prov. Sulsel untuk list mitra pembangunan internasional yang bekerja di Sulawesi Selatan
- Permintaan dari Program KOMPAK untuk memfasilitasi Musrenbang Otsus Papua di Sentani, Merauke dan Biak
- Permintaan dari The SMERU Institute untuk list CSO/NGO di NTT, Maluku dan Papua

Selama periode Juli-September 2018, BaKTI melayani 33 **permintaan informasi**:

- Permintaan dari Komunitas Possible Hub bekerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk pelaksanaan pelatihan *softskill* bagi pemuda lulusan SMA/SMK yang masih menganggur di Kantor BaKTI

- Permintaan dari Bapelitbangda Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan Diskusi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Sulsel
- Permintaan dari IOM Makassar untuk wawancara *Data Use Assessment dan Political Economic Analysis* terkait Building Healthy Cities program (Smart City Kota Makassar)
- Permintaan dari TRANSFORMASI-GIZ untuk list CSO dan list media di Sulsel fokus pelayanan public

Selama periode Oktober-Desember 2018, BaKTI melayani 35 permintaan informasi:

- Permintaan dari USAID untuk menjadi pembicara dalam Indonesia Civil Society Forum 2018 di Jakarta
- Permintaan dari Filantropi Indonesia untuk sharing praktik cerdas dalam Filantropi Indonesia Festival 2018 di Jakarta
- Permintaan dari Kantor Staf Presiden untuk NGO di Sulsel untuk diundang dalam FGD SDGs
- Permintaan dari Kabupaten Luwu Utara Prov. Sulsel untuk surat rekomendasi tentang inovasi Antenatal Care Hipnoterapi

Jika anda memiliki pertanyaan seperti informasi contact person, dokumen pembangunan KTI, event, atau program pembangunan KTI, silahkan email ke: info@bakti.or.id

Jaringan Pertukaran Pengetahuan

Forum Kepala Bappeda Provinsi Se-KTI XIII

Pada 5 Oktober 2018 bertempat di Atlet Century Park Hotel Jakarta, dilaksanakan pertemuan Forum Kepala Bappeda Provinsi se-Kawasan Timur Indonesia (KTI) XIII. Kegiatan ini difasilitasi oleh Forum Kawasan Timur Indonesia dan Yayasan BaKTI, dan didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dengan mengangkat tema “Penentuan Sektor Strategis bagi Kawasan Timur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020-2024”.



Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI dilakukan secara rutin untuk mengedepankan isu-isu pembangunan di KTI untuk menjadi perhatian dalam cakupan nasional. Dalam kerangka pijak tersebut, Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI kali ini ditujukan untuk memperluas jangkauan partisipasi KTI dalam proses teknokratik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024.

Forum Kepala Bappeda Provinsi se-KTI XIII dalam pelaksanaannya menghadirkan perwakilan dari Bappeda Provinsi NTB, Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara; Menteri PPN/Kepala Bappenas RI sebagai keynote speaker; Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas yang diwakili oleh Direktur Tata Ruang, dan Pertanahan; Staf Ahli Menteri PPN Bidang Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur dan Team Leader Knowledge Sector Initiative (KSI). Selain itu, beberapa perwakilan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) memaparkan perkembangan dan pentingnya Analisis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Pertemuan sehari ini pula dirangkaikan dengan makan siang bersama Deputy Head of Mission, Australian Embassy in Jakarta, *His Excellency* Mr. Allaster Cox di tempat pelaksanaan kegiatan.

Dalam Forum Kepala Bappeda se-KTI, sesi diskusi dan berbagi kemudian dilaksanakan dengan setiap perwakilan Bappeda provinsi KTI yang hadir memaparkan perkembangan akselerasi pembangunan, isu-isu strategis dan kinerja pembangunan yang menonjol di daerah masing-masing. Selain itu, perwakilan Bappeda provinsi KTI memberikan masukan untuk masalah, isu strategis, dan capaian pembangunan dirangkum dalam Matriks Provinsi yang akan diberikan sebagai input daerah untuk penyusunan *background study* untuk penyusunan Buku III RPJMN.

Unduh laporan dan informasi selengkapnya dapat mengunjungi

<https://bakti.or.id/berita/penentuan-sektor-strategis-di-kawasan-timur-indonesia-dalam-rpjm-2020-2024>

Sharing Platform Pertukaran Pengetahuan Yayasan BaKTI dan PUSAKA LAN

Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Knowledge Sector Initiative (KSI) sejak bulan Juni 2018 untuk kegiatan pengembangan kompetensi Analisis Kebijakan Publik di Provinsi Sulawesi Selatan dan Aceh, sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pada instansi pemerintah di tingkat sub nasional (Sulawesi Selatan dan Aceh) serta kegiatan berbagi pengetahuan antara Yayasan BaKTI dan Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA) LAN terkait *platform* pertukaran pengetahuan yang dikembangkan oleh masing-masing lembaga. PUSAKA LAN mengelola portal Knowledge Management (KM 8.7) yang merupakan wadah untuk memfasilitasi kebutuhan analisis kebijakan akan data, informasi maupun pengetahuan. Yayasan BaKTI mengelola platform pertukaran pengetahuan khususnya untuk pembangunan Kawasan Timur Indonesia melalui jaringan, media dan event pertukaran pengetahuan.



Untuk itu, pada tanggal 18 Desember 2018 dengan dukungan KSI dilaksanakan pertemuan antara PUSAKA LAN dan BaKTI untuk saling berbagi pengetahuan terkait *platform* pertukaran pengetahuan yang dikelola oleh masing-masing lembaga untuk memfasilitasi kebutuhan informasi dan pengetahuan pelaku pembangunan khususnya analis kebijakan dalam mendorong kebijakan berbasis bukti. Pada pertemuan ini, teridentifikasi beberapa potensi kerja sama antara PUSAKA LAN dan BaKTI dalam memperkuat platform pertukaran pengetahuan ke dua lembaga.

Kegiatan Sahabat BaKTI

Pada rentan waktu Januari-Maret 2018, perpustakaan BaKTI melakukan dua kegiatan yakni:

1. Kelas Sharing Diskusi Buku “**Upaya Penambahan Nilai Pada Pohon-Pohon Milik Petani Hutan**” yang dilaksanakan 6 Februari lalu di Perpustakaan BaKTI. Kegiatan dihadiri 28 orang peserta terdiri dari 13 perempuan dan 15 laki-laki. Hadir sebagai narasumber Bapak Achmad Rizal, Ibu Nur Hayati dan Ibu Nurhaedah. Ketiganya merupakan peneliti dari Balai Litbang LHK Makassar. Para nara sumber memberikan gambaran umum buku ini per bab nya, juga menceritakan pengalaman mereka selama meneliti di Hutan Rakyat Kabupaten Bulukumba.



2. Kelas Craft Anak

Sebagai lembaga yang peduli dengan isu anak, Perpustakaan BaKTI secara rutin melaksanakan kegiatan kreatif untuk anak-anak terutama terkait keterampilan. Pada tanggal 28 Maret 2018 diadakan kelas craft yang dihadiri sejumlah anak. Kelas craft ini bertujuan untuk mengasah keterampilan, kesabaran dan ketelitian anak dengan membuat mainan nenek sihir dan sapu terbang dari bahan-bahan bekas (recycled).



Pada bulan April sampai dengan Juni 2018, perpustakaan BaKTI melakukan kegiatan berupa:

1. Kelas diskusi tematik dengan tema "**Cerdas Berinternet Berantas Hoax!**" Tema ini dipilih terkait situasi terkini di Indonesia dimana berita hoax begitu mudah ditemui di media-media sosial. Kebijakan pengguna sosial media sangat diperlukan untuk menyaring setiap berita-berita/informasi yang disajikan. Bertindak sebagai narasumber sore itu adalah Mansyur Rahim, salah satu penggiat internet sehat di Makassar yang juga adalah Blogger.

Hadir dalam diskusi ini sebanyak 17 peserta yang terdiri dari 7 peserta laki-laki dan 10 peserta perempuan. Peserta datang dari unsur mahasiswa dan LSM serta staf BaKTI sendiri. Diskusi berjalan dengan seru dimana muncul pertanyaan menarik mengenai apakah memungkinkan hoax diberi standar, bagaimana tingkatannya dan bagaimana cara yang efektif untuk mengurangi atau memberantas penyebarannya serta bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Kemeninfokom dalam memberantas hoax.



Pada rentan waktu Juli sampai dengan September 2018, perpustakaan BaKTI melakukan 3 kegiatan berupa :

1. Kelas Craft Anak “Membuat Boneka Gajah dari Sedotan Bekas”

Masih dengan tema *recycle*, Kak Meli dari *She and Him* mengajarkan adik-adik untuk memanfaatkan sedotan menjadi sebuah mainan lucu berbentuk gajah (31/8). Selain sedotan, anak-anak bisa memanfaatkan karton atau kertas sisa yang tak terpakai lagi. Anak-anak begitu antusias membuat mainan ini.



2. Kelas Sharing “Kelas Mendongeng”

Kelas Mendongeng diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 dengan narasumber Kang Bugi Sumirat, seorang pendongeng. Kelas ini dihadiri oleh 28 peserta dari berbagai latar belakang, 10 diantaranya laki-laki dan 18 merupakan perempuan. Dengan gayanya yang santai, Kang Bugi berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam mendongeng. Ada dua hal yang penting dalam mendongeng, yaitu alat peraga dan *mind mapping*.



3. Kelas Craft “Membuat Jam dari Kardus Bekas”

Kelas craft diadakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dipandu oleh Meli, seorang crafter muda Makassar. Kelas dimulai jam empat sore dengan jumlah peserta sebanyak 15, 9 orang merupakan perempuan dan 6 orang merupakan laki-laki.



Pada rentan waktu Oktober sampai dengan Desember 2018, perpustakaan BaKTI melakukan kegiatan berupa Kelas Diskusi Tematik “Pengusaha Muda, Why Not?”



Diskusi yang menghadirkan Reza Zahira, salah satu pengusaha muda dari Makassar sebagai narasumber. Di usia 23 tahun, Reza telah memiliki 4 usaha yaitu Zairah Boutique, Zairah Hijab, Zairah Studio dan Es Kepala Milo Asoy yang tersebar di beberapa tempat strategis di Kota Makassar, seperti Mal Ratu Indah, Giant Ekstra, dan Mall Nipah. Reza berbagi cerita inspirasi dalam merintis usaha di usia muda dan bagaimana memanfaatkan social media untuk mengembangkannya. Cerita ini yang kemudian dibagi Reza kepada Sahabat BaKTI yang hadir dari berbagai latar belakang seperti mahasiswa, pelajar, NGO, pelaku usaha dan UKM, komunitas kreatif dan peserta umum lainnya.

Selama bulan Oktober – Desember 2018, jumlah pengunjung BaKTI adalah sebanyak 516 orang, yang terdiri atas pengunjung laki-laki 377 dan pengunjung perempuan sebanyak 139. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 419 adalah pengguna perpustakaan/galeri pengetahuan dan 97 berkunjung untuk mengakses internet. Jumlah buku 4.386. Dalam tiga bulan ini pula kami menerima publikasi sebanyak 27 exemplar (buku, buletin, brosur, CD, laporan dan modul) dari mitra BaKTI.

Total jumlah Sahabat BaKTI per Desember 2018 adalah sebanyak 1.889 anggota, dari jumlah tersebut anggota laki-laki sebanyak 1.074 dan anggota perempuan sebanyak 815. Anggota Sahabat BaKTI datang dari berbagai unsur seperti NGO, Mahasiswa, Swasta, Pelajar, Akademisi, media, pemerintah dan lainnya. **Mailing List** Sahabat BaKTI dimoderasi oleh BaKTI dan secara regular BaKTI membagikan informasi dan pengetahuan seperti beasiswa, peluang, artikel pembangunan, event-event menarik dan lowongan kerja bidang pembangunan selain itu anggota juga berbagi informasinya melalui milist ini. Informasi dari milist ini oleh beberapa Sahabat BaKTI kemudian menggunakannya untuk dijadikan konten pada website yang mereka kelola. Sumber *content* dalam milis berasal dari organisasi/lembaga yang meminta informasinya disebarkan melalui media-media BaKTI, mengingat jangkauan dan sebaran Sahabat BaKTI yang signifikan.

Jika anda memiliki materi publikasi yang dapat mendukung BaKTI dalam meningkatkan pertukaran pengetahuan yang ingin didisplay di perpustakaan kami, silahkan kirimkan ke alamat berikut ini:

Yayasan BaKTI

Jl. H.A.Mappanyukki No. 32, Makassar 90125

Phone: + 62 411 832228/833383

Contact Person: Indina Isbach (Librarian)

Praktik Cerdas

• **Praktik Cerdas 2018**

Pada tanggal 24-25 Oktober 2018 dilaksanakan event 2 tahunan BaKTI yakni Festival Forum Kawasan Timur Indonesia ke 8 di Makassar yang mengangkat tema Lokal dan Berkelanjutan. Dalam event ini 5 praktik cerdas terpilih 2018 ditampilkan. Kelima praktik cerdas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalaodi: Kampung Ekologi Penjaga Tidore
2. Data yang Mengubah Dunia – Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik di Papua dan Papua Barat
3. Mengubah Minyak Jelantah menjadi Biodiesel
4. PANADA: Portal Analisis Data Berbasis Peta di Kota Manado
5. Lakoat.Kujawas : Dari Pendidikan Karakter ke Wirausahaan Sosial di Taiftob, Mollo Utara

Kelima praktik cerdas tersebut dipresentasikan pada sesi Panggung Inspirasi dan para praktisi praktik cerdas tersebut juga berbagi kisah inspiratif mereka melalui dokumentasi video dan pameran foto.

• **Update Praktik Cerdas**

1. Malaria Center di Halmahera Selatan

Program LaCaK Malaria memenangkan penghargaan yang diinisiasi oleh PBB di Swiss. LaCaK Malaria berhasil menyisihkan 700 peserta dari berbagai negara untuk

kategori e-Health dan memenangkan WSIS (World Summit on the Information Society) Prizes 2018. LaCaK" atau Lapor Cepat adalah sistem pelaporan cepat kasus malaria. Sistem ini memanfaatkan layanan telekomunikasi selular yang saat ini telah mencakup banyak desa di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sistem LaCaK ini menggunakan UMB (UUSD Menu Browser, USSD = Unstructured Service Supplementary Data). UUSD itu sendiri adalah teknologi GSM yang sering digunakan sebagai akses layanan tambahan.

Praktik cerdas Malaria Center di Halmahera Selatan direplikasi di 5 kabupaten di Papua. Lima kabupaten tersebut adalah Keerom, Sarmi, Mimika, Boven Digoel dan Kab. Jayapura. Kelima kabupaten ini dipilih karena merupakan wilayah endemis tertinggi malaria di Papua. Upaya replikasi oleh Pemerintah Papua ini bekerjasama dengan Unicef dan Kementerian Kesehatan. Unicef melakukan pendampingan pembentukan Malaria Center yang bersifat *technical assistance* salah satunya dengan menempatkan tenaga pendamping/konsultan malaria yang merupakan praktisi praktik cerdas Malaria Center di Halmahera Selatan.

Pada tanggal 22 November 2018 Bupati Kabupaten Keerom meresmikan Sekretariat Malaria Center di Kabupaten Keerom Papua (Center of Excellent Wilayah Adat Mamta). Pendirian Malaria Center di Papua adalah bentuk replikasi praktik cerdas Malaria Center yang ada di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang didokumentasikan dan dipromosikan BaKTI tahun 2010 lalu.

Bapak Firmansyah Mustafa sebagai praktisi dan penggerak Malaria Center di Halmahera Selatan juga terlibat memberikan bantuan teknis bersama dua pendamping lain yang bekerja bersama UNICEF dan pemerintah Papua dalam proses pembentukan Malaria Center ini. Selain di Keerom, Malaria Center juga akan dibentuk di Sarmi, Mimika, Boven Digoel dan Kabupaten Jayapura.



2. Pertanian Alami Salassae

Kunjungan Staf Kepresidenan Republik Indonesia bersama Staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bupati Bulukumba serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Holtikultura dan Perkebunan ke Desa Salassae (19/2). Kunjungan ini sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap praktik pertanian alami yang dikembangkan Salassae, upaya mendorong penyebaran

praktik cerdas ini khususnya di kabupaten Bulukumba serta mendukung program nasional kedaulatan pangan sebagai salah satu Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo. Pertanian alami menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SMA Negeri 14 Kabupaten Bulukumba. Pertemuan yang direncanakan berlangsung selama 20 kali terdiri dari teori dan praktik. Selain itu, siswa juga didorong untuk bersama-sama merumuskan rencana capaian pengembangan kapasitas siswa mata pelajaran pertanian alami.

Desa Salassae menerima beberapa kunjungan belajar dari berbagai daerah baik dari kabupaten Bulukumba sendiri maupun dari kabupaten lain seperti kelompok tani Luwu Utara, Jeneponto, Gowa, Studi Banding 21 orang Kelompok Tani Kabupaten Soppeng yang didampingi oleh Yayasan Matepe. Selain itu beberapa kali menerima kunjungan belajar dari mahasiswa dan pelajar seperti Studi Tour Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sibatua Pangkep.

Dalam event Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII di Makassar lalu, selain panggung utama juga diadakan beberapa *side event* dalam bentuk talkshow dan diskusi. Pada *side event* yang mengangkat tema Kemandirian Pangan dari Desa Berdaya, Desa Salassae yang diwakili oleh Bapak Armin Salassa juga hadir berbagi pengalaman. Pak Armin berbagi bagaimana bertani alami bukan sekedar soal bagaimana bertani tanpa pupuk dan racun kimia sintetis saja tetapi juga tentang aksi keberlanjutan pendidikan dan pembangunan organisasi bagi keluarga petani.



Sebelumnya pada tanggal 5 - 7 Oktober 2018 desa Salassae mendapat kunjungan belajar dari petani-petani kabupaten Barru untuk belajar pertanian alami dan pengorganisasian masyarakat dilaksanakan di Salassae.

Update Replikasi di Kab. Belu NTT

Jumlah desa yang telah mendapatkan pelatihan pertanian alami (langsung dari Bapak Armin Salassa) sebanyak 1 desa yaitu desa Leun Tolu, total 18 orang yang telah dilatih terdiri dari perempuan sebanyak 15 orang, 3 orang laki-laki.

Replikasi pertanian alami telah dilakukan di 4 desa lainnya yaitu Desa Mandeu, Desa Naitimu, Desa Teun, Desa Metroi dan 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Malaka, dan

salah satu pemuda dari Kabupaten Malaka akan diberikan beasiswa magang ke Jepang untuk lebih memperdalam lagi tentang Pertanian Alami

Bupati Belu mencanangkan 4 desa yang telah menerapkan pertanian alami dijadikan sebagai desa *Pilot Project* pertanian alami dan telah ditindaklanjuti oleh BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), meminta Ibu Maria Funan (sebagai perintis pertanian alami di Belu) untuk memberikan pelatihan kepada 20 desa lainnya. Semua operasional pengembangan pertanian alami ini mendapatkan bantuan dari Dana Desa. Selain tanaman padi, pertanian alami ini juga sudah digunakan untuk tanaman sayuran, terutama di Kabupaten Malaka, Kab. Belu.

4. Kapal Kalabia (Raja Ampat, Papua Barat)

Setelah beberapa waktu Kalabia bersandar di Sorong, pada pertengahan Mei 2018 Kapal Kalabia kembali berlayar mengarungi laut Raja Ampat mengunjungi pulau-pulau untuk membagikan ilmu tentang lingkungan/konservasi alam kepada anak-anak. Kunjungan pertama dilakukan di pulau Kafiau.



5. Bumdes Pengelolaan Air Bersih di Lombok Timur

Pada tanggal 13 September 2018 praktisi Praktik Cerdas Bumdes Pengelolaan Air Bersih di Lombok Timur, Bapak Lalu Supratman diundang oleh Blue Forest ke Kabupaten Asmat, Papua. Bapak Lalu Supratman hadir untuk berbagi ilmu terkait pengelolaan air bersih dan sampah serta pemberdayaan ekonomi warga lewat Badan Usaha Milik Desa.

6. Bank Waktu di Adonara

Pada tanggal 28 September 2018 dilaksanakan Bursa Inovasi Desa 2018 di Kabupaten Flores Timur. Dalam event yang menghadirkan inovator-inovator desa ini sistem KTL (Kelompok Tani Lewowerang) atau yang disebut Bank Waktu masuk nominasi dan menjadi komitmen banyak desa untuk direplikasi dalam BUMDES Unit Simpan Pinjam Tenaga Kerja. Hal ini ditandai dengan banyaknya kepala desa dan BPD yang bertanda tangan di kartu komitmen untuk direplikasi di desanya dan dimasukkan dalam

RKPDes 2019. Ternyata menurut Bapak Kamilus Tupen- pegiat KTL- tulisan di majalah BaKTI News tentang KTL sangat mempengaruhi kepala desa.

7. Lakoat.Kujawas dan GEN Oil

Pada tanggal 15 November 2018, Andi Hilmy Mutawkkil dari GEN Oil dan Dicky Senda dari Lakoat.Kujawas hadir di sesi side event Festival Filantropi Indonesia untuk berbagi cerita mengenai praktik cerdas yang mereka gagas. Dicky Senda berkisah tentang geliat literasi kampung yang dilaksanakan bersama anak-anak desa Taiftob dan pemberdayaan mama-mama dengan kegiatan tenun dengan menggunakan pewarna alami. Sedangkan Hilmy memukau peserta Festival Filantropi Indonesia dengan kisah anak muda Pangkep yang mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bapak Muhammad Yusran Laitupa Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI yang berbagi mengenai mengapa BaKTI menggunakan pendekatan praktik cerdas dalam mendorong efektivitas pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya BaKTI mempromosikan praktik-praktik cerdas yang telah tampil di panggung Festival Forum Kawasan Timur Indonesia dengan tujuan agar lebih banyak lagi orang yang terinspirasi dan belajar serta nantinya dapat mereplikasi praktik cerdas ini.



8. SAID SAIK/ Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik di Papua dan Papua Barat

Pada tanggal 22 November 2018 bertempat di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura Papua tim SAID SAIK menerima kunjungan lapangan FORDASI (Forum Desentralisasi Asimetris) Indonesia. Forum ini menghadirkan perwakilan 5 Provinsi yang menjalani desentralisasi secara asimetrik yaitu Provinsi Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Mereka datang berkunjung untuk mengetahui lebih jauh terkait sistem pendataan berbasis masyarakat ini. SAIK merupakan sistem administrasi dan informasi berbasis web yang berisi data kependudukan, sosial dan ekonomi setiap individu yang berada di dalam satu kampung. Sistem ini dapat digunakan secara online maupun offline sehingga tidak memerlukan jaringan internet untuk area-area di daerah Papua maupun Papua Barat yang masih belum memiliki jaringan komunikasi yang memadai.



9. **Ambulans Motor oleh Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS)**

Pada tanggal 10 Desember 2018, Manajemen Dentsu One mengundang YKS untuk berbagi tentang program ambulans motor. Pertemuan ini merupakan awal mula kerja sama dalam penguatan dan pengembangan Program Ambulans Motor ke depan. Dentsu adalah sebuah perusahaan Jepang yang bergerak dalam bidang periklanan.

YKS sejak tahun 2002 mengembangkan Program Manajemen Sarana Transportasi (MST) Kerusakan Minimum di NTT. Ini merupakan program pertama yang diimplementasikan di Asia dan berjalan sukses sampai sekarang. Program ini membantu tenaga kesehatan dalam hal penyediaan perawatan kendaraan motor ambulans untuk melayani kasus-kasus kesehatan di wilayah terpencil di Adonara, Flores Timur.

10. **Sistem informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)**

SIPBM memasuki babak baru dalam pelaksanaannya. Setelah direplikasi di banyak wilayah di Indonesia, sistem pendataan ini kini sedang dicoba untuk diintegrasikan kedalam sistem perencanaan desa untuk pelayanan sosial dasar dengan bekerja sama dengan Kementerian Desa. Jika dulu hanya fokus di isu pendidikan, melalui integrasi ini semua isu coba didukung melalui perencanaan berbasis data seperti isu *stunting*, perkawinan anak dan isu sosial lainnya. Salah satu kabupaten yang saat ini sedang melaksanakan proses integrasi ini adalah kabupaten Bone dan Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan dan dalam waktu dekat Kabupaten Gowa juga akan mereplikasi.

Media pertukaran Pengetahuan

BaKTINews

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Download BaKTINews <http://www.bakti.or.id/baktinews>

Berlangganan BaKTINews, hubungi kami melalui email info@bakti.or.id

Batukarinfo

Baca artikel dan unduh referensi terbaru di batukarinfo.com

Artikel dan referensi terbaru dari program pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Prosesi Adat Kepo' Tandai Serah Terima Program Kiat Guru di Manggarai Timur

Emilia Danus, Kader Desa Rondo Woing tak henti-hentinya menghapus air mata. Kakinya seakan tak kuasa menopang rasa haru yang menyelimuti hatinya. Untaian kalimat perpisahan yang dilantunkan Ibu Rustanty Dewi, Koordinator Lapangan (KL) Program Kinerja dan Akuntabilitas (KIAT Guru) Kabupaten Manggarai Timur, membawanya pada kenangan selama setahun lebih berjuang bersama masyarakat, pemerintah desa dan sekolah untuk perbaikan pendidikan di desanya.

<http://www.batukarinfo.com/kiat-guru/news/prosesi-adat-kepo%E2%80%99-tandai-serah-terima-program-kiat-guru-di-manggarai-timur>

Tukar Pengalaman 3 Kabupaten MELAYANI di Kubu Raya

"Tambah, tambah, tambah!" seru anak-anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Suara Alam sambil mengetuk-ngetukkan mangkuk dan sendok kosong mereka ke meja. Sekira sepuluh anak berseragam olah raga hijau yang duduk mengitari meja siang itu asyik menikmati sup makaroni yang disiapkan sekolah sebagai bagian dari program peningkatan gizi siswa.

<http://www.batukarinfo.com/melayani/berita/tukar-pengalaman-3-kabupaten-melayani-di-kubu-raya>

Lima Delegasi FORDASI Tinjau SAIK dan SAID di Distrik Sentani Timur

Lima delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) dari Daerah Istimewa Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat dan Papua berkunjung ke Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur untuk Meninjau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung/Distrik (SAIK/SAID) yang sementara dikembangkan.

Kepala Biro Otonomi Khusus (Otsus) Setda Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen mengatakan, pihaknya mengajak para delegasi ke Distrik Sentani Timur untuk belajar cara merencanakan program kerja berdasarkan basis data.

<https://batukarinfo.com/news/lima-delegasi-fordasi-tinjau-saik-dan-said-di-distrik-sentani-timur>

Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar bersama Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) BaKTI menyusun buku panduan ini. Buku yang akan mengarahkan jurnalis punya perspektif perempuan dan anak dalam setiap tulisannya.

Bahkan buku ini bertujuan agar jurnalis dan media bisa memiliki pemahaman tentang jurnalisme advokasi khususnya masalah perempuan dan anak. Ketidakhahaman banyak pelaku media tentang sensitifitas ini yang mengakibatkan banyaknya perempuan dan anak

menjadi dua kali lebih buruk dari kejadian awalnya.

<https://batukarinfo.com/referensi/panduan-jurnalis-berperspektif-perempuan-dan-anak>

Program yang Dikelola BaKTI

Program Kerja Sama UNICEF-BaKTI

Lokakarya Advokasi Penganggaran Desa Sehat Melalui Alokasi Dana Desa di Kab.Bone

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen mewujudkan layanan akses air minum aman dan sanitasi layak bagi seluruh lapisan masyarakat dalam tahun 2019. Kebijakan dan langkah dan strategis yang dilaksanakan untuk mempercepat pencapaiannya antara lain dengan mengembangkan program Kabupaten/Kota Sehat yang menargetkan ketersediaan akses 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% sanitasi dapat tercapai dalam 2019 di semua daerah.



Sebagai bentuk dukungan atas komitmen tersebut, Unicef dan BaKTI melalui program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) bersama pemerintah Pemprov Sulawesi Selatan melaksanakan pendampingan program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2013. Fokus utamanya mengembangkan program sekaligus penguatan kapasitas POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pada tanggal 16 – 17 Januari 2018 bertempat di Hotel Sarlim Watampone, Kabupaten Bone, Unicef dan BaKTI melaksanakan Lokakarya Advokasi Penganggaran Desa Sehat melalui dana Dana Desa di Kabupaten Bone. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong peran aktif peserta dari tim Pokja AMPL kabupaten, tim Kabupaten Sehat, kepala desa dan perangkat desa dalam mengembangkan strategi membangun desa sehat yang didukung oleh anggaran Dana Desa atau sumber-sumber pembiayaan potensial lainnya yang ada di Kabupaten Bone.

Lokakarya ini diikuti oleh 38 peserta (19 laki-laki; 19 perempuan) terdiri perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Forum Kabupaten dan Kecamatan Sehat, Kepala Desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sekretaris desa dan aktifis sanitarian. Output lokakarya ini adalah rumusan 6 program desa sehat yang telah disusun oleh tim, kesepakatan integrasi kegiatan program desa sehat ke dalam RPJMDesa dan RKPDesa, dan kesepakatan alokasi anggaran operasional pokja desa sehat.

Kegiatan lanjutan dari Lokakarya ini adalah Focus Group Discussion (FGD)

Peserta kegiatan ini adalah desa yang telah mengikuti kegiatan Lokakarya Advokasi Penganggaran Desa Sehat melalui Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan sebelumnya. FGD ini dilaksanakan 17 Maret lalu di Desa Tanete Harapan, Kec. Cina, Kab. Bone. Diikuti oleh 12 peserta (7 laki-laki; 5 perempuan) terdiri dari 10 orang dari tiga desa (Desa Tanete Harapan, Kanco dan Cinennung) serta 2 orang dari Dinkes Bone (Kabid dan Kasi Kesehatan Lingkungan).

Kegiatan ini bertujuan untuk mereview *draft* program desa sehat yang disusun oleh desa peserta workshop; melakukan *assessment* partisipatif mengenai masalah pokok air minum, sanitasi dan kebutuhan warga desa yang menjadi dasar dari *draft* program desa sehat yang telah dirumuskan; serta membahas rasionalitas usulan anggaran setiap kegiatan program desa sehat dan kesesuaiannya dengan nomenklatur program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyedia anggaran.

Hasil Diskusi: Ketiga desa yakni Desa Tanete Harapan, Desa Kanco, dan Desa Cinennung menyelesaikan rumusan program Desa Sehat yang berisi sejumlah kegiatan AMPL yang telah siap dilaksanakan dalam 2018-2019 dan didanai dengan dana Alokasi Desa Sehat dan APBDesa. Desa Tanete Harapan, Desa Kanco, dan Desa Cinennung dijadikan model pengembangan program desa sehat, tiga desa ini menyetujui dan menyediakan anggaran mulai 150 – 250 juta untuk kegiatan AMPL yang akan direalisasikan dalam tahun 2018. Selain itu, menetapkan setiap kegiatan AMPL dalam program Desa Sehat berdasarkan hasil *assesment* yang dielaborasi kembali secara rinci selama sesi diskusi dalam FGD.

Pertemuan Penguatan Pengelolaan Data Sanitasi Sekolah dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Dasar di Sulawesi Selatan

Data sanitasi sekolah sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2016, 35% sekolah tidak memiliki sumber air bersih yang cukup. 12% sekolah tidak memiliki toilet dan 31% sekolah tidak memiliki toilet yang layak. Pada jenjang sekolah dasar (SD), data statistik Direktorat Jenderal Pusat Data dan Statistik (Pusdadik) Kemdikbud pada pertengahan 2017 jumlah kecukupan terhadap air bersih baru mencapai 84,51 % dan 15,49% bahkan belum memiliki akses air bersih. Penting untuk ketersediaan analisis data sanitasi sekolah dalam Dapodik, agar dapat dijadikan rujukan perencanaan peningkatan kualitas sanitasi di sekolah, khususnya satuan pendidikan dasar SD dan SMP.

Dalam rangka mendukung ketersediaan data tersebut, Unicef dan BaKTI bekerjasama dengan Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Pertemuan Penguatan Pengelolaan Data Sanitasi Sekolah dalam Sistem Dapodik Sekolah Dasar, 22 Februari lalu di Hotel Remcy Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 39 peserta (laki-laki 32; 7 perempuan) yang berasal dari sembilan kabupaten yakni Bulukumba, Jeneponto, Takalar, Barru, Sidrap, Wajo, Luwu Utara, Toraja dan Toraja Utara. Peserta merupakan perwakilan unsur Kabid Dikdas SD, Kabid Program, Kabid Sarana Prasarana, operator Dapodik Dinas Pendidikan, dan operator sekolah.

Hasil yang dicapai antara lain:

1. Teridentifikasi Penanggung jawab pengelolaan DapodikDas (Data Pokok Pendidikan Dasar) dari Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten terdiri dari unsur KaBid Dikdas, Kabid Perencanaan Program, Kabid Sarana, Operator Dapodik, Operator Sekolah berpartisipasi aktif selama kegiatan pertemuan berlangsung.
2. Peserta mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru tentang pentingnya sanitasi sekolah, manajemen data sanitasi dan pemanfaatannya.

3. Peserta menjadi lebih peduli dan memahami dengan baik tentang item-item pertanyaan sanitasi sekolah dalam Dapodik yang harus terus diperbaharui oleh operator sekolah.
4. Tersedianya Baseline data sanitasi sekolah dari delapan kabupaten peserta

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Kota Makassar

Guna mereview dan merencanakan peningkatan kualitas pelayanan PPKAI untuk kesejahteraan sosial anak secara komprehensif maka pertemuan koordinasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan koordinasi sebelumnya, Bappeda Kota Makassar memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor. Bappeda didukung oleh Unicef dan BaKTI menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor PPKAI Kota Makassar pada tanggal 23 Februari lalu. Kegiatan ini diikuti oleh 47 orang peserta (laki-laki 27 orang, perempuan 20 orang) berasal dari OPD terkait di Kota Makassar. Tujuan kegiatan yaitu mendiskusikan pencapaian PPKAI Kota Makassar selama tahun 2017, mendiskusikan dan finalisasi draft *focal point*, serta mendiskusikan pencapaian Rencana Tindak Lanjut yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya. Dan mendiskusikan tantangan dan strategi penanganannya, serta pemaparan hasil data penjangkauan PPKAI Kota Makassar.

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Gowa

Unicef melalui Yayasan BaKTI bersama Pemerintah Kabupaten Gowa telah mendukung dan memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor untuk membahas kemajuan/capaian, data hasil penjangkauan anak rentan, tantangan, hambatan dan sumbatan. Pertemuan koordinasi PPKAI Gowa dilakukan secara bertahap, tahap pertama membahas analisis sumbatan dan strategi teori perubahan. Tahap 2 membahas program kerja integratif dan alur rujukan penanganan anak yang dijangkau maupun melalui aduan.

Pertemuan pertama difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Gowa, dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Tim PPKAI, PUSPAGA, Peksos dan LPA Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 di Gowa, dengan peserta sejumlah 19 orang (laki-laki 7 orang, perempuan 12 orang). Output kegiatan adalah teridentifikasinya sumbatan-sumbatan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif di Kabupaten Gowa, serta tersusun rekomendasi strategi sebagai referensi mengatasi sumbatan untuk mendukung pencapaian pelayanan kesejahteraan anak integratif yang optimal, cepat, tepat dan tuntas.

Pertemuan koordinasi tahap dua, mereview capaian hasil PPKAI dan program kerja integratif yang mendukung pengelolaan kegiatan PPKAI sehingga kualitas pelayanan yang diberikan terus meningkat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2018 di Gowa, dengan peserta sejumlah 55 orang (laki-laki 26 orang, perempuan 29 orang).

Output kegiatan ini adalah pencapaian PPKAI termasuk hasil penjangkauan dan solusi untuk merespon hasil penjangkauan didiskusikan. Hasil analisis sumbatan dan teori perubahan PPKAI Kabupaten Gowa dipresentasikan dan menjadi referensi pengembangan PPKAI Gowa. Disepakatinya rumusan program Integratif PPKAI yang berbasis kluster wilayah dan permasalahan anak yang ditangani.

Pelatihan dan Pengembangan Sistem Database Kerentanan Anak Melalui Website dan Pengumpulan Data Melalui Aplikasi Mobile (*Data Entry*)

Guna mendukung pemerintah Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dalam mengembangkan sistem data base berbasis web dan pengumpulan data anak melalui aplikasi android, Unicef dan BaKTI, memfasilitasi stakeholder penyedia layanan kesejahteraan sosial anak di kota/kabupaten tersebut melalui kegiatan *Pelatihan dan Pengembangan Sistem Data Base Kerentanan Anak Melalui Website dan Pengumpulan Data Melalui Aplikasi Mobile*.

Pelatihan berlangsung selama dua hari (1-2 Maret) diikuti 56 orang peserta (31 laki-laki; 25 perempuan). Fasilitator menyajikan materi pengenalan akses untuk website pusat rehabilitasi sosial anak dan aplikasi mobile ONA Collect yang digunakan untuk survey dan penginputan data.

Pertemuan Koordinasi Petugas *Frontline* PPKAI Kota Makassar dan Kab. Gowa Tahap II

Untuk memperkuat keterampilan dan keahlian para pekerja sosial dan Sakti Peksos, maka Unicef melalui Yayasan BaKTI bekerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi Sakti Peksos sebagai *frontliner* PPKAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Sakti Peksos sebagai petugas *frontline* PPKAI dalam melakukan *assesmen* anak rentan dan berisiko, beserta keluarganya. Memberikan input perbaikan terhadap formulir *assessment* yang ada, sehingga format *assessment* lebih sederhana dan implemetatif. Kegiatan ini dihadiri 20 orang peserta (laki-laki 6 orang, perempuan 13 orang).

Pertemuan Koordinasi Petugas *Frontline* Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kabupaten Gowa Tahap II



Asesmen langsung merupakan kegiatan lanjutan yang dirangkaikan dengan sosialisasi PPKAI Kabupaten Gowa yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2018 di Lapangan Syech Yusuf. Total peserta 157 orang, yang berasal dari dinas terkait sejumlah 53 orang (laki-laki 22 orang, perempuan 31 orang), sedangkan peserta dari kalangan anak-anak sebagai penerima manfaat sejumlah 104 orang (laki-laki 44, perempuan 60 orang). Kegiatan ini didukung oleh Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Anak, Yayasan Sahabat KITA dan LPA Gowa. Beberapa

output kegiatan yang dicapai adalah, 20 orang peserta memiliki pengetahuan cara melakukan asesmen yang efektif, tersedia format asesmen yang telah direvisi.

Pelatihan Pencatatan Kelahiran untuk anak yang baru lahir melalui Sistem Aplikasi Online di Kabupaten Gowa



Keberhasilan cakupan akte kelahiran di Kabupaten Gowa mencapai 90.07% dalam bulan Desember 2017 patut diapresiasi dan dibanggakan. Betapa tidak, prestasi tersebut telah melampaui target RPJMN 2015-2019 yakni 85% pada tahun 2019. Selanjutnya untuk mencapai 100% pemerintah Kabupaten Gowa perlu mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan kontekstual guna menjawab beragam tantangan. Dalam upaya mendukung pemerintah Kabupaten Gowa untuk terus meningkatkan cakupan akte kelahiran, khususnya bagi anak yang baru lahir, maka Unicef melalui kerja sama dengan Yayasan BaKTI melaksanakan pelatihan pencatatan kelahiran untuk anak yang baru lahir melalui Sistem Aplikasi Online di Kabupaten Gowa. Pelatihan berlangsung selama dua hari, 12-13 April 2018, di Hotel Aston Makassar diikuti oleh 36 orang (perempuan 35; laki-laki 1). Unsur peserta terdiri dari staf dan bidan Rumah Sakit Umum, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), staf terkait dari Bappeda, Dinas PP dan KB, dan Dinas Sosial

Pelatihan Menulis Praktik Baik Hasil Program AMPL bagi Tim Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk mendukung keberlanjutan program WASH, maka tim Pokja AMPL di provinsi dan kabupaten berperan aktif untuk mengelola informasi dan praktik baik hasil program dan mendokumentasikannya serta mengelola penyebaran praktik baik dan hasil program tersebut ke masyarakat luas. Kegiatan penyebaran praktik-praktik baik melalui publikasi media cetak dan *online* diharapkan dapat menguatkan semangat dan kemampuan literasi sanitasi bagi tim Pokja AMPL di provinsi dan kabupaten.

Sebagai upaya mendukung pengembangan kapasitas tim Pokja AMPL dalam hal pengetahuan dan keterampilan jurnalisisme warga, Unicef melalui kerjasama dengan Yayasan BaKTI melaksanakan pelatihan penulisan bagi tim AMPL di tingkat provinsi dan kabupaten



. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 24-25 April 2018 di Hotel Remcy Makassar. Diikuti oleh 31 peserta (laki-laki 21; 10 perempuan). Mereka terdiri dari unsur tim Pokja AMPL meliputi Bappeda Provinsi, kabupaten/kota, Dinas Kesehatan dan Dinas Infokom dari 11 kabupaten dan kota yakni Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, Parepare, Gowa, Takalar dan Bulukumba.

Pertemuan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Sulawesi Selatan



Usaha kesehatan sekolah atau UKS merupakan usaha yang dilakukan sekolah untuk mengelola Tri Program Usaha Kesehatan Sekolah (TRIAS UKS) yaitu penyelenggaraan pendidikan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Akses air minum dan sanitasi sekolah merupakan salah satu muatan penting dari program UKS.

Untuk membangun kesepahaman tentang muatan utama program UKS serta tata kelola programnya yang integratif, maka Unicef bersama Yayasan BaKTI, memberikan dukungan melalui kegiatan Pertemuan Tim Pembina Tim UKS tingkat provinsi dan kabupaten. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Mei di Hotel Remcy Makassar. Diikuti oleh 26 peserta (laki-

laki 13; perempuan 13 orang). Mereka terdiri dari tim pembina UKS dari provinsi dan delapan (8) kabupaten/kota yakni Bulukumba, Gowa, Maros, Parepare, Sidrap, Bone, Wajo dan Luwu Utara. Mereka terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Bappeda.

Pendampingan Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) berbasis Masyarakat



Situasi berat bagi diri anak ketika menjadi Anak berkonflik dengan Hukum (AKH) adalah dijebloskan ke dalam penjara, direhabilitasi dan dipulangkan setelah menjalani masa hukumannya. Penjara seringkali tidak menyelesaikan persoalan anak. Resiko berat lain yang harus diemban anak adalah ditolak oleh keluarga, tidak diterima lingkungan tempat tinggal. Upaya meminimalisir resiko tersebut, Unicef melalui Yayasan BaKTI telah melakukan pendampingan reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) berbasis masyarakat. Dengan tujuan agar AKH dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri serta tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan reintegrasi sosial AKH. Unicef melalui Yayasan BaKTI bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan pendampingan reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum berbasis masyarakat. Pendampingan berlangsung dari tanggal 2 Januari- 15 Mei 2018.

Pertemuan Koordinasi dan Perencanaan Tim Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan

Tim Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Sulawesi Selatan yang terdiri dari sejumlah OPD beserta jejaringnya telah berperan aktif dalam pembangunan air minum dan sanitasi, dan berhasil meningkatkan 88% akses air minum dan 82, 74% sanitasi dalam tahun 2017. Unicef melalui Yayasan BaKTI juga bekerja sama dengan Tim Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pengelolaan dan efektifitas pembangunan di sektor air, sanitasi dan *hygine*.



Unicef bersama tim Pokja AMPL akan melaksanakan pertemuan Review dan Perencanaan Program WASH bagi Tim Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memfasilitasi pertukaran informasi, pengalaman dan hasil program sanitasi yang dilaksanakan oleh stakeholder di daerah.

Kegiatan pertemuan stakeholder AMPL Sulsel berlangsung pada tanggal 24 Mei, di Hotel Ibis Makassar. Diikuti oleh 35 peserta dari provinsi dan 11 kabupaten yakni Bulukumba, Takalar, Maros, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Enrekang, Toraja dan Luwu Utara. Unsur dari provinsi terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Dinas Perkimtan, Dinas SDA Cipta Karya, tim PPSP, dan tim Pamsimas. Sementara unsur dari kabupaten dari Bappeda dan Dinas Kesehatan.

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar



Pendidikan memegang peranan penting untuk mengakhiri kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Untuk itu, menyediakan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua anak menjadi hal penting. Berdasarkan data hasil penjangkauan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar, pada Januari 2018, di 18 Kelurahan dari 4 Kecamatan (**Tamalate**: Balang Baru, Barombong, Maccini Sombala, Mangasa, Pa'baeng-baeng, Parang Tambung. **Tallo**: Lembo, Tallo, Pannampu, Bunga Ejaya, Kaluku Bodoa. **Panakkukang**: Pampang, Karuwisi, Panaikang, Tamamaung. dan **Biringkanayya**:

Paccerakkang, Sudiang, dan Sudiang Raya), terdapat 57 anak yang usia sekolah tapi belum sekolah dan 323 anak putus sekolah. Dalam upaya membangun komitmen mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi anak rentan dan putus sekolah, Unicef bersama Yayasan BaKTI dan Pemerintah Kota Makassar melaksanakan pertemuan koordinasi dan monitoring lintas sektor. Pertemuan berlangsung pada tanggal 28 Mei 2018, yang dihadiri oleh 34 peserta (15 laki-laki dan 19 perempuan). Tujuan pertemuan untuk mendiskusikan strategi dan kebijakan tentang layanan pendidikan bagi anak putus sekolah yang berasal dari keluarga rentan dan anak berkonflik dengan hukum.

Revisi dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Makassa dan Gowa

Program Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah terbentuk sejak tahun 2016 lalu. Sebagai pedoman pelaksanaan dan panduan dalam pelaksanaan penerimaan laporan dan rekomendasi, PKSAI di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah menyusun dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP). Melalui proses yang telah berjalan selama setahun lebih, SOP ini mendapat masukan dan rekomendasi untuk penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Unicef melalui Yayasan BaKTI bersama Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa melakukan revisi SOP. Tim yang terlibat terdiri dari unsur pemerintah, Pekerja Sosial, pengelola PKSAI dan LSM Pemerhati Anak yang ada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Pada tanggal 17 April 2018, tim revisi dari Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bersama-sama memberikan masukan terhadap SOP ini. Beberapa masukan antara lain pada kerangka pengintegrasian dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, Kondisi ideal PKSAI, struktur organisasi, fokus layanan PKSAI pada penanganan kesejahteraan anak berbasis system, pedoman manajemen integratif pengawasan, pengaduan dan evaluasi. SOP PKSAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah direvisi dan diperbaharui berdasarkan masukan dan pengalaman implementasi PKSAI selama 1 tahun lebih (September 2016- April 2018).

Revisi Buku Panduan dan Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH)

Buku Panduan dan Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) berbasis masyarakat telah disusun atas dukungan Unicef melalui Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak terkait lainnya. Dari hasil uji coba pendampingan reintegrasi AKH, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi penyempurnaan buku saku. Unicef melalui Yayasan BaKTI telah mendukung revisi buku dengan melibatkan tim revisi dan stakeholder lainnya untuk memberikan masukan dan saran penyempurnaan buku saku dan buku panduan.

Penyusunan Draft Modul Manajemen Konflik Bagi Pekerja Sosial

Dalam melakukan pendampingan kasus, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) membutuhkan sumberdaya manusia yang handal karena beragam tantangan yang ditemui ketika sedang mendampingi anak, keluarga dan masyarakat. Misalnya konflik yang timbul antar pihak korban dengan pelaku. Atau berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, maka sakti peksos atau tenaga *frontline* PKSAI harus memiliki kesadaran akan pentingnya antisipasi dan pencegahan terhadap konflik.



Modul mengelola/manajemen konflik penting disusun sebagai acuan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat. Modul ini merupakan dukungan Unicef melalui Yayasan BaKTI bersama Tim Penyusun dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekerja sosial terkait mengelola konflik dalam proses layanan perlindungan kesejahteraan anak secara integratif. Modul ini merupakan modul pertama, sehingga masih dimungkinkan adanya perbaikan-perbaikan setelah uji coba dan praktek pendampingan. Diharapkan draft modul ini juga dapat menjadi panduan yang dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam menghadapi berbagai situasi konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Diseminasi Buku Panduan dan Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum



Pada tanggal 24 Juli 2018, UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan diseminasi buku panduan dan buku saku reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum. Buku Panduan dan Buku Saku Reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum (AKH) berbasis masyarakat yang telah disusun diharapkan memberikan gambaran dan menjadi acuan bagi masyarakat untuk melaksanakan proses reintegrasi sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Buku panduan dan buku saku ini telah direvisi berdasarkan masukan dan rekomendasi hasil pendampingan reintegrasi Anak Berkonflik dengan Hukum

(AKH) di tingkat masyarakat. Pendampingan tahap I tahun 2017, jumlah anak yang didampingi sebanyak 5 orang dan tahap II, 2018, sebanyak 10 orang.

Kegiatan ini dihadiri oleh 83 orang, peserta berasal dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappeda, Lapas, Bapas, Dinas terkait lainnya, tokoh masyarakat atau tokoh pemuda dari beberapa kelurahan di Makassar dan Desa/kelurahan di Gowa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada isu anak yang berada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Sasaran dari buku saku ini adalah masyarakat. Buku Panduan dan Buku Saku reintegrasi AKH berbasis masyarakat dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan upaya konkrit mempersiapkan anak untuk kembali ke keluarga dan masyarakatnya.

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor PKSAI Kabupaten Gowa Tahap III

Saat ini terdapat 1.540 anak rentan dari data hasil penjangkauan yang dilakukan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kabupaten Gowa pada tahun 2017 yang membutuhkan penanganan serius dan terintegrasi. Jenis data kasus hasil penjangkauan adalah sebagai berikut; Akte kelahiran (386 anak), belum sekolah diusia sekolah (108 anak), putus sekolah (364 anak), sakit kronis (54 anak), disabilitas (127 anak), belum memiliki KIS (452 anak), terpapar Napza (30 anak) dan Miras (19 anak). Data hasil penjangkauan ini telah ditindaklanjuti oleh Tim PKSAI Gowa dan OPD terkait lainnya, tetapi kasus anak yang ditelaah dijangkau ini belum tertangani secara tuntas.

Untuk mendapatkan informasi sejauh mana respon dan dukungan dari berbagai pihak terkait data di atas, UNICEF bersama Yayasan BaKTI dan Pemerintah Kabupaten Gowa melaksanakan Pertemuan Koordinasi dan Monitoring Lintas Sektor tahap 3. Pertemuan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Pendidikan, PMD, Dukcapil, RSUD, Dinas terkait lainnya dan Lembaga Pemerhati Anak kabupaten Gowa.

Pertemuan ini mendiskusikan strategi dan kebijakan tentang layanan bagi anak rentan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, akta kelahiran, rehabilitasi dan lainnya. Peserta mendiskusikan integrasi alur penanganan data kasus anak hasil penjangkauan. Data hasil penjangkauan yang didiskusikan antara lain, data anak disabilitas, sakit kronis, terpapar napza, korban kekerasan seksual dan anak yang bermasalah dokumen kependudukan atau akta kelahiran.

Pelatihan Pencatatan Kelahiran Online untuk Anak yang Baru Lahir di Kota Makassar

Dalam upaya mendukung pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan cakupan akte kelahiran, khususnya bagi anak yang baru lahir, maka Unicef melalui kerja sama dengan Yayasan BaKTI melaksanakan **Pelatihan Pencatatan Kelahiran Online melalui Aplikasi Mobile di Kota Makassar**. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali kemampuan teknis bagi staf rumah sakit daerah, rumah sakit ibu dan anak (RSIA), dan puskesmas agar dapat langsung mencatat kelahiran anak yang baru lahir melalui aplikasi online-baik melalui android maupun website, sehingga mempercepat penerbitan akte kelahiran.

Pelatihan pencatatan kelahiran anak yang baru lahir di Makassar, berlangsung pada tanggal 7-8 Agustus 2018 di Hotel Best Western Makassar dan telah memfasilitasi 56 peserta (21 Laki-laki, 35 perempuan) menggunakan aplikasi online Kucata'Ki untuk mencatat atau melaporkan data kelahiran anak yang baru lahir langsung ke dalam platform Dukcapil Makassar, <http://www.dukcapil-makassar.id> baik melalui android dan website. Mereka

adalah petugas/staf penanggungjawab pencatatan kelahiran yang berasal dari 10 Puskesmas Perawatan, 11 RSIA, dan 6 Rumah Sakit Daerah dan Swasta di Kota Makassar.



Pertemuan Koordinasi Petugas Frontline PKSAI Kabupaten Gowa Tahap III

Untuk memperkuat mekanisme kerjasama PKSAI- Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif disemua level, Pemerintah Kabupaten Gowa didukung oleh UNICEF bersama Yayasan BaKTI telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi *Frontliner* PKSAI tahap III pada tanggal 27-28 Agustus 2018. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi PKSAI di tingkat kecamatan, memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial dan para pihak ditingkat kecamatan sehingga mengetahui alur pengaduan jika menemukan anak yang menghadapi masalah.

Melalui kegiatan ini teridentifikasi potensi sumber daya yang ada di kecamatan. Terdapat beberapa organisasi dan potensi sumberdaya manusia yang dapat membantu menyebarkan informasi terkait PKSAI dan mendeteksi dini anak-anak yang beresiko dan rentan yang ada di tingkat kecamatan. Tersusun rencana tindak lanjut dan strategi penyebaran informasi tentang PKSAI di tingkat kelurahan/desa dari masing-masing kecamatan.

Pertemuan Teknis Pencatatan, Pengumpulan Data Kelahiran dan Penerbitan Akte Kelahiran di Daerah Terjauh di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

Guna mendukung percepatan pemberian akte kelahiran kepada anak rentan di wilayah yang sulit dijangkau di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, UNICEF melalui Yayasan BaKTI melaksanakan program penerbitan akte kelahiran yang terdiri dari tiga komponen kegiatan integral yang dilaksanakan secara sekuensial yakni: Pertemuan Teknis Pencatatan dan Pengumpulan Data Kelahiran Anak Rentan, Pengumpulan Data Kelahiran Anak Rentan, serta pencetakan akta kelahiran.

Secara umum output yang diharapkan kegiatan sekuens 1 tersebut di atas yakni terbangunnya mekanisme kerjasama yang berkelanjutan antara Dinas Dukcapil dengan organisasi atau lembaga di tingkat kelurahan yang bermitra dengan Dukcapil Kota Makassar dalam mempercepat pemberian akte kelahiran bagi anak yang rentan dari jangkauan

pencatatan kelahiran dan administrasi kependudukan karena berada di wilayah yang jauh atau terisolir.



Pertemuan teknis pencatatan kelahiran anak yang rentan tanpa akte kelahiran dan tidak terdaftar dalam administrasi kependudukan tersebut dilaksanakan di Makassar, 29 Agustus untuk Makassar dan 30 Agustus untuk Gowa. Diikuti oleh 24 peserta dari 21 kelurahan di empat kecamatan di Kota Makassar. Dari kabupaten Gowa sejumlah 24 orang yang berasal dari Penyuluh Lapangan Dinas KB sebagai jejaring Disdukcapil Gowa di tingkat desa/kelurahan yang terjauh. Segenap peserta sepakat untuk menjadi mitra Dukcapil untuk pencatatan kelahiran dan bersedia untuk terus melanjutkan kerjasamanya di masa yang akan datang. Terbangun pola relasi dan kemitraan antara Dinas Dukcapil dengan pemerintah kelurahan yang menjamin keberlanjutan pemberian layanan pencatatan/pelaporan kelahiran dari wilayah-wilayah yang terisolir (pulau, pemukiman urban dan daerah perbatasan) di Makassar, khususnya di empat kecamatan sasaran yakni Kec. Tallo, Mariso, Biringkanaya, dan Tamalate. Dan 5 kecamatan daratan tinggi di Kabupaten Gowa. Tersusun rencana penjangkauan, pengumpulan data kelahiran, verifikasi data dan pencetakan akte kelahiran yang disepakati bersama segenap peserta dan Dinas Dukcapil, yang akan dilaksanakan dalam bulan September .

Pertemuan Koordinasi Petugas *Frontline* PKSAI Kota Makassar Tahap III

Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar ditujukan untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan anak dalam situasi rentan dan beresiko dengan memadukan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya dalam satu sistem sehingga dapat memberikan layanan yang komprehensif, cepat, tepat, dan tuntas.

Untuk memperkuat mekanisme kerjasama PKSAI di semua level, Pemerintah Kota Makassar didukung oleh UNICEF bersama Yayasan BaKTI telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi Frontliner PKSAI tahap III pada tanggal 3 dan 10 September 2018. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi PKSAI di tingkat kecamatan, memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial dan para pihak ditingkat kecamatan sehingga mengetahui alur pengaduan jika menemukan anak yang menghadapi masalah.



Pertemuan koordinasi petugas frontline PKSAI Kota Makassar tahap III, diselenggarakan selama 2 kali. Tahap I diikuti oleh 42 peserta dari 8 kecamatan. Tahap II diikuti oleh 7 kecamatan terdiri 42 orang. Unsur peserta terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Ketua PKK Kecamatan, Ketua KUA, dan Majelis taklim.

Pelatihan Uji Modul Manajemen/Mengelola Konflik Bagi Pekerja Sosial

Draft modul manajemen konflik telah disusun sebagai acuan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat. Penyusunan draft modul ini merupakan dukungan UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama Tim Penyusun. Tujuan penyusunan draft modul ini menjadi acuan dan bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pekerja sosial terkait mengelola konflik dalam proses layanan perlindungan kesejahteraan anak secara integratif. Untuk menguji coba draft modul ini, UNICEF bersama Yayasan BaKTI telah mengadakan pelatihan manajemen/mengelola konflik bagi Pengelola Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kota Makassar dan Kabupaten Gowa pada tanggal 13-14 September 2018. Penguatan ini difokuskan pada para pekerja sosial yang mendampingi langsung anak dan keluarga di tingkat masyarakat. Diharapkan draft modul ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pelatihan bagi para pekerja sosial untuk peningkatan keterampilannya dalam menghadapi konflik yang sering dihadapi dalam pekerjaannya. Pelatihan uji coba modul ini diikuti oleh 23 orang peserta.

Workshop Pendayagunaan Dana ZISWAF untuk Pembangunan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk penyediaan layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat khususnya warga yang tidak mampu. Bentuk kesepahaman tersebut dituangkan dalam fatwa MUI nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat.



Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, sejumlah kabupaten /kota di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan mengembangkan program pengadaan air dan sanitasi yang didanai dengan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola.

Sebagai upaya membuka ruang untuk berbagi pandangan, pengalaman, praktik-praktik baik serta membahas berbagai isu terkait peluang dan tantangan pendayagunaan dana ZISWAF sesuai fatwa MUI di atas, maka UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Tim Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Sulawesi Selatan melaksanakan Workshop Pendayagunaan Dana ZISWAF untuk Pembangunan Akses Air Bersih dan Sanitasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 September di Makassar, diikuti oleh 31 peserta dari unsur pimpinan Baznas dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Bappeda Provinsi, Lembaga Amil Zakat independen (Dompet Duafa, Rumah Zakat, Inisiatif Zakat Indonesia) serta beberapa lembaga mitra Tim Pokja AMPL Provinsi Sulsel.

Hasil yang dicapai antara lain: 1. Komisioner Baznas dari 17 kabupaten/kota bertukar pengalaman dan praktik-praktik baik pemanfaatan dana ZISWAF dalam program bantuan akses air bersih dan sanitasi untuk masyarakat tidak mampu dari 8 asnaf penerima zakat (mustahik). 2. Teridentifikasi sejumlah program pendayagunaan dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh sejumlah komisioner Baznas dan menjadi praktik baik untuk direplikasi oleh peserta workshop. 3. Segenap komisioner Baznas dari kabupaten/kota dan provinsi, LAZ independen, Bappeda Provinsi, Unicef, PPSP, dan USDP sepakat untuk melaksanakan aksi tindak lanjut antara lain pelibatan Baznas kabupaten/kota ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akses air bersih dan sanitasi bersama dengan Tim Pokja AMPL kabupaten/kota.

Diharapkan lewat workshop berbagi pengalaman ini dapat mendukung berkembangnya inisiatif pendayagunaan dana ZISWAF untuk kelompok-kelompok mustahik, yang juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian target RPJMN 2015-2019 yakni akses air minum layak 100%, 0% kawasan kumuh, dan akses sanitasi layak 100% (yang dikenal dengan istilah Akses Universal 100-0-100) pada akhir tahun 2019.

Pencetakan dan Penyerahan Akta Kelahiran Anak Rentan di Daerah Terjauh di Kab. Gowa dan Kota Makassar

Peningkatan cakupan akte kelahiran di Gowa dalam tahun 2018 mencapai 92.84 % dan Makassar 90,02%. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi karena telah melampaui target RPJMN 2015-2019 yakni 85% pada tahun 2019. Keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gowa dan Kota Makassar membangun kemitraan dengan para pihak dalam mengelola pelayanan langsung bagi warga telah menjadi pemicu utama meningkatnya layanan percepatan pemberian akte kelahiran di dua daerah tersebut.



Guna mendukung percepatan pemberian akte kelahiran kepada anak rentan di wilayah terjauh di Gowa, dan mendukung percepatan pemberian akte kelahiran kepada anak rentan di wilayah yang sulit dijangkau di Kota Makassar. UNICEF melalui Yayasan BaKTI melaksanakan program Pencetakan dan Penyerahan Akta Kelahiran Anak Rentan di Daerah Terjauh di Kabupaten Gowa pada tanggal 12 Oktober 2018 dan Kota Makassar pada tanggal 30 Oktober 2018.

Hasil yang dicapai, Dinas Dukcapil Gowa telah mencetak dan menyerahkan lebih kurang 700 Akta Kelahiran dari data kelahiran yang dilaporkan oleh Tim AK KB di 13 desa dan 2 kelurahan yang tersebar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Tombolo Pao, Bonto Lempangan, dan Biring Bulu.

Untuk Kota Makassar telah mencetak dan menyerahkan lebih kurang 520 Akta Kelahiran dari data kelahiran yang dilaporkan oleh Tim Pendata Akta Kelahiran di 21 Kelurahan yang ada di 4 kecamatan yakni Kecamatan Tallo, Biringkanaya, Mariso, dan Tamalate.

Pertemuan Koordinasi Petugas Frontline PKSAI - Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Gowa dan Kota Makassar Tahap 4

Untuk memperkuat mekanisme koordinasi kerjasama dalam memberikan layanan, rujukan dan menyiapkan strategi keberlanjutan PKSAI, UNICEF bersama Yayasan BaKTI, Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi Frontliner PKSAI tahap 4. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan diskusi alur rujukan berdasarkan SOP PKSAI, identifikasi mekanisme kerjasama, koordinasi dan strategi keberlanjutan. PKSAI Kabupaten Gowa dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018, diikuti

oleh 35 peserta sedangkan Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018, peserta yang hadir sebanyak 32 orang.



Pertemuan ini beragendakan rencana Strategis Keberlanjutan PKSAI Kabupaten Gowa dan kota Makassar, mekanisme kerjasama dan koordinasi penanganan rujukan, membahas lampiran SOP PKSAI (*flow chart* layanan, simulasi cara melaporkan kasus anak melalui *call center* telepon nomor 1500-771 (Telepon Pelayanan Sosial Anak/ TePSA), mengisi format pengaduan kasus anak rentan dan beresiko.

Pelatihan Pemanfaatan *U-Report* Sistem sebagai lanjutan kegiatan Pertemuan Koordinasi Petugas Frontline PKSAI Kabupaten Gowa dan Kota Makassar Tahap 4.

Sulawesi Selatan sebagai provinsi terdekat juga menjadi tempat penduduk untuk mengungsi. Sampai akhir Oktober, Sekretariat Bersama Perlindungan Anak mencatat kurang lebih 3.889 penduduk mengungsi ke beberapa wilayah di Sulawesi Selatan termasuk Makasar, Gowa, Takalar, Luwu Utara, Pangkep, Toraja Utara, Bulukumba, Soppeng dan Sinjai. Angka ini bisa berubah, karena adanya pergerakan kembali ke Palu atau belum dilaporkan/tercatat.

Sebagai upaya untuk memberikan respon pada anak-anak penyintas, UNICEF sudah mengembangkan sistem *U-Report* atau sistem jajak pendapat dengan menggunakan media sosial sebagai *platform*, di mana anak-anak dapat menyuarakan aspirasi, opini, dan idenya dalam isu-isu yang mempengaruhi kehidupannya. *U-Report* akan diadaptasi agar dapat memberikan gambaran masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak penyintas khususnya dan anak-anak lain secara umum. Data dari *U-Report* akan dapat digunakan sebagai dasar pemberian layanan dan pembuatan program kerja PKSAI.

Untuk mengembangkan sistem pendataan dengan menggunakan *U-Report* UNICEF dan Yayasan BaKTI telah memperkuat pengetahuan dan kemampuan para pihak terkait cara memanfaatkan sistem *U-report*. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari Pertemuan Koordinasi Frontliner PKSAI Kota Makassar dan Gowa tahap 4. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan dan pelatihan bagi frontliner untuk menggunakan *U-Report* dan juga mengetahui cara menganalisa dan memilah data anak rentan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 7 November 2018, yang diikuti oleh peserta sejumlah 78 orang

AMPL Award Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Pokja AMPL Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting mendorong kabupaten/kota mencapai target Akses Universal. Peran-peran tersebut antara lain fasilitasi, advokasi, supervisi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi. Optimalisasi peran-peran tersebut akan sangat membantu pemerintah kabupaten/kota mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan sanitasi yang telah disusun secara nasional, provinsi maupun daerah.

Saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi yang didukung oleh UNICEF melalui Yayasan BaKTI serta berbagai pihak yang terlibat dalam program pembangunan AMPL memfasilitasi penganugerahan Saoraja AMPL tahun 2018 kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, swasta, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tokoh inspirator bidang sanitasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan sinergitas pembangunan air minum, pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan penanganan kawasan kumuh di seluruh daerah di Sulawesi Selatan.



Penyerahan anugerah Saoraja AMPL Award Sulsel 2018 berlangsung di Hotel Claro Makassar pada tanggal 14 November 2018. Dihadiri oleh 236 peserta dari tingkat nasional, provinsi, dan Tim Pokja AMPL 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Sejumlah tamu hadir antara lain dari Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Ibu Tri Dewi Virgiyanti; UNICEF Indonesia, Ann Thomas, Chief of WASH; Tim Manager USDP (Urban Sanitation Development Program), Mees Van Krimpen; Bapak Dr. Ashari Fakhshir Radjamilo, M.Si, Sekda Provinsi Sulsel. Sementara dari kabupaten/kota turut hadir sejumlah Bupati/Wakil Bupati, Walikota, Sekda, dan pimpinan OPD, Tim Pokja kabupaten/kota.

Pertemuan Monitoring dan Evaluasi PKSAI Kota Makassar dan Kabupaten Gowa melalui scorecard 6 komponen Layanan

UNICEF melalui Yayasan BaKTI melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang berasal dari dinas dan instansi terkait yang dilaksanakan di Makassar 23-26 November 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang telah berjalan selama 2 tahun lebih. Sejak tahun 2016, UNICEF melalui Kementerian Sosial dan Yayasan BaKTI, mendukung pemodelan layanan

kesejahteraan sosial anak dan keluarga terpadu, yang mengintegrasikan program dan layanan untuk anak-anak dan keluarga yang rentan (anak-anak yang beresiko atau terpapar kekerasan, eksploitasi, pelecehan, pengabaian, pelembagaan, dan lain-lain).

Monitoring dan evaluasi PKSAI diukur dengan menggunakan alat monitoring scorecard 6 komponen layanan dan Most Significant Changes (MSC). Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Kota Makassar sebanyak 20 orang dan dari Kabupaten Gowa sebanyak 15 orang.

Diseminasi Hasil Kajian *Financial Benchmarking* Perlindungan Anak dan Hasil Kajian Pembiayaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)

UNICEF bersama Yayasan BaKTI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan Diseminasi Hasil Study *Financial Benchmarking* Perlindungan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, penganggaran dan Issue Brief dalam pertemuan seri advokasi, juga diseminasi hasil study *costing/pembiayaan* Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) pada tanggal 6 Desember 2018.



Pertemuan ini diikuti oleh 44 orang yang berasal dari instansi terkait (Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Media, P2TP2A dan Tim PKSAI). Peserta berasal dari Provinsi Sulsel, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Gowa.

Wokshop *Scaling Up* Inisiatif Pencatatan Kelahiran Provinsi Sulsel

Workshop *Scaling Up* Inisiatif Pencatatan Kelahiran Provinsi Sulsel salah satu kegiatan UNICEF melalui BaKTI yang mendukung Pemerintah Provinsi memfasilitasi diseminasi program inovatif dan kreatif di bidang penjangkauan, pencatatan/pelaporan kelahiran bagi anak yang berkeadilan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Sulsel. Praktik pelaporan kelahiran anak yang baru lahir secara online di Makassar dan praktik pelaporan kelahiran melalui kemitraan partisipatif di Gowa adalah bentuk inovasi yang perlu disebarluaskan guna memicu lahirnya praktik-praktik inovatif lainnya di daerah lain.

Hasil dari praktik-praktik inovatif itu mengantarkan cakupan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa mencapai 92.56% dalam bulan November 2018 dan Kabupaten Gowa mencapai 94,05 % melebihi target nasional yaitu 85% di tahun 2019.



Prestasi ini ditorehkan Dinas Dukcapil atas usaha dalam mengembangkan berbagai inisiatif dalam penjangkauan dan pencatatan kelahiran di mana pun anak berada. Inisiatif-inisiatif yang dikembangkan kemudian diidentifikasi sebagai praktik kontekstual dan aplikabel untuk didiseminasikan di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2018. Diikuti oleh 23 peserta. Kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran praktik baik dan pengalaman stakeholder di kabupaten/kota dalam hal penanganan berbagai tantangan dan strategi pencatatan kelahiran yang berkeadilan bagi anak di seluruh pelosok daerah.

Program MAMPU

Berikut adalah highlight Program MAMPU periode Januari - Maret



Mentoring dan *Technical Assistance* (TA) ke Mitra Daerah, tujuannya adalah untuk memberikan asistensi kepada mitra daerah terkait dengan program MAMPU tahun 2018 di Ambon, Kendari dan Lombok Timur Tana Toraja dan Parepare

- Mentoring dan *Technical Assistance* (TA) ke Mitra Daerah, tujuan untuk memberikan asistensi kepada mitra daerah terkait dengan program di Tana Toraja dan Parepare
- Proses dokumentasi film reses partisipatif di Parepare dan Maros pada tanggal 25 Februari lalu. Kegiatan ini bermaksud untuk mendokumentasikan gambar yang terkait proses reses partisipatif yang dilakukan anggota DPRD di Parepare dan Maros. Proses ini dilakukan dengan mewawancarai anggota DPRD yang melaksanakan reses dan perwakilan kelompok konstituen.
- Pembahasan draft Mou SPPT-SPPKTP Sultra di Kota Kendari dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, LBH-Kendari, Kejaksaan, Kepolisian, Universitas, Pengadilan dan LSM Lokal.

- Audit Partisipatif di Kendari tanggal 19 sd 23 Maret 2018 dan Parepare tanggal 25 sd 29 Maret 2018, kedua kota ini dipilih oleh COWATER.
- Pembahasan awal Ranperda PPA di Kabupaten Maros bersama DPRD dan SKPD terkait, tanggal 13 Maret. Pertemuan ini membahas pentingnya Naskah Akademik dan memberi kesempatan seluruh stakeholder yang hadir untuk memberikan masukan terhadap *draft* Ranperda PUG. Pasca kegiatan ini, tim pansus akan melaksanakan studi banding ke DPRD Kota Surabaya. Rapat ini difasilitasi oleh Prof. Syahrudin.
- Pembahasan final MoU Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-SPPKTP) Sultra dilaksanakan di Same Hotel Makassar pada tanggal 14 Maret lalu dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kehakiman, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi Agama serta Akademisi dan Lembaga Bantuan Hukum Kendari.



Pada tanggal 24 Maret, BaKTI bersama jaringan NGO di Makassar memperingati Hari Perempuan Internasional di Benteng Rotterdam. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yakni *talkshow*, diskusi film dan bazaar. Tema besar kegiatan ini adalah Bersinergi Mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Talkshow menghadirkan narasumber Lusya Palulungan, Program Manajer Program MAMPU-BaKTI, Meisy Papayungan, Kepala UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Provinsi Sulawesi Selatan, dan Andi Sri Wulandani, Masika (Majelis Sinergi Kalam) ICMI Makassar. Pada kesempatan ini pula, Deklarasi Dukungan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual oleh perwakilan lembaga dan komunitas mitra. Kemudian dilanjutkan dengan Diskusi dan Pemutaran film *Posesif*. Sebuah film yang menceritakan bagaimana kekerasan diproduksi dan direproduksi. Diskusi menghadirkan Iyan Afriyani, seorang psikolog, Sartika Nasmar, aktivis dari lembaga Samsara, dan Fajar Waksi dari Aliansi Remaja Independen Sulawesi Selatan.



Tanggal 26 sd 28 April 2018 diselenggarakan diskusi kegiatan Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kendari, tujuannya untuk mendorong perencanaan yang responsif gender.

Tanggal 9 Mei diselenggarakan diskusi dengan AJI untuk persiapan pelatihan Jurnalis yang berperspektif gender yang rencananya akan dilakukan di Parepare dan Makassar.

- Penandatanganan MoU SPPT-PKKT Prov Sultra, Tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum dan penanganan hukum bagi korban kekerasan di Provinsi Sultra.
- Konsultasi Publik SDGs di Kota Parepare, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pengisian Matriks RAD SDGs Kota Parepare
- Sosialisasi SDGs untuk Pemerintah dan Non Pemerintah terkait dengan Penyusunan Matriks SDGs Kota Kendari
- Konsultasi Publik SDGs di Kota Kendari, bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pengisian Matriks RAD SDGs Kota Kendari
- Kunjungan Anggota Parlemen Australia ke wilayah Program MAMPU-BaKTI. Tujuannya untuk melihat secara langsung pencapaian program MAMPU di wilayah Maros terutama terkait dengan Pemerintah dan DPRD.
- BaKTI menghadiri undangan dari MAMPU untuk ikut dalam kegiatan Dialog SDGs Program MAMPU di Jakarta, Tujuannya untuk mendapatkan masukan apa-apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan SDGs di wilayah MAMPU.
- Inspirasi BaKTI tentang Buku memperkuat Perempuan Untuk Keadilan dan Kesetaraan, Tujuannya untuk mengsosialisasikan buku yang sudah dihasilkan oleh program MAMPU-BaKTI
- Scooping Mission Tematik Perlindungan Sosial, Tujuan untuk mendapatkan masukan apa-apa saja perlindungan sosial yang sudah dilaksanakan oleh Sub-Mitra Yayasan BaKTI terkait dengan Perlindungan Sosial khususnya untuk lansia.
- Kunjungan Wakil Duta Besar Australia (Mr. Allaster Cox) ke Yayasan BaKTI, Tujuannya untuk mendengarkan Pencapaian Program MAMPU Yayasan BaKTI
- PPRG bagi SKPD Tana Toraja, Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas SKPD dalam menyusun anggaran yang responsif gender.





Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pembedayaan Perempuan) yang bergabung dalam Koalisi Stop Perkawinan Anak, melaksanakan Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) 2018 di Kabupaten Maros dan Tana Toraja. di Kabupaten Maros, kampanye dalam bentuk Temu Remaja Sulawesi Selatan di Gedung Serba Guna Kabupaten Maros, 26 November lalu dan di Tana Toraja kampanye ke beberapa sekolah SLTP dan SLTA yang dilaksanakan 3 Desember 2018. Kegiatan ini bertujuan ini untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan melihat bagaimana respon anak mengenai perkawinan anak.



Pada pelaksanaan kampanye di Kabupaten Maros, selain melibatkan perwakilan anak dari Kabupaten Maros juga melibatkan perwakilan anak dari Kabupaten Pangkep, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar. Selain anak yang merupakan peserta utama untuk Temu Remaja Sulawesi Selatan, kegiatan ini juga dihadiri oleh instansi pemerintah dan lembaga/organisasi non pemerintah. Begitupun di Tana Toraja, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tana Toraja serta pihak sekolah yang terlibat.

Peringatan HAKtP 2018 di Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh gabungan berbagai organisasi yang bergabung di Koalisi Stop Perkawinan Anak yang berlangsung selama 16 hari mulai 25 November hingga 10 Desember. Dalam rentang waktu 16 hari tersebut dilaksanakan berbagai kegiatan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Tema peringatan HAKtP tahun 2018 “Gerak Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak” dengan mengkampanyekan “Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak.”

Selain itu, berikut ini beberapa highlight program MAMPU BaKTI lainnya:

- Pertemuan Nasional SPPT-PKKTP di Batam, Tujuannya berbagi pengalaman dalam implementasi SPPT-PKKTP di 5 Provinsi (DKI, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah)
- Replikasi Reses Partisipatif di Bengkulu, Tujuannya untuk memperkenalkan Reses Partisipatif kepada Anggota DPRD Bengkulu
- Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kota Kendari untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Menyusun Anggaran yang responsif gender
- Inspirasi BaKTI, dengan tujuan untuk memperkenalkan buku pedoman jurnalis yang perspektif perempuan dan anak.
- Pelatihan Paralegal di Tana Toraja tujuan untuk melatih komunitas terkait dengan pendampingan korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.
- *Mentoring dan Technical Assistance* Ke SKPD untuk advokasi kebijakan terkait dengan Dana Desa untuk negeri (desa) di Kota Ambon.

Sub Office BaKTI

(Kabupaten Lombok Timur)

- *Mentoring Technical Assistance* (TA) kepada Kelompok konstituen di Lombok Timur, yang dilaksanakan 26 Januari lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis – jenis kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan/anak dan cara penanganannya, dan juga mengidentifikasi calon paralegal yang ada di kelompok Konstituen Kelurahan Tanjung.
- Diskusi forum media di Kabupaten Lombok Timur tanggal 26 Januari lalu. Dalam diskusi ini membahas tentang perubahan pola pikir serta sudut pandang dalam penulisan berita (setelah dilakukan pelatihan jurnalis) sehingga lebih sensitif gender dan lebih berimbang. Juga untuk mengurai kendala yang ditemui para jurnalis khususnya media harian terkait dengan tuntutan berita yang harus “fresh” sehingga seringkali pemberitaan suatu kasus tidak bisa secara tuntas.



- Kunjungan DFAT ke Lombok Timur tanggal 25 Februari. Kegiatan ini mendiskusikan :
 1. Penguatan kelompok Konstituen dalam melakukan advokasi dana desa, terlibatnya perempuan dalam kegiatan di desa serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pada musyawarah desa

2. Penerapan Metode Reses Partisipatif oleh anggota legislative baik APP (Anggota Parlemen Perempuan) maupun APL (Anggota Parlemen Laki-laki). Beberapa usulan dalam reses tersebut telah terealisasi, seperti bantuan mesin yang diberikan oleh Ketua DPRD
3. Keterlibatan KK dalam penanganan kasus baik KtA dan KtP. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya angka aduan dan proses layanan ke P2TP2A oleh KK.
4. Dihasilkannya Peraturan Daerah bidang Pendidikan Tentang Mata Pelajaran Muatan Lokal, dimana didalamnya termuat tentang Gender. Sebelumnya peraturan ini mengalami hambatan dan telah disusun dalam waktu yang cukup lama. Namun melalui program MAMPU, BaKTI berjejaring dengan NGO lainnya dan mengawal Perda tersebut hingga dapat di sahkan pada tanggal 5 Desember 2017.



Peringatan International Woman's Day di Kabupaten Lombok Timur tanggal 10 dan 19 Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik perkawinan anak adalah satu bentuk kekerasan dan merupakan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak. Juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan P2TP2A sebagai pusat rujukan bagi korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak di kabupaten Lombok Timur.

- Pelatihan penyusunan peraturan desa dan penyusunan draft Peraturan Desa Kembang Kerang (kab. Lombok Timur) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 15 - 16 Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta akan pentingnya perlindungan bagi korban KtP/A di Desa/tingkat komunitas. Selain itu agar draft Raperdes tentang perlindungan perempuan dan anak di Desa Kembang Kerang dapat tersusun.
- Pelatihan Paralegal, tujuannya untuk menguatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat memberikan pendampingan bagi korban kekerasan
- Pendataan Korban Gempa di Lombok Timur, Tujuan untuk menyusun Proposal Intervensi Rehab dan rekon akibat Gempa di Pulau Lombok
- Penyusunan Renstra Desa Kembang Kerang, tujuannya agar Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak yang sudah disusun dapat diimplementasikan ke dalam Renstra Desa.
- Finalisasi dan pengesahan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Desa Kembang Kerang diselenggarakan pada tanggal 13 April 2018. Hasilnya berupa draf final Ranperdes tentang perlindungan perempuan dan anak yang sudah disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
- Mini Workshop Penyusunan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Bagi Pengelola P2TP2A" di Kabupaten Lombok Timur tanggal 2-3 Mei 2018. Hasilnya adanya dokumen GAP (*Gender Analysis Pathway*) GBS (*Gender Budget Statement*) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja) responsif gender untuk penyusunan anggaran P2TP2A di Lombok Timur.
- Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pendamping-Paralegal pada tanggal 4 Mei, untuk merumuskan agenda, bahan rujukan dan alat bantu yang diperlukan dalam pelatihan pendamping/paralegal.

- Tanggal 9 Mei diselenggarakan konsultasi publik dan pengesahan tentang Perdes Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Peraturan Desa Kembang Kerang no. 4 tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur.



- Penyusunan Renstra Desa Kembang Kerang, tujuan agar kegiatan-kegiatan untuk perempuan dan anak bisa diakomodir ke dalam Dana Desa
- *Trauma Healing* dan *Social Healing* bagi korban gempa bumi di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Timur

MITRA DAERAH

(YKS-TanaToraja, YLP2EM-Parepare, Arika Mahina-Kota Ambon, RPS-Kendari, PPSE-Belu)

- Kegiatan Pendampingan oleh Community Organizer Sub Mitra ke kelompok Konstituen, dengan tujuan memberikan pendampingan kepada kelompok konstituen dalam melaksanakan kegiatan advokasi dan pendampingan kasus.
- Pembahasan draft MoU P2TP2A di Kabupaten Belu tanggal 28 Februari
- Pembahasan SOP P2TP2A Kota Parepare dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare.
- Peringatan International Woman's Day di Kabupaten Belu tanggal 5 dan 8 Maret di Kota Ambon tanggal 19 - 31 Maret, di Kota Parepare tanggal 10 Maret 2018, Kota kendari tanggal 11 Maret dan Kabupaten Tana Toraja Tanggal 11 Maret. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Program MAMPU yang dikelola oleh Sub Mitra BaKTI dengan Pemerintah Daerah.



- Diskusi Kota Layak Anak (KLA) tanggal 9 April, Ambon. Merupakan pertemuan awal dengan untuk mendapatkan masukan terkait persiapan untuk membuat Perda KLA dan berdasarkan kondisi yang ada di Kota Ambon. Hasil diskusi tersebut diatas akan menjadi bahan untuk dinas ke depan agar bisa melakukan *assessment*.
- Pembahasan/Review Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, tanggal 28 April menghasilkan masukan tambahan dari SKPD untuk menyempurnakan draf PERBUP Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan jadwal pengesahannya.
- Pelatihan Analisa Berbasis Gender (GAP dan GBS) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kendari di Hotel Venus, 26 – 27 April 2018 dilaksanakan oleh Tim RPS, tujuannya untuk meningkatkan kapasitas OPD Kota kendari dalam menyusun RKA yang responsif gender.
- Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pendamping/Paralegal di Belu tanggal 16-17 Mei. Merumuskan tujuan dan alur pelatihan pendamping korban, agenda bahan rujukan dan alat bantu yang diperlukan dalam pelatihan.
- Pelatihan Pendamping/Paralegal di Kabupaten Belu pada tanggal 21 – 24 Mei di 15 desa, bertujuan agar para pendamping memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak. Juga agar dapat memiliki keterampilan pendampingan pada masyarakat pencari keadilan terutama dalam aspek non litigasi, bagi korban dan kelompok minoritas.



- Penyusunan RANPERBUP SOP P2TP2A di Tana Toraja, dilaksanakan pada tanggal 2 Mei, tujuan kegiatan adalah agar SOP P2TP2A yang sudah disusun mempunyai petunjuk teknis pelaksanaan.



- Pembentukan Layanan berbasis Komunitas di 15 desa/KK Kota Ambon tanggal 7 – 13 Mei. Selain membentuk LBK, kegiatan ini juga bermaksud untuk memilih calon paralegal di tiap desa/KK.
- PAR di Kota Ambon pada tanggal 12 Juni. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk refleksi dan analisis capaian dan kendala program MAMPU di Kota Ambon secara Partisipatif. PAR dilakukan bersama dengan mitra BaKTI di kota Ambon, Yayasan Arika Mahina.



- Pelatihan Paralegal untuk Kelompok Konstituen di Kota kendari dan Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan oleh RPS dengan fasilitator LBH-Kendari sedangkan di Kab. Tana Toraja dilaksanakan oleh YKS. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kelompok konstituen dalam memberikan pengetahuan tentang

penanganan korban kekerasan, 4 – 9 Juni 2018.

- Pendampingan Kepada kelompok Konstituen di wilayah Ambon, Parepare, Tana Toraja, Kendari, Belu.
- Pelatihan Paralegal dilaksanakan di wilayah Ambon, Kendari, Tana Toraja, Belu dan Parepare, Tujuan tujuannya untuk menguatkan kapasitas masyarakat lokal agar dapat memberikan pendampingan bagi korban kekerasan
- Diskusi Kampung yang dilaksanakan di Belu dan Kota Parepare. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait dengan persoalan perempuan dan anak di masing-masing wilayah.
- Advokasi Anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare dilaksanakan oleh YLP2EM, tujuannya agar ada peningkatan alokasi anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare.
- Lanjutan Diskusi Kampung di wilayah Parepare, Ambon, Kendari, Tana Toraja. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait dengan persoalan perempuan dan anak di masing-masing wilayah.
- Advokasi Legislatif kepada Anggota Parlemen Parepare terkait dengan Komitmen Anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare, Tujuannya agar ada peningkatan anggaran untuk P2TP2A Kota Parepare.
- Rapat Koordinasi terkait dengan Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan di Wilayah Kendari dan Belu. Tujuannya untuk mendapatkan masukan terkait dengan mekanisme penanganan KtP dan KtA di Kota Kendari antara Pemerintah, Paralegal dan P2TP2A serta Kelompok Konstituen.
- Pelatihan PPRG bagi SKPD di Lingkup Pemda Tana Toraja, Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas SKPD dalam menyusun anggaran yang responsif gender.
- Diskusi Kampung, dilaksanakan di Kota Ambon dengan melibatkan Kelompok Konstituen, Arika Mahina dan Pemerintah Negeri/Desa. Tujuan untuk mendiskusikan persoalan yang terjadi pada perempuan dan anak dan akses ke dana desa
- Penyusunan Narasi SDGs Kota Parepare, tujuan agar draf SDGs yang sudah disusun segera dapat diajukan ke Walikota untuk di tandatangani.
- Rapat Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Kendari, tujuannya untuk mengkoordinasikan penanganan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.
- Pendampingan Kepada kelompok Konstituen di wilayah Ambon, Parepare, Tana Toraja, Kendari, Belu.
- Penyuluhan hukum yang berhubungan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Tana Toraja, Kabupaten Belu, Parepare dan Kendari.
- Kampanye 16 HAKTP yang dilaksanakan di Tana Toraja, Parepare, Kendari. Tujuannya untuk mengkampanyekan Stop Perkawinan Anak.
- Rapat Koordinasi dengan pemerintah terkait layanan kepada korban kekerasan dilaksanakan di Tana Toraja, Parepare, Kendari.
- Advokasi Dana Desa di Kota Ambon, tujuannya untuk mendorong adanya penganggaran dana desa untuk perempuan dan anak
- Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon terkait dengan program yang sudah dilaksanakan selama tahun 2018.

- Kampanye 16 HAKTP bekerjasama dengan IAIN-Maluku, dengan tujuan untuk mengkampanyekan anti kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, serta Stop Perkawinan Anak.

Program KOMPAK - Landasan II

Pelatihan dan Pendampingan MBS (Managemen Berbasis Sekolah)

Merupakan peningkatan kapasitas kepada semua unsur satuan di sekolah-sekolah yang berada di daerah intervensi program Landasan II. Pelatihan ini bertujuan untuk membangun struktur manajemen terpadu pada tingkat Sekolah Dasar dalam peningkatan mutu sekolah, Meningkatkan pelaksanaan MBS di tingkat sekolah dengan baik dan benar serta mampu melaksanakan perencanaan penganggaran yang terintegrasi dan partisipatif dengan Kampung. Pada periode ini telah dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Kaimana, Sorong, Asmat, Nabire, Lanny Jaya.

Pelatihan TUPOKSI Aparat Kampung

Kegiatan ini merupakan upaya Program Landasan II dalam memperkuat pemahaman Pemerintahan Kampung tentang pengelolaan sistem Pemerintah Kampung, tugas pokok Aparatur Kampung dan BAMUSKAM, serta kemampuan dalam menyusun peraturan kampung sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kampung dalam mengelola pemerintahannya dan juga sebagai proteksi bagi pelaksana pemerintahan kampung itu sendiri. Selain itu kegiatan juga ,eningkatkan pemahaman yang terintegrasi tentang perencanaan dan penganggaran reguler pada tingkat kampung. Kegiatan melibatkan aparat pemerintahan kampung dan BAMUSKAM. Pada periode ini kegiatan telah dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Asmat, Jayapura, Sorong, Waropen, Nabire, Kaimana, Lannya Jaya.

Pendampingan Sistem Informasi Administrasi Kampung (SAIK)

Merupakan sebuah kegiatan pendampingan dalam penginputan data pada instrumen yang aplikatif yang diberikan kepada kader pemberdayaan kampung melalui penyusunan Profil Kampung berbasis data yang akurat. Sehingga hasil dari pengimputan data SAIK dapat berdampak kepada prioritas program kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan HIV.

Salah satu tujuan program yang didorong oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah memberikan layanan kesehatan yang prima dimana salah satunya dengan diakreditasinya Puskesmas. Diharapkan dengan Puskesmas, layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Terpadu. Program Landasan II telah membantu mendampingi untuk penyusunan PTP terpadu, diharapkan perencanaan yang dihasilkan dalam pelatihan merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pada periode ini kegiatan telah dilaksanakan di Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 24 - 26 Januari 2018 dan di Kabupaten Waropen pada tanggal 31 Jan - 2 Feb 2018. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang dilatih sebanyak 212 Orang (18 Laki-laki dan 28 Perempuan) dan telah menghasilkan 5 Dokumen PTP yang siap dilaksanakan.

Pelatihan Manajemen Puskesmas



Melalui kegiatan ini, petugas kesehatan mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya manajemen puskesmas untuk peningkatan layanan dasar kesehatan serta mengimplementasikan faktor-faktor yang menunjang manajemen puskesmas yang efektif dan efisien. Sehingga dapat membantu tercapainya akreditasi puskesmas. Pada periode ini sebanyak 26 Puskesmas telah mendapatkan pelatihan dan pesertanya menerima sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Pusat Pelatihan Kesehatan (BPPK). Sertifikat tersebut merupakan salah satu poin penilaian puskesmas untuk proses akreditasi. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 44 orang (21 Laki-laki dan 23 Perempuan).

Pelatihan Kader tentang HIV dan AIDS merupakan penguatan sistem dan keterlibatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi salah satu komponen utama program LANDASAN II, pelatihan kader ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Karena HIV dan AIDS telah meluas sampai ke masyarakat miskin di kampung-kampung yang bahkan belum mengenal dunia luar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 17 - 19 Januari 2018 dengan peserta 23 laki-laki dan 6 perempuan yang terdiri dari kader pemberdayaan masyarakat kampung.

Pada periode ini program telah memproduksi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang HIV dan AIDS untuk meningkatkan jumlah *testing* di tingkat kampung. Produk yang dihasilkan berupa poster, brosur dan buku panduan yang telah sesuai dengan konteks lokal yang akan dipergunakan dalam promosi pencegahan dan pengendalian HIV dan AIDS. Produk komunikasi tersebut telah melewati tahap ujicoba yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Jayapura dan Lanny Jaya pada tanggal 24 Januari 2018 dengan jumlah peserta 29 laki-laki dan 7 perempuan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, wartawan, aktifis HIV dan AIDS, LSM dan OPD terkait.

Semiloka pengembangan strategi pencegahan gizi buruk Kab. Asmat

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Melakukan *sharing* pengalaman dari pemerintah kabupaten dan berbagai pihak yang telah memiliki pengalaman bekerja di Asmat;
2. Membangun strategi penanggulangan gizi buruk dan kesehatan lingkungan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan secara terintegrasi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 - 20 Maret 2018 dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Asmat (Pimpinan Daerah, OPD terkait, DPRD), Pemerintah Provinsi Papua, Universitas Cenderawasih dan Pemerintah Pusat (Bappenas dan Kemendagri), Keuskupan Agats, Tokoh Adat dan NGO dengan total jumlah peserta 143 orang (110 laki-laki dan 33 perempuan) Hasil dari kegiatan ini adalah adanya strategi penanggulangan gizi buruk dan kesehatan lingkungan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan secara terintegrasi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

Pelatihan dan Pendampingan MBS (Managemen Berbasis Sekolah)

Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas kepada semua unsur satuan di sekolah-sekolah yang berada di daerah intervensi program Landasan Fase II. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun struktur manajemen terpadu pada tingkat Sekolah Dasar dalam peningkatan mutu sekolah, meningkatkan pelaksanaan MBS di tingkat sekolah dengan baik dan benar serta mampu melaksanakan perencanaan penganggaran yang terintegrasi dan partisipatif dengan kampung. Pada periode ini telah dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Kabupaten Waropen, Distrik Akat Kabupaten Asmat, dan Distrik Atsj Kabupaten Asmat.

Pelatihan dan Pendampingan SPM (Standar Pelayanan Minimum) Sekolah

Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas kepada semua unsur satuan Pendidikan di sekolah-sekolah dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan Dasar yang dapat mengidentifikasi indikator pencapaian layanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan dan mengukur kinerja sekolah untuk mengetahui pencapaian SPM. Pada periode ini telah dilaksanakan di 2 distrik yaitu Distrik Akat Kabupaten Asmat dan Distrik Atsj Kabupaten Asmat.

Penyusunan Modul Pendidikan Tahap II

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun Modul Papua Pu Pendidikan tentang Penguatan Pendidikan Karakter – PPK, Penguatan Kapasitas Pengawas dan Kepala Sekolah, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan UPTD Sekolah dan Integrasi Isu-isu Lintas Sektor dalam Pembelajaran. kegiatan menghasilkan beberapa modul yang akan dipakai dalam implementasi program, dilaksanakan di Kabupaten Sorong pada tanggal 16 - 21 April 2018 yang melibatkan 22 Orang tim penyusun modul.

Pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPK)

Badan Peduli Kesehatan (BPK) adalah wadah/wahana/media/event/mechanisme atau proses bagi para pemangku kepentingan untuk bertemu, berkomunikasi dan membicarakan serta menanggapi sesuatu sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu berperan dalam upaya peningkatan efektifitas pelayanan publik. Dan merupakan wadah masyarakat yang peduli terhadap kesehatan tingkat distrik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 – 11 April 2018 dengan dihadiri oleh elemen masyarakat tingkat Distrik, Kampung dan pusat layanan (Puskesmas). Dengan jumlah peserta 27 orang (17 Laki-laki dan 10 Perempuan).

Kaji Banding Akreditasi Puskesmas Kaimana Kota ke Puskesmas Remu Kota. Sorong

Kegiatan ini bertujuan pembelajaran pengalaman dari Puskesmas Remu Kota Sorong dalam mencapai akreditasi puskesmas “utama”. Sebanyak 24 orang petugas kesehatan puskesmas Kaimana terdiri dari 15 orang perempuan dan 9 orang laki-laki mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang proses akreditasi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Mei 2018. Tim Pendamping Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yang terlibat pada saat

kegiatan ini adalah: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Agus Irwanto Yankes Kab. Sorong, Hansen Maikel Su Kasi Sarprasarana.

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan SOP non Teknis Puskesmas Akat dan Atsj

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tindak-lanjut Puskesmas dalam melanjutkan/menyelesaikan draf SOP serta mensosialisasikan dalam lingkungan Puskesmas masing-masing. Untuk Distrik Akat dan Atsj, pendampingan dilakukan di masing-masing Puskesmas. Total jumlah peserta 11 Orang (8 Laki-Laki dan 3 Perempuan).

Pendampingan Puskesmas Makbon Dan Puskesmas Seget Menuju Akreditasi Kab. Sorong

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas Puskesmas untuk persiapan kelengkapan dokumen menuju akreditasi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Mei 2018 dengan jumlah petugas kesehatan yang terlibat 25 Orang (12 Laki-laki dan 13 Perempuan).

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RUK Puskemas di Kabupaten Asmat

Salah satu tujuan program yang didorong oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah memberikan layanan kesehatan yang prima dimana salah satunya dengan diakreditasinya Puskesmas. Diharapkan dengan terakreditasinya layanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas, layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai terakreditasinya suatu Puskesmas, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah adanya dan dilaksanakannya Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Terpadu. Program Landasan II telah membantu mendampingi untuk penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) terpadu, yang diharapkan perencanaan yang dihasilkan dalam pelatihan merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pada periode ini kegiatan telah dilaksanakan di Puskesmas Akat dan Atsj pada tanggal 14 - 18 Mei 2018 dengan jumlah peserta Puskesmas Ayam 10 Orang (5 Laki-Laki, 5 Perempuan) Puskesmas Atsj dan telah menghasilkan 2 draft Dokumen perencanaan tingkat Puskesmas yang siap dilaksanakan.

Pelatihan TUPOKSI Aparat Kampung

Kegiatan ini merupakan upaya Program Landasan Fase II dalam memperkuat pemahaman Pemerintahan Kampung tentang pengelolaan sistem Pemerintah Kampung, tugas pokok Aparatur Kampung dan BAMUSKAM, serta kemampuan dalam menyusun peraturan kampung sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kampung dalam mengelola pemerintahannya dan juga sebagai proteksi bagi pelaksana Pemerintahan Kampung itu sendiri. Selain itu kegiatan juga meningkatkan pemahaman yang terintegrasi tentang perencanaan dan penganggaran reguler pada tingkat kampung. Kegiatan melibatkan aparat pemerintahan kampung dan BAMUSKAM. Pada periode ini kegiatan telah dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 26-28 April 2018 dan telah melatih 63 Orang (53 Laki-laki dan 10 Perempuan)

Pendampingan Sistem Informasi Administrasi Kampung (SAIK)

Merupakan sebuah kegiatan pendampingan dalam penginputan data pada instrumen yang aplikatif yang diberikan kepada kader pemberdayaan kampung. Dengan cara penyusunan Profil Kampung berbasis data yang akurat, sehingga hasil dari penginputan data SAIK dapat berdampak kepada prioritas program kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan HIV. Dilaksanakan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 21 - 24 Mei 2018 (24 Laki-laki dan 6 Perempuan)

Pelatihan Penyusunan Perencanaan Kampung

Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Kampung (RPJMK), Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas kepada seluruh komponen pemerintahan kampung untuk mendorong seluruh proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat dan bergerak secara partisipatif dalam menentukan arah dan orientasi pembangunan kemandirian dalam Perencanaan dan Penganggaran Kampung. Pada periode ini kegiatan telah dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kabupaten Waropen, Distrik Seget Kabupaten Sorong dan Kabupaten Kaimana.

Pelatihan dan Pendampingan Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID)

Kegiatan ini merupakan pengenalan sebuah sistem administrasi dan informasi pada tingkat distrik yang merupakan konsolidasi dari seluruh SAIK dari seluruh kampung dalam satu distrik. SAID memuat data kependudukan, sosial dan ekonomipenduduk di distrik, serta cakupan layanan puskesmas serta sekolah dasar (SD). Selain itu SAID juga memuat data tentang perencanaan dan penganggaran kampung, puskesmas dan sekolah dasar (SD) yang berada di dalam satu distrik. Dalam kegiatan ini dihasilkan i. Staff Distrik dan Operator yang mampu menjalankan SAID, ii. Kader Kampung mampu mendukung SAID, iii. Distrik Mumiwaren dapat menjadi pusat data kawasan yang terintegrasi dengan Unit Layanan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 April 2018 dengan jumlah peserta 48 Orang (39 Laki-laki dan 9 Perempuan).

Pada periode transisi program KOMPAK – LANDASAN Fase II di bulan Juli – September 2018, telah dilaksanakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten dalam upaya mencapai tujuan akhir Program Landasan II di Papua dan Papua Barat. Diantaranya adalah:

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung Distrik Akat dan Atsj Kab. Asmat

Mendorong seluruh proses pembangunan Kampung diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan melatih “Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK)” untuk membantu Aparat Kampung dan Bamuskam serta kelengkapan stuktur sosial pada tingkat kampung untuk bergerak secara partisipatif menentukan arah dan orientasi pembangunan Kampung. Dalam konteks Kabupaten Asmat, secara khusus di Distrik Akat dan Atsj, kehadiran Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung merupakan momentum pelibatan peran masyarakat dalam proses pembangunan di kampung. Kader menjadi aset kampung yang berkontribusi dalam seluruh proses pembangunan di kampung, terutama dalam proses penyiapan data dasar kampung (SAIK) yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan kampung. Kader kampung juga nantinya akan membantu proses “tertib” administrasi kampung yang selama ini terbengkalai karena aparat pemerintahan kampung memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola data dan administrasi pemerintahan kampung.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 17 – 20 Juli 2018 dengan narasumber yang berasal dari Sekretaris DPMPK Kab Asmat, Pastor Vesto Maing, Pr, COMDEV Specialist Landasan dan Konsultan Fasilitator serta melibatkan 40 orang Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung distrik Akat dan distrik Atsj.

Pelatihan Pertanian Organik Distrik Akat Kabupaten Asmat

Belajar pada pengalaman Kejadian Luar Biasa (KLB) yang salah satu penyebabnya adalah minimnya konsumsi makanan bergizi, termasuk tidak tersedianya sayur-mayur yang

memadai untuk dikonsumsi oleh ibu dan anak, LANDASAN mendorong para petani sayur di Distrik Akat untuk membuka kebun sayur. Hasil yang diharapkan, pertama-tama untuk konsumsi keluarga, guna memenuhi kebutuhan keluarga akan sayur. Selanjutnya bisa untuk dipasarkan di kota Agats. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan sayur terpenuhi dan dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dari hasil penjualan sayur. Selain itu pelatihan ini pertanian organik ini juga bertujuan untuk membentuk kelompok pertanian sayur organik di Distrik Akat dan meningkatkan Pemahaman kelompok pertanian tentang pentingnya memelihara keseimbangan ekosistem melalui pertanian organik bagi petani sayur di Distrik Akat.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan bagi petani sayur organik ini, dilakukan selama 35 hari terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d 24 September 2018 (35 hari) berupa teori dan praktek. Melibatkan 5 kelompok tani di kampung Distrik Akat (Waw Cesau, Ayam, Bayiw Pinam, Cumnew, Jowes) dan 1 kelompok dari guru SD dan SMP di pusat Distrik Akat. Total peserta pelatihan 19 orang Laki-laki dan 16 Perempuan. Dengan narasumber/pelatih Bruder Elias Logo OFM Ahli pertanian organik Fransiskan Papua.

Penguatan dan Pengembangan Fasilitator LANDASAN dan Tim Bupati Manokwari Selatan

Penguatan ini dilatarbelakangi oleh beberapa kendala dalam pengelolaan pembangunan di kabupaten yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setelah tahap penguatan ini Tim LANDASAN akan bekerjasama mendampingi Bupati Manokwari Selatan dan SKPD terkait, agar memiliki kerangka berpikir yang sistemik dalam memahami isu-isu pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari pada Tanggal 14-16 Agustus 2018 di Manokwari Provinsi Papua Barat. 12 staff tim KOMPAK - LANDASAN II mengikuti pelatihan penguatan kapasitas dalam memfasilitasi organisasi dan masyarakat dengan pendekatan STRIDE (Strategic Alignment in Development) dan difasilitasi oleh Principia Learning Lab.

Pendampingan Penyusunan SAID Distrik Momiwaren dan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan

Distrik sebagai Pusat Pengembangan Wilayah. Dengan terkoneksi data SAIK (Sistem Administrasi Informasi Kampung) ke SAID (Sistem Administrasi Informasi Distrik) Pemerintah Distrik dapat mengambil peran sebagai pusat pengembangan wilayah secara terintegrasi. Kampung, distrik dapat menkoordinir sekolah dan Puskesmas untuk melakukan berbagai program pembangunan dan perbaikan layanan dasar. Selain itu Pemerintah Distrik dapat melakukan fungsi asistensi untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintahan kampung, mendorong kampung menemukan prioritas pembangunan berbasis data dan mendorong terjadinya kerjasama antar kampung.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus – 1 September 2018 di distrik oransbari dan 3 – 4 September 2018 di distrik Oransbari, Peserta distrik Momiwaren 28 orang dan distrik Oransbari 41 orang dengan narasumber yang berasal dari Lembaga Mitra Turatea.

Pelatihan Kepala Sekolah Dasar (Manajemen dan Leadership) Kabupaten Asmat

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar Pengawas dan kepala sekolah dapat memahami pengembangan kepemimpinan situasional, menerapkan kompetensi, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, serta dapat memahami dan menerapkan manajemen sekolah secara efektif. Dilaksanakan di Kabupaten Asmat Tanggal 4 – 7 September 2018 di Hotel Sang Surya Asmat dengan jumlah Peserta 71 orang.

Pelatihan Pelaksanaan TUPOKSI Pemerintah Kampung dan BAMUSKAM, Peraturan Kampung, Mekanisme Pengaduan Masyarakat serta Pelaporan Kampung di Distrik Akat dan Atsj, Kabupaten Asmat

Kegiatan ini merupakan upaya Program LANDASAN dalam memperkuat pemahaman Pemerintahan Kampung tentang pengelolaan sistem Pemerintah Kampung, tugas pokok Aparatur Kampung dan BAMUSKAM, serta kemampuan dalam menyusun peraturan kampung sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kampung dalam mengelola pemerintahannya dan juga sebagai proteksi bagi pelaksana Pemerintahan Kampung itu sendiri. Selain itu kegiatan juga Meningkatkan pemahaman yang terintegrasi tentang perencanaan dan penganggaran Reguler pada tingkat kampung. Pada periode ini kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Agustus 2018 di 2 distrik Kabupaten Asmat, telah Diikuti oleh 69 orang yang terdiri dari aparat kampung dan BAMUSKAM dari 20 Kampung distrik Akat dan Atsj Kabupaten Asmat.

Pendampingan Penyusunan RUK Puskesmas Papua Barat

Dengan diakreditasinya layanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas, layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, lebih berkualitas dan komprehensif. Salah satu indikator yang harus dipenuhi Puskesmas untuk mencapai tingkat akreditasi adalah adanya dan dilaksanakannya Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Terpadu. Program LANDASAN membantu mendampingi Puskesmas di wilayah kerja LANDASAN untuk menyusun dokumen rencana usulan kegiatan (RUK) Puskesmas 2019, diharapkan pendampingan ini akan menghasilkan dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan bidang kesehatan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 – 6 September 2018 dengan melibatkan staff dari 11 Puskesmas dampingan program dan Dinas Kesehatan 4 Kabupaten (Fakfak, Kaimana, Sorong dan Manokwari Selatan) serta narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Finalisasi modul Pendidikan, HIV AIDS dan Community Development

Untuk mendorong perubahan secara sistemik dan berorientasi pada penguatan masyarakat kampung, sekolah dan Puskesmas perlu diupayakan mengembangkan panduan-banduan pembelajaran yang lebih kontekstual dari sisi substansi dan metodologi. Panduan-panduan pembelajaran diantaranya adalah *standard operating procedures*, mekanisme, dan panduan teknis serta modul pelatihan dan pendampingan.

Finalisasi modul-modul Pendidikan dan HIV-AIDS yang telah digunakan atau dipraktikkan selama proses pelatihan oleh Program LANDASAN, dimaksudkan untuk menghasilkan modul yang dapat digunakan sesuai dengan konteks lokal Papua dan memenuhi kebutuhan penguatan kapasitas pengguna secara komprehensif dan integrative.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 – 31 Agustus 2018 dengan melibatkan narasumber yang berasal dari KEMENDIKBUD, Universitas, NGO, LPMP Papua, Pengawas Papua (1 orang), LPMP dan Papua Barat untuk modul pendidikan, sedangkan untuk modul HIV dan AIDS adalah Lilis Rumadaul (Direktur PKBI Papua), Yohana Tunya (aktivis NGO), dr Dian Guritno (Kepala Puskesmas Sentani, Trainer, Sri Rahayu (PKR Kota Jayapura, Trainer IMS), Lies Sitorus (LABKESDA Jayapura) dan Pungut Sunarto (Dinkes Kab. Jayapura, Trainer).

Penguatan dan Pengembangan Tim Bupati Manokwari Selatan

KOMPAK-LANDASAN II dengan mengacu pada metode STRIDE (Strategic Alignment in Development) mencoba membantu Bupati dan Tim memiliki kerangka berfikir yang sistemik dalam memahami isu-isu pembangunan di Manokwari Selatan, memahami keselarasan atau

ketidakselarasan diantara komponen-komponen penting yang mempengaruhi capaian sasaran yang disepakati bersama dan Kabupaten bisa membuat rencana kerja strategi yang sistemik, didasarkan pada pemahaman yang kuat dan menyeluruh akan isu-isu yang ada di lapangan dan intersensi pembangunannya pun bisa lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses wawancara 20 (Organisasi Perangkat Daerah) dan 2 Distrik di wilayah pemerintahan kabupaten Manokwari Selatan. Setelah melakukan proses wawancara, hasilnya dituangkan kedalam kerangka STRIDE yang kemudian dibahas pada Workshop Penguatan dan pelatihan penguatan kapasistas OPD dalam meng-fasilitasi organisasi dan masyarakat dengan pendekatan STRIDE.

Pelatihan Kepala Sekolah Dasar (Manajemen dan Leadership) Papua dan Papua Barat

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar Pengawas dan kepala sekolah dapat memahami pengembangan kepemimpinan situasional, menerapkan kompetensi, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah, serta dapat memahami dan menerapkan manajemen sekolah secara efektif. Dilaksanakan di Jayapura untuk peserta dari Kabupaten Jayapura, Lanny Jaya, Waropen dan Nabire Tanggal 12 - 16 September 2018 di Hotel Grand Allison dengan jumlah Peserta 100 orang Dan untuk Papua Barat dilaksanakan di Hotel Royal Mamberamo Sorong diikuti oleh Kabupaten Sorong, Kaimana, Fakfak dan Manokwari Selatan pada tanggal 24 – 27 September 2018. dengan jumlah Peserta 99 orang.

Pelatihan Monitoring dan Evaluasi untuk OPD Papua Barat

Kemampuan merencanakan dan menjalankan sistem monitoring dan evaluasi program, perlu dimiliki baik oleh pengelola langsung kegiatan-kegiatan di tingkat unit layanan, maupun Tim Teknis Kabupaten (OPD terkait) yang memiliki kewenangan mengsupervisi unit-unit layanan, yang juga merupakan pengelola program pada tingkat kabupaten, dan memiliki kepentingan serta tanggung jawab pencapaian tujuan program ini secara nasional. Guna melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif, Program KOMPAK-LANDASAN Fase II melaksanakan pelatihan untuk memastikan kapasitas dan pemahaman Tim Teknis Kabupaten berada pada standar yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengimplementasikannya dalam program ini, maupun dalam program/tugas-tugas lainnya, melalui pelatihan khusus mengenai Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan ini diikuti oleh 32 orang dengan melibatkan 4 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Bappeda) kabupaten Fakfak, Kaimana, Sorong dan Manokwari Selatan.

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan RUK Puskesmas di Papua Barat

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam salah satu aspek manajemen Puskesmas terkait perencanaan, yaitu menyiapkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) tahun 2019. Pelatihan ini melatih para pimpinan ataupun staf Puskesmas untuk melakukan validasi data layanan kesehatan, melakukan analisa masalah serta penyebab-penyebab masalah kesehatan, kemudian merencanakan usulan kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi dan terpilih, hingga kemudian menuangkannya ke dalam Rencana Usulan Kegiatan Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 8 -11 Oktober di HorEx Hotel Jayapura ini, diikuti oleh 43 peserta yang berasal dari 14 Puskesmas di wilayah dampingan program di Provinsi Papua, dan perwakilan dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten dari wilayah dampingan yang ada di Provinsi Papua.

Pendampingan Praktik Monitoring & Evaluasi Program bagi Tim Kabupaten

Kegiatan ini merupakan bagian dan kelanjutan dari Pelatihan Perencanaan *Monitoring* dan Evaluasi Program yang diselenggarakan oleh program KOMPAK- LANDASAN II. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Tim Teknis Kabupaten yang merupakan mitra kerja program di tingkat kabupaten. Kegiatan pendampingan ini pada dasarnya melatih tim kabupaten untuk merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan monitoring lapangan.

Kegiatan ini diawali dengan mereview rencana Monitoring dan Evaluasi Program secara keseluruhan yang telah dibuat dalam pelatihan sebelumnya dan mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dilihat kemajuannya di lapangan. Hasil identifikasi atas aspek-aspek program yang akan dimonitor, ditindak-lanjuti dengan menyiapkan tools monitoring berupa alat bantu yang sesuai untuk mengukur dan merekam hasil monitoring atas indikator-indikator dari aspek yang akan dilihat kemajuannya, selanjutnya tim kabupaten turun lapangan dan terakhir menyiapkan laporan tentang capaian kemajuan, tantangan yang dialami unit-unit layanan, serta rekomendasi tim untuk peningkatan ke depan.



Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara berturut turut di empat kabupaten dampingan di Provinsi Papua Barat, yakni di Fakfak tanggal 10 – 12 Oktober, di Sorong tanggal 14 – 16 Oktober, di Manokwari Selatan tanggal 15- 17 Oktober, dan di Kaimana tanggal 29 – 31 Oktober.

Pelatihan dan Pendampingan Sistem Administrasi Informasi Distrik (SAID) Distrik Oransbari, Papua Barat

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari konsolidasi data di tingkat kampung di Distrik Oransbari yang telah lengkap terinput dalam Sistem Administrasi Informasi Kampung (SAIK). Pelatihan ini menghasilkan 45 orang yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) di Distrik Oransbari. Peserta pelatihan terdiri atas 28 orang Kader Penggerak Masyarakat Kampung (Kader Kampung) dari 14 kampung, 8 orang Operator Data Sekolah dari 8 SD, 3 orang dari operator data Puskesmas, 4 orang Operator SAID dari Distrik Oransbari dan 2 orang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan.



Pelatihan dan Pendampingan SAID Distrik Oransbari ini dilaksanakan selama 3 hari, dari tgl 12 -14 Desember 2018 bertempat di balai Kampung Margo Rukun. Dengan demikian Kabupaten Manokwari Selatan memiliki 2 distrik yang memiliki website terintegrasi SAID yakni Distrik Momi Waren dan Distrik Oransbari, yg sebelumnya telah dimiliki oleh Distrik Momi Waren. SAID Distrik Momi Waren telah mengintegrasikan data SAIK 7 kampung, 6 SD dan data 1 Puskesmas. Sedangkan SAID Distrik Oransbari, mengintegrasikan data SAIK 14 Kampung, 8 SD dan 1 Puskesmas. Ditambah dengan *feature* kebutuhan data administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan.

Pelatihan Penyusunan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) Distrik Akat dan Atsj di Asmat Papua

Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi terkait pengelolaan dan pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan di kampung-kampung, antara lain: Belum tersedianya instrumen atau panduan untuk pengumpulan data mikro yang akurat di tingkat Kampung, kemudian warga kampung, pihak-pihak lain di luar kampung (seperti Pemerintah Distrik, SKPD, lembaga donor, dan pihak-pihak terkait lainnya) mengalami kesulitan mengakses data-data yang telah ada, hal ini menyebabkan pemerintah kampung belum memanfaatkan data tersebut untuk peningkatan pelayanan publik, utamanya pelayanan administratif, selain itu Profil Kampung yang dimiliki oleh pemerintah kampung, dapat hilang atau rusak karena masih menggunakan cara-cara yang konvensional.

Untuk menjawab beberapa kendala utama diatas, maka diperlukan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat di kampung dapat menyusun Profil Kampung berbasis data atau teknik sensus kampung untuk pengumpulan data yang akurat. Hal ini dijawab melalui Pengenalan dan Praktiki Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK).

Pelatihan penyusunan SAIK di dua Distrik yaitu Akat dan Atsj, Kabupaten Asmat yang dilaksanakan di Agats ibukota Asmat pada tanggal 11-13 Desember 2018. Pelatihan ini diikuti oleh total 38 peserta. Peserta berasal dari Distrik Akat terdiri dari Kampung Ayam, Wawcesau, Bayiw Pinam, Cumnew, Jewes, Doar, Manep, Fakan, Beco, Yuni, Buetkwar. Distrik Atjs terdiri dari Kampung Atjs, Sogoni, Yasiuw, Bakasei, Amanamkai, Ambisu, Cewew Yamew, dan Kampung Bine.

Sebagai Pemateri adalah staf Mitra Turatea, Victor Duapadang dan memberi penguatan kapasitas kader adalah Pastor Vesto Maing dari Keuskupan Asmat.

Program KIAT Guru - Kinerja dan Akuntabilitas Guru

Aspek Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Mulai awal tahun 2018, Forum Peduli Pendidikan tidak lagi dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Hal ini berhubungan dengan proses verifikasi 3 bulanan yang saat ini telah dialihkan langsung di tingkat kabupaten.
2. Penguatan terhadap kemampuan pemangku kepentingan untuk strategi keberlanjutan telah dilaksanakan dalam periode Februari-April 2018 (Pelatihan Tata Kelola):
3. Di Sintang, pelatihan tata kelola dibagi menjadi 8 gelombang dan dilakukan secara berturut-turut mulai dari pertengahan Februari 2018 sampai dengan awal April 2018. Setiap gelombang pelatihan memakan waktu empat hari.
4. Di Ketapang, pelatihan tata kelola dibagi menjadi 2 gelombang, dengan masing-masing gelombang dilakukan secara paralel dengan dibagi menjadi 3 kelas. Gelombang pertama telah dilakukan bulan Maret, dan gelombang kedua akan dilaksanakan pertengahan April 2018.
5. Di Landak, pelatihan tata kelola dibagi menjadi 3 gelombang, dengan masing-masing gelombang dibagi menjadi 2 kelas. Dua gelombang telah dilakukan pada bulan Maret 2018. Gelombang terakhir akan dilakukan di awal April 2018.
6. Di Manggarai Timur, pelatihan tata kelola dilakukan dari bulan Maret sampai dengan awal April 2018. Pelatihan dibagi menjadi 3 gelombang dengan masing-masing gelombang memiliki satu kelas. Gelombang terakhir akan dilakukan di awal April 2018.
7. Di Manggarai Barat, pelatihan tata kelola dilakukan dari bulan Maret sampai dengan awal April 2018. Pelatihan dibagi menjadi 3 gelombang dengan masing-masing gelombang memiliki satu kelas. Gelombang terakhir akan dilakukan di awal April 2018.

Aspek Implementasi Pembayaran berdasarkan Kehadiran atau Kualitas Layanan

1. Per awal Maret 2018, penilaian bulanan untuk bulan Januari dan Februari 2018 telah dilakukan di semua 203 desa.
2. Sedangkan penilaian bulan Maret 2018 dilakukan di 202 sekolah. Terdapat informasi bahwa salah satu sekolah di Kab. Manggarai Timur, SDK Puntu (Kelompok Pendekatan 3), telah tidak melakukan penilaian sama sekali mulai bulan Maret 2018 dikarenakan adanya konflik—dimana potensi tersebut telah ada dari awal—antara satu anggota KPL dengan guru.
3. Mekanisme pengiriman data hasil penilaian untuk tahun 2018 telah diperpendek dimana pelaporan dikirim dari tingkat sekolah langsung ke kabupaten. Verifikasi 3 bulanan juga dilakukan di tingkat kabupaten dengan melibatkan pengawas. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu pelaporan sehingga pembayaran tunjangan khusus tidak terlambat. Pengecualian untuk Ketapang dimana pengiriman hasil penilaian kepada dinas dilakukan melalui pengawas sekolah dan telah diatur dalam Perbup.
4. Pembayaran tunjangan khusus untuk triwulan IV tahun 2017 baik untuk guru PNSD maupun bukan PNS telah dilakukan pada Desember 2017. Ditemukan terjadinya kekurangan pembayaran untuk 1 bulan pada triwulan IV/2017 di Ketapang dan Manggarai Barat sebanyak 12 orang guru, yaitu 5 guru di Ketapang (3 guru PNSD dan

2 guru bukan PNS) dan 7 guru di Manggarai Barat (4 guru PNSD dan 3 guru bukan PNS). Hal ini diduga diantaranya karena persoalan teknis dimana yang dikaitkan dengan penilaian memang hanya 2 bulan (Oktober dan Nopember) sehingga bisa saja terlewat 1 bulan. Selain itu, tenggat waktu penerimaan laporan hasil penilaian adalah 30 November sehingga belum semua sekolah mampu memenuhinya. Perbaikan pembayaran dipertimbangkan akan dilakukan pada pembayaran TK I 2018.

5. Pembayaran untuk Triwulan I tahun 2018 masih belum bisa dilakukan karena SKTK (Sertifikat Keterampilan Kerja) guru penerima TKG belum diterbitkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Selain itu verifikasi oleh dinas sebelum dilakukan penetapan hasil penilaian juga direncanakan baru akan selesai dilakukan di Kabupaten per 10 April 2018.

Aspek Tata Kelola dan Regulasi

1. Perjanjian Kerjasama sebagai perpanjangan MoU untuk pelaksanaan program rintisan KIAT Guru di tahun 2018 telah ditandatangani oleh PLT Dirjen GTK, TNP2K dan Bupati di 4 kabupaten rintisan selain Kabupaten Landak. PK sedang proses menunggu tanda tangan dari Bupati yang diketahui sedang cuti saat ini.
2. Persesjen sebagai perpanjangan Perdirjen untuk payung hukum program rintisan KIAT Guru tahun 2018 saat ini sedang menunggu tanda tangan dari Sesjen Kemdikbud.
3. Finalisasi Peraturan Bupati terkait Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2018 telah dilaksanakan untuk 5 Kabupaten Rintisan. Peraturan Bupati telah diterbitkan di Manggarai Barat sedangkan dokumen tersebut masih dalam proses penetapan di 4 kabupaten lainnya.
4. Tenggat waktu pengusulan guru penerima TKG oleh dinas pendidikan ke Dirjen GTK adalah tanggal 25 Maret 2018, namun sampai dengan minggu ke-2 Maret 2018 masih terdapat 180 (15%) dari 1187 guru peserta yang mempunyai NUPTK di 267 SD rintisan KIAT Guru yang belum masuk sebagai nominasi penerima SKTK Semester I 2018 sehingga dinas pendidikan belum bisa mengusulkan melalui SIMTUN. Kondisi ini disebabkan diantaranya oleh terlambatnya sekolah melakukan pemutakhiran data guru dalam Dapodik dan sinkronisasi Dapodik dari sekolah ke server pusat masih membutuhkan waktu.
5. Daftar detil guru peserta rintisan KIAT Guru, termasuk yang belum mendapatkan nominasi, telah disampaikan ke Dirjen GTK. Terutama untuk guru yang belum masuk nominasi agar ditindaklanjuti guna memastikan guru-guru tersebut menerima SKTK. Tim Pelaksana Nasional dan Koordinator Lapangan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Operator SIMTUN kabupaten untuk memitigasi kondisi tersebut.

Aspek Penelitian

1. Tes Cepat kemampuan dasar murid telah dilakukan di 203 (100%) SD Rintisan dengan seluruh data telah terkumpulkan. Berdasarkan hasil Tes Cepat Kemampuan

Dasar Murid yang dilakukan oleh Kader dan KPL tersebut, 40% murid telah memiliki kemampuan dasar Bahasa Indonesia dan 42% murid telah memiliki kemampuan Matematika sesuai dengan kelasnya dibandingkan pada saat survei awal di bulan Oktober-November 2016 dimana hanya 1% murid yang memiliki kemampuan Bahasa Indonesia dan 4% murid yang memiliki kemampuan Matematika sesuai dengan kelasnya.

2. Data Survei Kehadiran Guru telah dianalisa dimana ditemukan indikasi meningkatnya tingkat kehadiran guru di sekolah dari 75% di akhir 2016 (baseline) menjadi 79% di akhir 2017 (SKF FM). Selanjutnya, tingkat kehadiran murid meningkat dari 87% di akhir 2016 menjadi 90% di akhir 2017. Oleh karena itu, persentase kelas tanpa guru ditemukan menurun dari 25% di akhir 2016 menjadi 13% di akhir 2017. Data ini telah dipaparkan sebagai materi pelatihan tata kelola kepada pemangku kepentingan desa dan sekolah.
3. Saat ini Tim Daerah sedang mengumpulkan data pemetaan keanggotaan dan keaktifan kader dan KPL beserta variasi fasilitasi pertemuan di tingkat desa yang selama ini terjadi.

Survei endline kuantitatif maupun kualitatif telah dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2018. Dalam pelaksanaannya, Tim Survei aktif berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Daerah maupun Nasional untuk mengatur jadwal antara pelaksanaan survei dengan pelatihan Tata Kelola yang sedang berlangsung.

Beberapa Kegiatan Implementasi Yang Dilaksanakan Pada Periode Januari – Maret 2018

1. **Lokakarya dan Pelatihan Nasional Tim Pelaksana Daerah diselenggarakan oleh TNP2K bersama dengan Yayasan BaKTI dan Bank Dunia pada tanggal 7-12 Januari 2018 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.** Lokakarya ini bertujuan untuk: (a) Menyampaikan informasi mengenai desain penutupan proyek dan rencana kerja tim nasional tahun 2018 termasuk rencana pengumpulan data dan informasi; (b) Menyelesaikan rencana kerja daerah bulan Januari sampai Mei 2018; (c) Melatih Tim Daerah agar dapat melakukan Pelatihan bagi kader desa (dengan pendekatan ToT) untuk memfasilitasi evaluasi janji layanan dan tanggung-jawab KPL dan Kader agar tetap dapat melaksanakan penilaian bulanan setelah FM tidak lagi mendampingi; (d) Mendapatkan informasi dan data untuk penelitian dan implementasi di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten; dan (e) Membahas kelengkapan dokumen untuk PJUM kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Nasional KIAT Guru yang berjumlah 24 orang, seluruh Tim Daerah KIAT Guru yang berjumlah 55, dan fasilitator dari Yayasan BaKTI sejumlah 8 orang dan 5 orang dari Bank Dunia.



2. **Survei Akhir (Endline) diselenggarakan oleh Bank Dunia dengan dukungan teknis dari TNP2K.** Survei akhir dilakukan untuk menilai efektivitas program rintisan KIAT Guru dengan mengkaji dampak kegiatan terhadap kehadiran dan kualitas layanan guru dan hasil belajar murid di 270 SD Rintisan. Survei akhir dilakukan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan survei akhir kuantitatif mencakup pengumpulan data di tingkat Sekolah Dasar, tes kemampuan siswa, kegiatan dengan guru dan orang tua murid, dan wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, Kepala Desa, Kelompok Pengguna Layanan dan orang tua murid. Survei akhir kuantitatif dilakukan selama satu setengah bulan dimulai dari awal Februari (5 Februari 2018) sampai dengan pertengahan Maret (27 Maret 2018). Dalam mempersiapkan pelaksanaan survei akhir tersebut, tim TNP2K-KIAT Guru turut mendampingi Tim Bank Dunia dalam uji coba instrumen *Student Learning Assessment* (SLA) dan pelatihan Tim Survei. Uji coba instrumen SLA dilakukan pada tanggal 25-27 Januari 2018 di Pontianak. Data survei kuantitatif yang dikumpulkan diperkirakan siap untuk dianalisa per akhir April 2018. Selanjutnya, kegiatan survei kualitatif telah dilakukan dari tanggal 19 Feb sampai dengan 10 Maret di 9 desa kasus yang sama dengan dua kunjungan sebelumnya.

3. **Lokakarya Regional Finalisasi Peraturan Bupati diselenggarakan oleh Ditjen GTK – Kemdikbud bersama dengan TNP2K pada tanggal 26 Februari-1 Maret 2018 di Hotel H Sovereign, Denpasar dan pada tanggal 5-8 Maret 2018 di Hotel Mercure, Pontianak.** Lokakarya ini bertujuan untuk menyepakati rancangan akhir regulasi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru Tahun 2018, yang terdiri dari 3 (tiga)



bagian, yaitu: a) Peraturan Bupati yang berisi berbagai landasan hukum serta klausul terkait pelaksanaan rintisan KIAT Guru tahun 2018, b) Lampiran I berisi Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Tingkat Kehadiran dan Kualitas Layanan Guru dan Kepala Sekolah Peserta, dan 3) Lampiran II tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Khusus Guru dan Kepala Sekolah Peserta. Kegiatan ini diikuti oleh 14 perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur untuk kegiatan Regional Nusa Tenggara Timur dan 21 perwakilan Pemerintah Daerah Ketapang, Landak dan Sintang untuk kegiatan Regional Kalimantan Barat. Proses kegiatan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru dan 5 Koordinator Lapangan KIAT Guru dengan pendampingan dari Kemdikbud-GTK. Setelah

pembahasan peraturan dan lampirannya, peraturan akan kembali dikaji di masing-masing Kabupaten sambil menunggu Persekjend yang masih dalam proses pengajuan.

- 4. Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola berlangsung di 5 Kabupaten Rintisan.** Sebagai bentuk tindak lanjut arahan Ketua Tim Koordinasi Nasional Program Rintisan KIAT Guru untuk merumuskan strategi keberlanjutan program KIAT Guru di tahun 2018, dilakukan dua jenis pelatihan kepada pemangku kepentingan desa dan sekolah di masing-masing 5 Kabupaten Rintisan. Salah satunya adalah Pelatihan Tata Kelola yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kader, KPL, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Pemerintah Desa untuk bekerja sama dalam melanjutkan kegiatan penilaian layanan guru secara mandiri agar perubahan baik yang dialami selama ini terhadap pendidikan terus meningkat. Kegiatan ini telah berjalan sejak bulan Februari sampai dengan pertengahan April 2018.



- 5. Knowledge Sharing KIAT Guru diselenggarakan pada 16 Maret 2018 di Kantor Bank Dunia Jakarta.**

Tujuan dari kegiatan ini adalah berbagi pengetahuan terkait instrumen *Student Learning Assessment* yang digunakan oleh masyarakat di desa Rintisan KIAT Guru. Materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh Tim dari KIAT Guru-TNP2K. Kegiatan ini dihadiri sekitar 30 peserta dari berbagai organisasi dan mitra pembangunan di bidang pendidikan. Kegiatan ini juga merupakan sesi pertama dari rangkaian Brown Bag Lunch KIAT Guru yang direncanakan akan dilakukan hingga Juni 2018 sebagai wadah pembagian pengetahuan terkait mekanisme rintisan maupun temuan sementara dari pelaksanaan rintisan KIAT Guru.

Lokakarya Regional dan Serah Terima Kabupaten

Lokakarya ini dilaksanakan di Pontianak 3-5 Mei untuk Kabupaten Sintang, Landak, dan Ketapang serta tanggal 7-9 Mei di Bali untuk Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Keberlanjutan proses penilaian layanan secara mandiri oleh pemangku kepentingan di 5 kabupaten menjadi subjek pembahasan dalam lokakarya ini. Karenanya, penguatan pemahaman terkait mekanisme penilaian layanan, penguatan kemampuan operator dalam pengelolaan hasil penilaian beserta pelaporannya, dukungan dan komitmen pembiayaan dari alokasi dana desa bagi operasionalisasi kegiatan penilaian layanan, menjadi aspek penting yang dibahas dalam kegiatan Lokakarya

Regional dan Serah Terima Kabupaten. Namun demikian, disampaikan pula bahwa Kemdikbud dan TNP2K akan terus memberikan dukungan supervisi kepada 5 kabupaten hingga akhir Desember 2018 untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan rintisan usai pendampingan teknis dari TNP2K. Dukungan ini akan diberikan dalam bentuk penugasan 2 staff TNP2K di masing-masing kabupaten sampai dengan Desember 2018 serta supervisi dan monitoring teknis dari Tim TNP2K KIAT Guru Nasional. Pada akhir tahun 2018, pemerintah daerah 5 kabupaten rintisan akan diundang untuk terlibat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan nasional dari hasil pelaksanaan Program Penelitian KIAT Guru. Lokakarya serah terima ini diikuti oleh 71 orang yang terdiri dari 13 orang perwakilan GTK, 10 orang perwakilan TKD Sintang, 12 orang perwakilan TKD Ketapang, 12 orang perwakilan Landak, 10 orang perwakilan Manggarai Barat dan 14 orang perwakilan Manggarai Timur. SKPD yang mewakili TKD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, BAPPEDA, BP3, SEKDA, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BP4D, serta Dinas PKO.



Pelatihan Tata Kelola dan Evaluasi untuk pemangku kepentingan daerah rampung terlaksanakan hingga April 2018 di 5 kabupaten

Rangkaian kegiatan ini diikuti oleh total 1173 peserta, terdiri dari perwakilan Kelompok Pengguna Layanan (208 orang), Kader (390 orang), Pemerintah Desa (174 orang), perwakilan sekolah (205 orang), Komite Sekolah (180 orang) dan Pengawas (16 orang).



6. Dengan berakhirnya pendampingan teknis pelaksanaan program KIAT Guru di 5 kabupaten pada akhir bulan Mei 2017, Tim Pelaksana Daerah telah kembali ke lokasi tempat tinggal. Tim Nasional telah mendampingi proses *exit clearance*, serah terima aset maupun demobilisasi tim daerah yang telah dilakukan secara bertahap mulai dari pertengahan hingga akhir Mei 2018.

7. Terkait dengan keberlanjutan pelaksanaan program KIAT Guru paska Juni 2018, telah dilakukan koordinasi antara Tim Nasional dengan Koordinator Lapangan guna mereview perkembangan capaian terakhir di 5 kabupaten, terutama kesiapan pemangku kepentingan di Kabupaten untuk melanjutkan pelaksanaan penilaian layanan serta dukungan yang dibutuhkan

dari nasional baik SDM maupun regulasi payung hukum bagi kabupaten yang melakukan pengimbasan program KIAT Guru (Ketapang).

8. **Knowledge Sharing KIAT Guru diselenggarakan pada 31 Mei 2018 di Kantor TNP2K Jakarta.**



Tujuan dari kegiatan ini adalah berbagi pengetahuan terkait mekanisme pemberdayaan masyarakat yang diterapkan Rintisan KIAT Guru dalam meningkatkan layanan pendidikan di daerah terpencil. Materi dalam kegiatan ini

disampaikan oleh Tim dari KIAT Guru-TNP2K. Kegiatan ini dihadiri sekitar 60 peserta dari TNP2K dan berbagai organisasi dan mitra pembangunan lainnya termasuk Bank Dunia, USAID, dan Pertamina Foundation. Kegiatan ini merupakan sesi kedua dari rangkaian *Brown Bag Lunch* KIAT Guru yang direncanakan akan dilakukan hingga Juli 2018 sebagai wadah pembagian pengetahuan terkait mekanisme rintisan maupun temuan sementara dari pelaksanaan rintisan KIAT Guru.

A. **Capaian Hingga Juni 2018**

1. **Aspek Implementasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

a. **Hingga akhir Mei 2018, pertemuan evaluasi terhadap kesepakatan layanan yang dilakukan secara mandiri oleh Kader Desa telah dilakukan di beberapa SD rintisan KIAT Guru, di antaranya 3 di Kabupaten Manggarai Timur dan 3 di Sintang.** Untuk memastikan keberlanjutan kegiatan tersebut di sekolah lainnya, pemantauan realisasi pelaksanaan evaluasi mandiri di SD rintisan KIAT Guru juga merupakan rencana kerja dari Koordinator Lapangan hingga akhir tahun 2018.

2. **Aspek Implementasi Pembayaran berdasarkan Kehadiran atau Kualitas Layanan**

a. Per awal Juni 2018, penilaian bulanan untuk bulan April hingga Mei 2018 telah dilakukan di 203 sekolah.

b. Verifikasi hasil penilaian 3 bulan untuk periode Triwulan I tahun 2018 telah dilaksanakan di 5 kabupaten di minggu kedua April. Penetapan hasil penilaian layanan tersebut menjadi acuan pembayaran Tunjangan Khusus Guru. Pembelajaran yang diperoleh dari proses ini diantaranya adalah perlunya penguatan pemahaman sekolah dalam hal kelengkapan dokumen penilaian, pengarsipan beserta pengirimannya ke Dinas kabupaten. Di sisi lain peran Pengawas perlu lebih maksimal dalam mengawal proses penilaian layanan serta melakukan uji petik hasil penilaian layanan dari sekolah dilingkungannya. Di tingkat kabupaten, keterampilan operator kabupaten perlu ditingkatkan dalam memastikan kelengkapan data penilaian dari semua sekolah.

c. Hingga minggu ke-3 Mei 2018, 1031 dari 1068 guru peserta KIAT Guru yang pada tahun 2017 mendapatkan SKTK telah menerima SKTK untuk semester I tahun 2018. 3 dari 37 guru yang belum mendapatkan SKTK sudah mendapatkan nominasi sedangkan 34 guru lain belum masuk nominasi dalam SIMTUN. Tim Nasional akan melakukan koordinasi dengan GTK untuk penerbitan SKTK bagi sisa guru tersebut yang bukan berada di bawah Kemenag. Selain itu, telah diidentifikasi juga 86 guru “baru” di sekolah rintisan KIAT Guru yang mendapatkan SKTK Semester I 2018. Guru tersebut sebelumnya tidak mendapatkan SKTK. Sehingga secara

total, terdapat 1124 dari 1187 guru yang memiliki NUPTK di 270 SD rintisan KIAT Guru yang mendapatkan SKTK Semester I 2018.

3. Aspek Tata Kelola dan Regulasi

- a. Regulasi nasional yang berhasil diterbitkan adalah PK Program Rintisan Kebijakan KIAT Guru, PERMENDIKBUD dan KEPMENDIKBUD dengan periode berlakunya adalah Januari hingga Desember 2018. PERSESJEN Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru Dalam Penyaluran Tunjangan Khusus Tahun Anggaran 2018 juga telah diterbitkan per 16 Mei 2018, dengan salinan yang sudah diterima oleh Tim Nasional maupun Koordinator Lapangan. Adapun SK TKN (Tim Koordinasi Nasional) sebagai landasan kerja pelaksana program KIAT Guru di nasional masih menggunakan SK TKN No. 24199/B/H/2016.
- b. Regulasi daerah sebagai payung hukum pelaksanaan program KIAT Guru di kabupaten yakni Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KIAT Guru telah diterbitkan di semua 5 kabupaten dan sudah disosialisasikan melalui rapat TKD, pertemuan dengan Pengawas Sekolah. SK Tim Koordinasi Daerah juga telah diterbitkan di seluruh kabupaten. Sementara SK Penetapan Sekolah dan Guru Peserta Program KIAT Guru telah diterbitkan oleh 4 kabupaten selain Sintang yang masih dalam proses penetapan.
- c. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa peserta rintisan di 5 kabupaten telah membuat komitmen mendukung kegiatan KIAT Guru di tingkat desa melalui di antaranya penetapan SK Kader dan KPL beserta alokasi anggaran desa untuk operasional Kader dan KPL di tahun 2018. Berikut adalah rincian jenis komitmen dan regulasi lain yang ditetapkan di setiap kabupaten,
 - a. **Kabupaten Ketapang**
 - i. Surat Edaran Bappeda No. 050/0764/ Bappeda-C Tentang Anggaran Operational Kader Desa dan KPL serta peruntukannya.
 - ii. Monitoring Bappeda pada periode 1-5 Mei 2018 ke desa rintisan KIAT Guru untuk memastikan anggaran operasional Kader dan KPL masuk dalam APBDesa Tahun 2018.
 - b. **Kabupaten Landak**
 - i. Surat Edaran Sekretaris Daerah (atas nama Bupati Landak) No. 460/852/DSPMPD-E/2017 tentang Dukungan Dana Desa Untuk Kegiatan KIAT Guru Tahun 2018
 - c. **Kabupaten Sintang**
 - i. Komitmen Pemerintah Desa untuk melakukan pencairan operational Kader dan KPL pada tahap pertama, sehingga dapat langsung digunakan untuk Pertemuan Rutin Bulanan
 - d. **Kabupaten Manggarai Barat**
 - i. Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Desa mencantumkan Kegiatan KPL dan Kader dianggarkan di APBDesa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - e. **Kabupaten Manggarai Timur**
 - i. Instruksi Bupati Manggarai Timur Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Dukungan Operational Kader dan KPL melalui Dana Desa di APBDESA Tahun 2018
- d. **Beberapa pemerintah daerah melakukan inovasi untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan rintisan KIAT Guru di sekolah rintisan (maupun di sekolah non rintisan) paska Juni 2018,**
 - i. Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang berinisiatif untuk melakukan diseminasi (pengimbasan) pelaksanaan penilaian layanan ke sekolah di luar sasaran KIAT Guru, yakni 5 sekolah di kecamatan Sungai Melayu Rayak dan Tumbang Titi mulai bulan Juli- Desember 2018. Permintaan dukungan dari tim TNP2K KIAT Guru dalam bentuk

pendampingan Teknis kepada TKD pada awal Juni 2018, disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Ketapang.

- ii. Pemerintah Daerah Manggarai Barat merekrut dua fasilitator masyarakat KIAT Guru untuk membantu pemantauan pelaksanaan penilaian di desa rintisan hingga Desember 2018.

4. Aspek Penelitian

- a. Hingga April, Tim Nasional mengunjungi 5 kabupaten dengan tujuan untuk finalisasi pengumpulan seluruh data implementasi maupun penelitian. Per akhir kunjungan, telah diperoleh 100% data implementasi dari tahun 2017 dan 2018 dengan catatan adanya data yang tidak berhasil dikumpulkan karena berbagai alasan teknis dan telah dilaporkan dalam *Note to File*. Nasional untuk mengatur jadwal antara pelaksanaan survei dengan pelatihan Tata Kelola yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk data sekunder penelitian, khususnya data terkait alokasi dan penggunaan dana BOS dan APBDes, baru mencapai 64%. Sebagai tindak lanjut, Koordinator Lapangan akan melengkapi data sekunder penelitian yang masih kurang pada bulan Juli 2018 saat kembali ke kabupaten penugasan.
- b. Analisis awal kategori janji layanan guru versi amandemen telah dilakukan dan saat ini sedang dalam proses rivi. Hasil analisis akan dibandingkan dengan kategorisasi janji layanan versi awal. Bersama dengan analisis tersebut adalah penulisan narasi proses pertemuan awal yang menjelaskan proses maupun temuan dari pelaksanaan tahapan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang berhasil pada pembentukan kesepakatan layanan antara guru dan masyarakat beserta kelompok pengguna layanan yang akan menilai janji layanan tersebut setiap bulannya. Narasi maupun analisis kesepakatan layanan rencananya akan menjadi bagian dari publikasi KIAT Guru terkait mekanisme pemberdayaan masyarakat KIAT Guru dalam meningkatkan layanan pendidikan di daerah terpencil.

Pelaksanaan program KIAT Guru pada periode ini telah memenuhi target berdasarkan kerangka kerja hasil yang telah ditetapkan yakni dikaitkannya pembayaran tunjangan dengan kinerja dengan presentase 99% serta diberinya asistensi teknis kepada pemangku kepentingan tingkat daerah dengan jumlah 28 orang. Pada aspek manajemen program, rencana kerja nasional dan daerah sampai dengan Desember 2019 juga telah diselesaikan berbarengan dengan pelaksanaan penguatan Tim Nasional. Koordinasi dengan Kemendikbud Dirjen GTK sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program KIAT Guru juga telah melibatkan pertemuan antara Deputy Bidang Dukungan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis yang dihadiri oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan; Dirjen GTK dan Sekretaris Jenderal, Tim World Bank serta Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru.

Pelaksanaan program KIAT Guru di 5 (lima) kabupten yang telah memasuki fase kemandirian sedang akan dilihat dan dipantau bersama oleh Tim KIAT Guru Daerah, Tim Koordinasi Daerah dan Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru. Hal itu meliputi dikembangkannya instrumen pemantauan fase kemandirian dan digunakannya instrumen tersebut untuk memantau kegiatan di tingkat desa atau sekolah dalam 3 (tiga) periode yakni akhir Agustus, akhir September dan akhir Oktober. Dengan total sampling sekolah/desa yang dipantau sejumlah 45 sekolah, untuk periode akhir Agustus ini telah dilaksanakan pemantauan ke 18 sekolah. Dalam konteks kemandirian ini, telah dilaksanakan misi pemantaun bersama antara Tim Pelaksana Nasional KIAT Guru, Tim World Bank dan DFAT ke Sintang pada akhir September. Pada aspek lain, Tim Pelaksana Nasional juga telah mengidentifikasi tema-tema sekaligus media atau forum yang dapat digunakan untuk penyebarluasan pembelajaran pelaksanaan

Program KIAT Guru. Salah satunya adalah dalam Festival Forum Kawasan Timur Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Oktober 2018.

Kegiatan Tim KIAT Guru Nasional

- Rapat koordinasi dengan Dirjen GTK Kemendikbud telah dilakukan pada tanggal 12 September 2018. Pertemuan ini menghasilkan penegasan bahwa tunjangan guru dikaitkan dengan kinerja akan dilaksanakan pada tahun 2020.
- Rapat koordinasi antara Tim pelaksana Nasional dengan Tim Daerah Sintang pada tanggal 10 September 2018 dilakukan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Misi Pemantauan Bersama yang akan dilakukan di Kabupaten Sintang pada akhir bulan September 2018. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi, data dan fakta lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Pertemuan Rutin Bulanan (PRB) yang dilakukan oleh sekolah dan KPL secara mandiri. Kegiatan ini juga bermaksud untuk mengetahui capaian, tantangan dan praktik baik dukungan pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam melaksanakan KIAT Guru Remote secara mandiri.

Update KIAT Guru di 5 Kabupaten wilayah kerja



Kegiatan KIAT Guru di kabupaten selama bulan Agustus sampai awal September 2018, berkontribusi pada 2 hal utama, yaitu; (1) melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan KIAT Guru fase mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu kegiatan pemantauan bersama TKD ke sekolah dan desa, observasi uji petik yang dilakukan oleh pengawas, dan observasi PRB di sekolah terpilih, (2) Penguatan kapasitas perangkat Pemerintah Daerah antara lain dengan cara asistensi terhadap bidang PTK dan pengawas terkait penyusunan SOP uji petik dan verifikasi 3 bulanan, pengembangan instrumen monev bersama TKD, mendukung TKD dalam merumuskan indikator kemandirian pelaksanaan KIAT Guru oleh PEMDA, dan membantu TKD menyusun SOP penanganan keluhan dan pengaduan program KIAT Guru.

Monitoring Bersama TKD. Kegiatan monitoring ini merupakan kegiatan TKD Bersama dengan Tim KIAT Guru melakukan kunjungan ke sekolah untuk melihat kegiatan kemandirian sekolah dan desa. Kegiatan ini menindaklanjuti hasil pertemuan penyusunan indikator kepatuhan penilaian layanan guru. Menggunakan instrumen monitoring yang disusun oleh TKD, Tim Monitoring melakukan penilaian kemandirian di beberapa sekolah sasaran.

Observasi PRB. Kegiatan observasi dilakukan di beberapa sekolah sasaran. Kegiatan observasi ini melibatkan Tim KIAT Guru di Kabupaten dan BAPPEDA sebagai Tim TKD. Hasil Kegiatan ini adalah informasi, data dan fakta lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan PRB, dan Dokumen rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan PRB.

Fasilitasi penyusunan SOP pengaduan dan penanganan. Kegiatan ini adalah dalam rangka mengembangkan SOP pengaduan dan membentuk unit pengaduan. Hasil kegiatan ini adalah disepakati dan ditetapkannya dokumen standard operasional prosedur (SOP) tatakelola penanganan keluhan dan pengaduan KIAT Guru.

Pada periode Oktober 2018, berdasarkan kerangka kerja hasil impementasi Program KIAT Guru *Remote* fase Kemandirian telah memenuhi beberapa target indikator hasil menengah yang ditetapkan. Pencapaian indikator persentase pembayaran Tunjangan Khusus bagi guru yang termasuk model MTK dibayarkan sesuai dengan formula KIAT Guru hingga akhir Triwulan 3 (Oktober 2018) telah mencapai 90% (target 85%). Sedangkan pencapaian indikator jumlah perangkat pemerintah Kemendikbud dan Kabupaten yang menerima peningkatan kapasitas telah mencapai 924 orang (target 750 orang). Penambahan kumulatif jumlah perangkat pemerintah yang menerima asistensi teknis di bulan Oktober 2018 adalah sejumlah 127 orang.

Pada periode November 2018, capaian berdasarkan kerangka kerja hasil impementasi Program KIAT Guru *Remote* Fase Kemandirian telah memenuhi beberapa target indikator hasil menengah yang ditetapkan. Pencapaian indikator persentase pembayaran Tunjangan Khusus bagi guru yang termasuk model MTK dibayarkan sesuai dengan formula KIAT Guru hingga akhir Triwulan 4 bulan November 2018 telah mencapai 92% (target 85%). Sedangkan pencapaian indikator jumlah perangkat pemerintah Kemendikbud dan Kabupaten yang menerima peningkatan kapasitas mencapai 995 orang (target 750 orang). Penambahan kumulatif jumlah perangkat pemerintah yang menerima asistensi teknis di bulan November 2018 adalah sejumlah 68 orang.

Kegiatan Semiloka Penyelarasan Rencana Perluasan dengan Desain Program Rintisan Kiat Guru 2019 di Semarang telah membahas dan merencanakan konversi dan replikasi program KIAT Guru *Remote* 2019 di 5 Kabupaten intervensi. Hasil kegiatan ini adalah telah diselarasannya desain Program KIAT Guru *Remote* dengan rencana perluasan Program Rintisan KIAT Guru *Remote* tahun 2019 dan disusunnya garis besar rencana pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru di tahun 2019. Lima Kabupaten KIAT Guru telah berkomitmen memperluas cakupan Program KIAT Guru secara bertahap. Jumlah SD baru peserta perluasan Program KIAT Guru 2019 di Kabupaten Sintang adalah sejumlah 66 sekolah, Ketapang 45 sekolah, Landak 17 sekolah, Manggarai Barat 30 sekolah, dan Manggarai Timur 25 sekolah, sehingga total SD baru di 5 Kabupaten KIAT guru adalah 183 SD. Komitmen perluasan juga diikuti dengan komitmen anggaran 5 Kabupaten yang bersumber dari APBD dan APBDes TA 2019.

Kegiatan Lokakarya Penyusunan Regulasi Program KIAT Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberi kesempatan kepada Tim Nasional KIAT Guru mempresentasikan kepada peserta mengenai capaian dan hasil evaluasi dampak pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru 2018 dan rencana regulasi/kebijakan yang harus direvisi, diperpanjang ataupun dikeluarkan untuk pelaksanaan Program KIAT Guru di tahun 2019. Di samping itu sempat dibahas rancangan Perjanjian Kerjasama 3 Pihak (Kemendikbud, TNP2K dan 5 Kabupaten) dan rancangan Perjanjian Kerjasama 2 Pihak (Kemendikbud & KemendesPDT). Kegiatan ini menghasilkan tindak-lanjut berupa

rencana kerja penyusunan dan penerbitan regulasi nasional dan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan Program KIAM Guru 2019.

Lokakarya Nasional Tahap Akhir Pelaksanaan Program Rintisan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAM Guru) dilaksanakan di Hotel Sahira Bogor pada 10-12 Desember 2018. Fokus dari kegiatan adalah membahas praktik baik, tantangan serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan dihadapi selama pelaksanaan rintisan beserta rencana perluasan Program Rintisan KIAM Guru di tahun 2019.

Di antara rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan diskusi adalah agar TNP2K dan Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud melanjutkan dukungan teknis dan kebijakan untuk pelaksanaan program di tahun 2019 termasuk untuk memastikan semua lokasi rintisan KIAM Guru tetap mendapatkan Tunjangan Khusus walaupun tidak berstatus Sangat Tertinggal berdasarkan IDM 2018. Selain itu, Kemendes-PDT selaku anggota baru Tim Koordinasi Nasional diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan/arahan terkait pendanaan pemberdayaan masyarakat KIAM Guru melalui kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Kader Pendidikan dan Kelompok Pengguna Layanan.



Rapat Tim Koordinasi Nasional KIAM Guru dilaksanakan di Hotel Atlet Century Jakarta pada 13 Desember 2018. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan capaian program rintisan KIAM Guru selama tahun 2018 yang menunjukkan dampak positif dari rintisan KIAM Guru terhadap hasil belajar murid di mana terjadi penurunan tingkat buta huruf dari 12,2% sebelum pelaksanaan program menjadi 1,7% dan tingkat buta angka dari 7,7% menjadi 0,4%. Secara khusus, dampak baik tersebut terlihat ketika Tunjangan Khusus Guru dikaitkan dengan kehadiran. Laporan pelaksanaan program disambut baik oleh anggota Tim Pengarah maupun Mitra Pembangunan yang turut mendukung keberlanjutan program serta rencana perluasan ke lokasi baru di tahun 2019. Dirjen GTK dalam arahannya menyampaikan agar Program Rintisan KIAM Guru diperluas di tingkat SD maupun jenjang sekolah menengah.

Program BANGGA Papua

BaKTI mendukung Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan sebuah program perlindungan sosial bernama BANGGA Papua. BANGGA – yang didukung oleh KOMPAK dan MAHKOTA ini – merupakan singkatan dari Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera. BANGGA Papua bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan anak orang asli Papua yang berusia dibawah empat tahun. Dengan menggunakan dana otsus, Pemprov Papua akan memberikan dana untuk setiap anak sebesar Rp 200.000 per bulan.



Tugas utama BaKTI adalah menyusun strategi komunikasi, memproduksi *mock-up* materi-materi komunikasi, menyusun modul *training of trainer* (ToT) untuk meningkatkan kapasitas komunikasi Sekretariat Bersama (Sekber) Provinsi dan Kabupaten, dan melakukan ToT.

Assesment dan Pengumpulan Data

- Dilakukan di Jayapura dan tiga kabupaten uji coba, yaitu Asmat, Lanny Jaya dan Paniai.
- Tujuan assesment adalah untuk memperoleh data/informasi terkait cara dan kebiasaan masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi, serta konteks sosial budaya yang mempengaruhi gaya komunikasi dan interaksi tersebut. Dalam assesment ini, BaKTI berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Sekber Kabupaten, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, akademisi, dinas-dinas terkait dan LSM lokal

Penyusunan Strategi Komunikasi

Hasil *assesment* di bulan Januari dijadikan dasar untuk menyusun strategi komunikasi dan mengembangkan materi-materi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Konsultasi Rancangan Strategi Komunikasi

- Pada awal Februari, BaKTI mengonsultasikan rancangan strategi komunikasi kepada Sekber Provinsi dan Kabupaten, dan mendapatkan banyak masukan.
- BaKTI lalu melakukan revisi untuk mengakomodir masukan-masukan tersebut.

Membuat materi-materi komunikasi

- BaKTI memproduksi *mock-up* empat jenis materi komunikasi yaitu poster, brosur/leaflet, lembar balik dan film animasi.
- Sebagai pegangan anggota Sekber yang melakukan sosialisasi, disiapkan sebuah panduan berisi tanya-jawab seputar program BANGGA Papua.

Mendesain Logo BANGGA Papua

- BaKTI memberikan beberapa alternatif desain logo untuk dipilih oleh Sekber Provinsi.
- Pembuatan desain mengikuti arahan dan permintaan dari Sekber Provinsi.

Menyusun Modul ToT

- Di bulan Februari, BaKTI menyusun modul ToT untuk digunakan meningkatkan kapasitas komunikasi Sekber Provinsi dan Kabupaten.
- Modul “Komunikasi Persuasif” dikonsultasikan kepada KOMPAK dan MAHKOTA.

ToT untuk Sekber Provinsi

- Pada akhir Maret 2018, BaKTI melakukan ToT untuk Sekber Provinsi di Jayapura.
- ToT “Komunikasi Persuasif” membekali anggota Sekber Provinsi ketrampilan komunikasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang. Komunikasi persuasif bertujuan menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Intinya, melakukan sosialisasi, tidak sekedar memberi informasi. Harus mampu membuat audiens paham tentang pesan yang disampaikan dan mempengaruhi mereka.
- Dalam ToT ini juga dilakukan latihan bagi para anggota Sekber untuk menggunakan materi-materi komunikasi yang telah dibuat.
- Hadir dalam ToT ini adalah Ketua Sekber Provinsi, 8 orang anggota Sekber Provinsi dan 2 staf Humas Pemprov.
- ToT diampu oleh Feby Siahaan, seorang jurnalis senior yang adalah juga dosen jurnalistik di IBii, penulis buku, *trainer* media dan komunikasi serta mentor sekolah jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalis Independen).

Berikut adalah highlights beberapa kegiatan selama bulan April - Juni 2018:

ToT Komunikasi di tiga kabupaten uji coba: Asmat, Lanny Jaya dan Paniai

- Hampir sepanjang bulan April, telah dilaksanakan rangkaian TOT di tiga kabupaten uji coba BANGGA Papua:
 - Kabupaten Asmat tanggal 3 - 6 April 2018
 - Kabupaten Lanny Jaya 16 - 19 April 2018
 - Kabupaten Paniai tanggal 23 - 26 April 2018

Desain ToT ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah pembelajaran di kelas selama kurang lebih 16 jam (dua hari) dan dilanjutkan dengan bagian kedua, yaitu uji coba sosialisasi Program BANGGA Papua kepada masyarakat di salah satu kampung, yang dilakukan oleh peserta ToT.

- Sekalipun ToT ini ditujukan untuk Sekber Kabupaten, dalam pelaksanaannya, ToT Komunikasi ini juga menjadi ruang belajar bagi OPD yang terkait dengan tujuan dan sasaran Program BANGGA Papua seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas

Dukcapil, Dinas Pemberdayaan Kampung, Dinas Sosial. Selain komponen pemerintah, hadir juga perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan pemuda.

- Total peserta yang menerima ToT Komunikasi sepanjang bulan April dari ke tiga kabupaten berjumlah kurang lebih 100 orang.
- ToT diampu oleh Feby Siahaan, seorang jurnalis senior yang adalah juga dosen jurnalistik di IBii, penulis buku, *trainer* media dan komunikasi serta kepala sekolah jurnalistik AJI (Aliansi Jurnalis Independen).

Debriefing/Laporan Pelaksanaan ToT Komunikasi

Debriefing/laporan pelaksanaan ToT Komunikasi telah diberikan kepada Sekber Provinsi untuk ditindaklanjuti.

Rencana Tindak Lanjut ToT Komunikasi Kabupaten

- ToT ini akan ditindaklanjuti dengan pendampingan BaKTI kepada Sekber masing-masing kabupaten. Salah satu tindak lanjut yang diusulkan BaKTI adalah ToT Tingkat Lanjut (*advanced training*) untuk peserta ToT komunikasi potensial dari masing-masing kabupaten, yang akan dilaksanakan di provinsi.

Pendampingan Kepada Sekber Kabupaten

BaKTI melakukan pendampingan kepada Sekber Kabupaten Asmat pada tanggal 21 -25 Mei 2018. Tujuan pendampingan adalah untuk memberikan bantuan teknis kepada Sekber Kabupaten, upaya mereka mengimplementasikan strategi komunikasi. Salah satu tindak lanjut pendampingan adalah membantu menyusun rencana editorial (*Editorial Plan*) yang akan digunakan Sekber Kabupaten Asmat menghasilkan tulisan-tulisan yang mendukung sosialisasi dan edukasi tentang program BANGGA Papua. Rencana editorial ini memuat gagasan-gagasan utama Program BANGGA Papua. Tulisan-tulisan ini dibuat sebagai hasil kerjasama Sekber Kabupaten Asmat dengan jurnalis di daerah.

Finalisasi Materi-Materi Komunikasi

- Desain dan konten lima jenis materi komunikasi BANGGA Papua yaitu poster, brosur/leaflet, lembar balik, FAQs (*Frequently Asked Questions*) dan film animasi
- Modul ToT Komunikasi

Berikut adalah highlights beberapa kegiatan selama bulan Juli - September 2018:

Rapat Koordinasi BANGGA Papua

Tim BaKTI ambil bagian dalam rapat koordinasi (rakor) BANGGA Papua yang digelar di Hotel Horison, Timika. Dalam rapat koordinasi ini, tim BaKTI memaparkan draft strategi penanganan situasi khusus terkait penundaan pencairan dana yang telah terjadi, draft strategi komunikasi menjelang pencairan dana, laporan pelaksanaan ToT Komunikasi di provinsi dan kabupaten, materi-materi sosialisasi dan edukasi BANGGA Papua, serta rencana kegiatan komunikasi selanjutnya.

Dalam rakor tersebut, Sekber Provinsi menekankan pentingnya tindak lanjut untuk pelatihan pemantapan komunikasi (refreshing) untuk anggota Sekber Provinsi, karena mereka akan segera mendampingi 7 (tujuh) kabupaten baru. Selain itu, pelatihan komunikasi tingkat lanjut untuk anggota sekber kabupaten juga penting untuk dilaksanakan.

Pendampingan/mentoring ke kabupaten

Sambil menunggu realisasi pelatihan-pelatihan tersebut, tim BaKTI terus melakukan pendampingan teknis ke kabupaten uji coba. Di bulan Agustus, tim BaKTI kembali melakukan pendampingan kepada Sekber Kabupaten Asmat. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkait potensi situasi khusus menjelang waktu pencairan dana, serta hal lain yang dianggap perlu untuk didiskusikan.

Catatan penting dari pendampingan di Asmat adalah:

- i. Cukup banyak praktik cerdas di Asmat, tetapi belum didokumentasikan secara baik.
- ii. Sekber Asmat meminta BaKTI melakukan peningkatan kapasitas anggota sekber dalam hal menuliskan dan mempublikasikan kegiatan dan praktik cerdas di Asmat.
- iii. Sekber Asmat meminta BaKTI memberikan bantuan teknis terkait penyediaan panduan atau pegangan untuk kepala kampung dan distrik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan keluhan dari masyarakat.
- iv. Sekber Asmat juga meminta BaKTI membantu persiapan produksi film pendek tentang sosialisasi BANGGA Papua. Tim BaKTI segera menindaklanjuti permintaan dari Sekber Asmat ini.

Konsultasi Rencana Kerja BaKTI kepada Sekber Provinsi

Memasuki bulan September 2018, tim BaKTI memulai kegiatan dengan pertemuan bersama tim Sekber Provinsi. Agenda utama pertemuan ini adalah untuk mengkonsultasikan rencana kerja tim BaKTI untuk periode Agustus – Oktober 2018, agar kegiatan komunikasi sejalan dengan kegiatan-kegiatan program lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BaKTI berhasil mendapatkan komitmen Sekber Provinsi untuk menjadwalkan beberapa kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten. BaKTI juga berhasil mengkonsultasikan draft video promosi BANGGA Papua dan menerima banyak masukan dari Sekber Provinsi.

Dalam rakor selanjutnya yang dijadwalkan di awal atau pertengahan Oktober, BaKTI diminta untuk menyampaikan tentang kegiatan komunikasi kepada 7 (tujuh) kabupaten baru yang akan melaksanakan program BANGGA Papua. Setelahnya, BaKTI juga diminta untuk melanjutkan dengan pelatihan komunikasi tingkat lanjut dengan peserta dari 3 kabupaten uji coba.

Pelatihan Pemantapan (refreshing) tentang Komunikasi untuk Sekber Provinsi

Pelatihan ini diperuntukkan bagi anggota Sekber Provinsi yang telah mengikuti ToT Komunikasi akhir Maret lalu. Pelatihan ini dimaksudkan untuk agar anggota Sekber Provinsi lebih siap dalam melakukan sosialisasi tentang BANGGA Papua kepada 7 (tujuh) kabupaten baru dan dalam mendampingi kabupaten-kabupaten tersebut. Pelatihan digelar di Jayapura pada tanggal 13-14 September 2018.

Pendampingan kepada Sekber Paniai

Merespon permintaan Sekber Paniai, tim BaKTI bertemu dengan Sekber Paniai dan mendiskusikan tantangan-tantangan terkait komunikasi yang mungkin terjadi ketika verifikasi dana dan akibat penundaan pembayaran dana. Tim BaKTI mencoba mengidentifikasi pilihan-pilihan untuk jalan keluarnya. Pendampingan dilakukan pada tanggal 17 – 18 September 2018.

Monev Komunikasi di Asmat

Bersama dengan Sekber Asmat, tim BaKTI melakukan evaluasi tentang dua hal: pertama, keterampilan komunikasi anggota Sekber Asmat pasca ToT Komunikasi dan kedua, evaluasi materi-materi sosialisasi dan edukasi BANGGA Papua yang telah didesain oleh tim BaKTI. Monev dilakukan di Agats dengan menggunakan metode SWOT analysis.



Pelatihan Menulis di Asmat

Merespon permintaan Sekber Asmat, BaKTI melakukan pelatihan menulis bagi anggota sekber yang telah diseleksi oleh Sekber Asmat. Pelatihan dimaksudkan untuk mempersiapkan anggota sekber agar mampu mengidentifikasi topik-topik bernilai berita, mengemas informasi menjadi tulisan atau artikel bernilai berita, dan memanfaatkan hubungan dengan media massa untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang program BANGGA Papua. Pelatihan dilakukan selama 2 (dua) hari di Agats dengan jumlah peserta 15 orang.

Monev bersama DFAT dan KOMPAK

Monev bersama ini dilakukan pada tanggal 21 – 23 September 2018. Sekber Provinsi dan BaKTI masing-masing mempersiapkan paparan untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, praktik cerdas, tantangan-tantangan dan rencana kerja selanjutnya.

Pendampingan kepada Sekber Lanny Jaya

Tim BaKTI bertemu dengan Sekber Lanny Jaya ketika Sekber Provinsi melakukan monitoring ke kabupaten tersebut. Tim BaKTI mencoba mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sekber Lanny Jaya dan kebutuhan-kebutuhan bantuan teknis. Pendampingan ini dilakukan pada tanggal 24 -25 September 2018.

Pelatihan Komunikasi Tingkat Lanjut untuk Champion Paniai, Lanny Jaya dan Asmat di Timika

Dalam pelatihan komunikasi tingkat lanjut, BaKTI mempersiapkan anggota sekber kabupaten dan pelaksana program lainnya agar mampu menangani pertanyaan dan keluhan dari calon penerima manfaat pada saat sosialisasi pra-pembayaran (yang mengumumkan nama-nama calon penerima manfaat) dan pada pelaksanaan pembayaran dana. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 – 16 Oktober 2018.

Dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan tim BaKTI di bulan September di tiga kabupaten Cluster 1 (Asmat, Paniai dan Lanny Jaya) untuk mengantisipasi pertanyaan dan keluhan yang mungkin muncul, menyiapkan jawaban-jawabannya dan cara merespon. Simulasi atau *role play* menjadi fokus utama pelatihan ini sehingga peserta memiliki gambaran nyata tentang bagaimana merespon masyarakat.



Pelatihan Komunikasi Tingkat Lanjut untuk Anggota Sekber Lanny Jaya (24 – 25 Oktober) dan Paniai (15 – 16 November)

Pelatihan ini merupakan pendalaman dan pengkhususan dari pelatihan sebelumnya yang dilakukan di Timika Oktober lalu. Peserta pelatihan kali ini adalah anggota sekber dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam sosialisasi program dan edukasi penggunaan dana program. Pelatihan dilakukan di kabupaten masing-masing. Dalam pelatihan ini, BaKTI memfasilitasi peserta untuk memetakan potensi masalah yang akan muncul selama sosialisasi pra-pembayaran dan pelaksanaan pembayaran dana, mengidentifikasi potensi 'lawan' dan 'kawan,' serta mendiskusikan jalan keluarnya. Peserta juga mendiskusikan strategi menangani pengeluh dan pemrotes dan melatih diri mereka sendiri tentang cara meresponnya dalam beberapa simulasi. Peserta mengantisipasi pertanyaan dan keluhan yang mungkin muncul dan mendiskusikan jawabannya.

Pendampingan (mentoring) kepada Sekber Asmat

Pendampingan kepada Sekber Asmat berlangsung intensif sejak akhir November karena Sekber Asmat telah menyusun rencana sosialisasi pra-pembayaran dan pelaksanaan pembayaran secara rapi. BaKTI memberikan dukungan teknis dan saran-saran terkait aspek komunikasi. BaKTI juga turun langsung bersama tim Sekber Asmat untuk melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari aspek komunikasi. Termasuk dalam asistensi teknis dari BaKTI adalah desain materi untuk edukasi penggunaan dana dan *media relations*.

Program INSPIRASI

INSPIRASI (Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) adalah program 6 bulan yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT) serta dikelola oleh UnionAID bekerjasama dengan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Auckland University of Technology (AUT).



Program ini bertujuan membantu para pemimpin muda dari Indonesia Timur untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri mereka sehingga mereka dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat dan wilayah Indonesia Timur yang lebih luas.

Program ini akan membangun keterampilan riset, evaluasi, presentasi, dan komunikasi peserta, termasuk meningkatkan Bahasa Inggris mereka. Para peserta akan bekerja sama berdasarkan lintas etnis dan agama dan mengambil pendekatan inklusif untuk membangun persatuan, pemahaman, dan kesetaraan di semua lapisan dalam masyarakat. Program ini juga melibatkan organisasi dan individu di Selandia Baru termasuk pemerintah lokal dan pusat, LSM, akademisi dan Māori.

UnionAID dan Yayasan BaKTI menerima 60 aplikasi dari wilayah Sulawesi, Maluku dan NTT untuk mengikuti seleksi program INSPIRASI dan 25 orang kandidat telah terpilih untuk mengikuti Tes dan Interview. 17 orang diantaranya berasal dari pulau Sulawesi dan Maluku dan 8 orang dari Nusa Tenggara Timur. Tanggal 20 April 2018 UnionAID akan mengumumkan 8 orang yang berhasil dan akan mengikuti program INSPIRASI di Selandia Baru.

Tanggal 20 April 2018 UnionAID telah mengumumkan 8 orang yang berhasil dan terpilih mengikuti program INSPIRASI di Selandia baru. Mereka adalah Andi Arifayani dari Lemina Makassar, Tirsana Wendry Kailola dari Heka Leka Maluku, Citra Ayu Mentari Al Rasyid dari Burung Indonesia Gorontalo, Fauzan Azizie dari Tenoon Makassar, Rezky Pratiwi dari YLBH – LBHI Makassar, Ester Elisabeth Umbu Tara dari Perkumpulan Pikul NTT, Rosadalima Dee Panda dari WISE WASH Southeast Asia & Yayasan Sao Mere Nagekeo Flores, dan Serlinia Rambu Anawoli dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Kupang.

8 orang peserta Program INSPIRASI mengikuti pelatihan pra keberangkatan pada tanggal 19-20 Juni di Hotel Bellevue Jakarta. Kegiatan meliputi pembekalan budaya, *team building*, *cross culture understanding* dan *cultural awareness*, serta materi kepemudaan. Dalam kegiatan ini, hadir pula Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson serta perwakilan Kemenpora, Imam Gunawan selaku Asisten Deputi Kewirausahaan dan Wisler Manalu selaku Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda.

Tiba di Auckland New Zealand, Senin 25 Juni 2018, 8 peserta program INSPIRASI mengikuti perkenalan dan orientasi mengenai kota Auckland dan Auckland University of Technology, tempat peserta akan belajar selama 6 bulan.

Selama berada di Selandia Baru, peserta akan belajar kemampuan Bahasa Inggris (membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara), membangun dan meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi kepemimpinan. Mereka akan memiliki pemahaman proses tata Pemerintahan dan lembaga (baik nasional maupun lokal), keadilan gender, pariwisata berkelanjutan, lingkungan, manajemen, kewirausahaan sosial, pembangunan Māori, keterampilan pengelolaan dan pengembangan organisasi, penelitian dasar, penulisan proposal dan evaluasi proyek, komunikasi dan kemampuan berpikir kritis termasuk penggunaan teknologi baru dan media sosial.

Memasuki minggu ke-3 bulan Juli hingga September 2018 di New Zealand, peserta program INSPIRASI (Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif) memulai kegiatan pelatihan. Mereka mengikuti kelas Bahasa Inggris secara intensif selama 3 bulan di *International House di Auckland University of Techology*. Dikemas dalam kelas internasional, para peserta dapat memperkaya ketrampilan melalui interaksi dengan siswa-siswi dari berbagai negara.



Tidak hanya memperdalam kemampuan bahasa Inggris masing-masing, kelas ini juga memperdalam pengenalan budaya dari negara lain dan mengembangkan pemahaman budaya (*cultural understanding*). Bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat dari

berbagai suku bangsa seperti Thailand, China, Korea, Perancis, Saudi Arabia dan Jordania dapat meningkatkan sikap toleransi mereka untuk menerima budaya lain yang berbeda. Para peserta juga diberikan kesempatan mengenal lebih dekat kebudayaan Selandia Baru melalui kelas Pengantar Budaya Selandia Baru. Berbagai informasi mulai dari sejarah negara Selandia Baru, penduduk asli dan kebudayaannya, sampai perkembangan modernisasi di Selandia Baru disajikan dalam kelas ini. Tak lupa mencicipi makanan dan minuman khas dari Selandia Baru dan mengikuti acara perayaan tahun baru suku Maori (Matariki).

Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam program pembangunan berkelanjutan, mereka pun dilatih dalam kelas kepemimpinan dan penulisan akademik. Kelas ini mengasah keterampilan para peserta dalam kepemimpinan, berpikir kritis dan manajemen proyek. Melalui kelas ini setiap peserta dipersiapkan untuk membuat proyek berkelanjutan yang akan diaplikasikan di organisasi masing-masing. Setiap peserta pun difasilitasi dengan seorang mentor yang akan membantu dalam merencanakan proyeknya.

Para peserta ikut juga dalam diskusi bersama peneliti-peneliti perempuan di Universitas Auckland tentang '*Putting Women on the Pathway to Political Representation*', dan berpartisipasi dalam perayaan hari *Indigenous People* bersama Pacific Women Watch. Selain itu ikut berpartisipasi dalam Konferensi Perempuan International bertajuk '*Strength in Diversity*' dengan pembicara utama Ibu Helen Clark, Mantan Perdana Menteri perempuan pertama Selandia Baru.

8 peserta Program INSPIRASI yang terpilih untuk belajar di New Zealand pada tahun 2018, sejak Oktober hingga Desember 2018 fokus pembelajaran mereka adalah pada isu pembangunan berkelanjutan. Beberapa kelas workshop dipersiapkan untuk peserta dengan tujuan untuk membentuk pemahaman dan membantu mereka memberikan sentuhan yang berbeda dalam pekerjaannya.



Beragam topik berbeda diperkenalkan dalam pengembangan masyarakat seperti membangun pemahaman tentang HAM, kesetaraan gender, lingkungan, *Indigenous People*, layanan sosial, pengembangan pariwisata dan *social enterprise*. Kunjungan ke kantor Parlemen Selandia Baru, Auckland Council dan kesempatan untuk bertemu dengan beberapa politisi membuka wawasan peserta tentang pelibatan semua pihak dalam pembangunan manusia.

Peserta juga berkesempatan untuk belajar dari beberapa komunitas masyarakat dan eksplorasi budaya Maori merupakan hal yang paling mengesankan bagi peserta dimana

selama 4 hari mereka tinggal dengan penduduk Maori di Marae (Rumah adat Maori) dan belajar tentang kekayaan budaya yang masih terpelihara dengan baik. Nilai tentang relasi, keluarga dan alam menyatu dalam kehidupan keseharian mereka. Penduduk Maori percaya bahwa keberlangsungan alam semesta tergantung dalam keharmonisan semua elemen di alam. Sebuah refleksi kehidupan yang sangat kaya untuk dipelajari tentang kearifan lokal dan usaha melestarikannya.

Berbagai kelas dan aktivitas yang diikuti peserta mempersiapkan mereka membuat perencanaan proyek yang akan mereka implementasikan di organisasi dan daerah masing-masing. Semua rangkaian kegiatan dalam program INSPIRASI sangat membantu mereka sebagai aktivis NGO dalam memahami pekerjaan dan meningkatkan kualitas organisasi masing-masing.

Peserta program belajar INSPIRASI tahun 2018 telah selesai dan mereka kembali ke Indonesia pada tanggal 15 Desember 2018. UnionAID kembali membuka *Call for Application* untuk seleksi peserta yang akan berangkat pada Juni 2019 mulai November 2018 hingga 17 Januari 2019.

MELAYANI - Mengurai Permasalahan Perbaikan Layanan Dasar di Indonesia

MELAYANI adalah sebuah program yang mendukung pemerintah daerah untuk menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam menanggulangi masalah-masalah layanan dasar dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri.

Program MELAYANI yang didukung Bank Dunia ini, sudah bekerja di tiga lokasi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan saat ini. Ketiga lokasi tersebut adalah Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat, Kabupaten Belu-Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur. Fokus isu antara kabupaten satu dengan kabupaten lain berbeda-beda, misalnya saja di Kabupaten Kubu Raya memilih isu Stunting sebagai Isu Prioritas untuk diselesaikan bersama-sama melalui Program MELAYANI. Di Kabupaten Belu memilih isu prioritas Rendahnya Kualitas Pendidikan dan di Kabupaten Bojonegoro memilih isu Penurunan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir. Pemilihan isu ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui sebuah workshop.



Setelah 4 bulan inisiatif ini berjalan, 3 Kabupaten program MELAYANI sepakat untuk melakukan tukar pengalaman dan menarik pelajaran dari penyelenggaraan layanan dasar di masing-masing daerah. Sebagai tuan rumah pertama proses tukar pengalaman ini adalah Kabupaten Bojonegoro. Dalam pertemuan “tukar pengalaman” yang diselenggarakan tanggal 12-13 Februari 2018 dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Dr. Suyoto atau biasa dipanggil Kang Yoto. Sementara delegasi dari Kabupaten Belu NTT dipimpin langsung oleh Bupati Willy Lay, didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Marsianus. Sedangkan dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, dr. H. Berli, didampingi oleh Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA, Faisal Hadi Djaya. Selain itu hadir pula perwakilan dari Bank Dunia selaku mitra internasional dalam pelaksanaan program MELAYANI serta para pendamping (Coach) program MELAYANI di tiap kabupaten wilayah kerja MELAYANI. Bojonegoro terpilih sebagai tuan rumah “tukar pengalaman” mengingat pengalaman Bojonegoro dalam melakukan beberapa program inovasi perbaikan pelayanan dasar.



Untuk saling bertukar informasi bagi pemerintah kabupaten antar daerah dampingan, Program MELAYANI telah melaksanakan kegiatan pertukaran pengetahuan program MELAYANI ke-1 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada pertengahan Februari 2018. Pada pertemuan ini dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Belu untuk saling berbagi informasi terkait pendekatan, capaian dan tantangan selama pelaksanaan Program MELAYANI di daerah masing-masing.

Pertemuan pertukaran pengetahuan ke-2 dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 di Kabupaten Kubu Raya yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Belu. Fokus utama yang akan dilihat oleh Pemerintah Kabupaten Belu dan Bojonegoro pada kegiatan ini terkait “Strategi Penurunan Angka Stunting” yang sedang menjadi perhatian khusus dalam menyelesaikan layanan dasar. Selain dilakukan diskusi juga ada kegiatan kunjungan lapangan ke unit layanan.

Program MELAYANI berlangsung sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini di tiga kabupaten tersebut di atas. Setelah Program ini bekerja selama lebih dari setahun, tentunya terdapat perkembangan dan capaian yang telah dihasilkan. Perkembangan dan capaian ini fokus pada isu prioritas yang telah dipilih masing-masing kabupaten. Antara kabupaten satu dengan kabupaten lain berbeda-beda, misalnya saja di Kabupaten Kubu

Raya memilih isu Stunting, Bojonegoro dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tinggi dan Kabupaten Belu sendiri menetapkan kualitas pendidikan rendah sebagai isu prioritas. Untuk mendokumentasikan pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipetik dari Program Melayani di 3 kabupaten, maka selama bulan Desember 2018 dilaksanakan proses dokumentasi dalam bentuk film dokumenter.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Program MELAYANI, kunjungi: <http://www.batukarinfo.com/melayani>

Program Kerja Sama Knowledge Sector Initiative (KSI)-BaKTI Penyediaan dukungan teknis pada pengembangan kompetensi analis kebijakan di tingkat sub nasional

Urgensi pengembangan penyusunan kebijakan publik di Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, namun kesepahaman bagaimana menilai kualitas kebijakan, agenda, aspek atau unsur apa yang harus diperbaiki, siapa yang paling berkontribusi pada rendahnya kualitas kebijakan masih perlu dipertanyakan. Dengan kata lain, di Indonesia belum ada kesepakatan atau pemahaman yang sama mengenai seperti apa kebijakan yang baik. Dalam kondisi ini keberadaan analis kebijakan hadir untuk mengisi ruang perbaikan kebijakan publik di Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai sebuah jabatan fungsional yang baru lahir pada tahun 2013 di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan sebuah harapan baru bagi tumbuhnya atmosfer kebijakan publik di Indonesia yang lebih baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya didasari intuisi, opini, dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan.

Sejak akhir 2017, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) menginisiasi penyusunan Standar Kompetensi Analis Kebijakan Indonesia (SKKNI) profesi analis kebijakan bagi masyarakat yang lebih luas termasuk akademisi, lembaga non-pemerintah, swasta, dll. Ke depannya, kompetensi analis kebijakan ini akan bersinggungan erat dengan berbagai kelompok masyarakat terutama ketika proses penyusunan kebijakan berlangsung baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terkait dengan hal ini, KSI dan LAN bekerja sama dengan BaKTI yang dimulai bulan Juni sampai dengan Desember 2018 untuk mengembangkan kompetensi Analis Kebijakan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Aceh. Selain peningkatan kompetensi analis kebijakan melalui program kerja sama ini diharapkan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dapat diperkenalkan pada instansi pemerintah di tingkat sub nasional.

Kegiatan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan pengembangan kompetensi Analis Kebijakan dimulai pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2018.

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Daerah se-Aceh

Selama dua hari pelaksanaan di tanggal 19-20 September 2018, Yayasan BaKTI bekerjasama dengan Pusat Analis Kebijakan – Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) dan

Knowledge Sector Initiative (KSI) melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan, sebuah instrumen berbasis online yang sederhana, komprehensif, dan efektif digunakan untuk pemerintah daerah dapat menilai sendiri kualitas kebijakan publik yang telah mereka kembangkan dan implementasikan. Pemerintah Provinsi Aceh mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini, dimana BAPPEDA Aceh, dengan koordinasi bersama Sekretariat Daerah Aceh mengundang OPD terkait dari pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek tersebut.

Dalam kegiatan Sosialisasi, instruktur kegiatan dari PUSAKA-LAN mengemukakan latar belakang, konsepsi, tujuan, kegunaan, serta manfaat IKK bagi peningkatan kualitas kebijakan bagi pemerintah daerah; kabupaten dan kota se-Aceh. Selain itu, terkait pemberian bimbingan teknis, instruktur kegiatan bersama dengan BaKTI memberikan arahan dan simulasi mengenai operasionalisasi pengisian portal berbasis web IKK kepada peserta.

Sosialisasi IKK melibatkan OPD strategis yang erat kaitannya dengan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, yang diantaranya adalah Bidang Hukum, Badan Litbang, Bappeda, Bidang Organisasi, dan Dinas-Dinas lainnya terkait pelayanan dasar seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, selain daripada beberapa pejabat PKP2A LAN Aceh yang mengikuti kegiatan ini.

Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan, Kepala Bappeda Aceh, Bpk. Azhari, SE, M.Si menekankan bahwa untuk menghasilkan dan menyukseskan pelaksanaan program strategis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dengan berkualitas dan dapat menjawab secara efektif kebutuhan masyarakat sampai ke tingkat desa, perlu ditunjang dengan kebijakan daerah yang berasal dari hasil kajian yang komprehensif dan mempunyai dasar bukti yang kuat. Karena itu, dikarenakan kualitas kebijakan menjadi kebutuhan dewasa ini, keberadaan suatu sistem informasi untuk mendukung praktik-praktik *evidence-based* dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menjadi tantangan yang patut dipenuhi. Indeks Kualitas Kebijakan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan tersebut, untuk itu dibutuhkan komitmen dari segenap perangkat pemerintah sampai di level kabupaten dan kota untuk dapat menggunakan perangkat yang dibangun oleh LAN dan KSI tersebut untuk membangun serta meningkatkan kualitas kebijakan masing-masing.



Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan untuk ASN dan Non-ASN lingkup Sulawesi Selatan

Dalam upaya mendukung proses ke arah sertifikasi profesi Analis Kebijakan, LAN bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi Analis Kebijakan, yang kemudian berkolaborasi dengan BaKTI untuk menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan. Melalui pelatihan ini para peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemampuan sebagai Analis Kebijakan yang nantinya dapat menjadi modal untuk mengikuti sertifikasi profesi Analis Kebijakan sesuai standar dalam KKNi Profesi Analis Kebijakan di Indonesia.

Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan telah dilaksanakan di Hotel Best Western Makassar selama lima hari dari tanggal 12-16 November 2018. Tiga puluh peserta terpilih dari berbagai latar belakang baik dari ASN maupun Non-ASN seperti pemerintah pusat dan daerah (provinsi maupun kabupaten dan kota), perguruan tinggi dan akademisi, pihak swasta, mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, maupun PKP2A II LAN Makassar.

Instruktur pelatihan ini adalah para ahli bidang kebijakan publik yang berpengalaman, yaitu Ibu Erna Irawati (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan atau PUSAKA-LAN), Pak Alam Tauhid Syukur (Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi – LAN Makassar), dan Pak Andi Taufik (Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan II LAN atau PKP2A II LAN Makassar).



Lima hari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan untuk ASN dan Non-ASN memberikan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan bagi tiga puluh peserta untuk memahami proses pembuatan kebijakan publik mulai dari mekanisme menggagas, penentuan kebijakan, proses pelaksanaan/implementasi hingga mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Diharapkan dari pelatihan ini, tiga puluh peserta yang menjadi alumni pelatihan dapat melakukan proses pertukaran pengetahuan di wilayah kerja masing-masing yang berkontribusi untuk membangun kebijakan publik yang lebih berkualitas. Pada akhirnya, Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan membangun semangat belajar, membekali peserta dengan pengetahuan, kemampuan serta kompetensi yang memadai untuk menjadi Analis Kebijakan.

Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan untuk ASN dan Non-ASN lingkup Provinsi Aceh

Pelatihan Kompetensi Analis Kebijakan untuk ASN dan Non-ASN di Provinsi Aceh telah dilaksanakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh selama lima hari dari tanggal 26-30

November 2018. Dua puluh sembilan peserta terpilih dari berbagai latar belakang baik dari ASN maupun Non-ASN seperti Pemerintah Aceh (provinsi maupun kabupaten dan kota), perguruan tinggi dan akademisi, pihak swasta, mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil, maupun PKP2A IV LAN Aceh. Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh (Bappeda Aceh) turut berpartisipasi dalam penyebaran informasi dan pelaksanaan seleksi peserta dalam kegiatan ini.

Instruktur pelatihan ini adalah para ahli bidang kebijakan publik yang berpengalaman, yaitu Dr. Retno Sunu Astuti, M.Si (Pakar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Diponegoro), Dr. Sait Abdullah, S.Sos, M.Pol, Adm dari Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (PUSAKA-LAN); dan dua instruktur dari PKP2A IV LAN Aceh; Said Fadhil, S.IP, MM (Kepala Bagian Administrasi PKP2A IV LAN Aceh), dan Ir. Faizal Adriansyah, M.Si (Kepala PKP2A IV LAN Aceh).

Di hari pertama pelatihan, Budhi Bahroelim memberikan pengantar kegiatan dengan menekankan pentingnya semangat *evidence-based policy* atau kebijakan berbasis bukti dalam penyusunan dan implementasi kebijakan di Indonesia, yang juga semangat yang dikembangkan oleh KSI.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) Bappeda Aceh, Marthunis Muhammad menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh melihat pengembangan Profesi Analisis Kebijakan sebagai kebutuhan di Aceh, melihat tantangan yang dimiliki Aceh dari bidang kebijakan pembangunan. Dilihat dari perkembangan dewasa ini, indikator pembangunan Aceh jauh lebih rendah dari rata-rata nasional dan daerah lain di Indonesia, sementara anggaran yang dimiliki Aceh sangatlah besar. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya menghasilkan Analisis Kebijakan yang tangguh dan mampu memberikan kajian dan masukan yang baik agar ranah kebijakan di Aceh menjadi tepat sasaran, mengingat sokongan otonomi khusus untuk Aceh mempunyai masa waktu yang tidak lama lagi. Pak Marthunis secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan Pelatihan.



Program PASIKOLA – Petepete Anak Sekolah

Untuk menjamin keberlangsungan Pasikola, selama masa ujicoba Dinas Perhubungan selaku leading sector telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan berbagai pihak sehubungan dengan payung hukum Pasikola. Setelah melalui beberapa kali pertemuan, lahirlah rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Antar Jemput

Pasikola. Rancangan Perwali ini telah melalui setidaknya enam kali revisi kemudian uji publik pada tanggal 30 Januari 2018 sebelum disahkan oleh Walikota Makassar pada awal Februari 2018. Uji coba masih terus berlangsung selama periode Januari – April 2018. Untuk memaksimalkan layanan Pasikola, saat ini sedang diujicoba penambahan frekuensi antar jemput dimana satu unit Pasikola akan melayani 2 kali pengantaran dan penjemputan. Berarti jumlah siswa yang dilayani satu unit Pasikola menjadi minimal 20 siswa. Harapannya penambahan ini akan mulai dilakukan setelah tahun ajaran baru. Pada akhir April 2018, pengelolaan Pasikola akan dialihkan secara bertahap ke Dinas Perhubungan Kota Makassar.



Layanan PASIKOLA telah sukses berjalan dalam masa ujicoba sejak Mei 2017. Sejak Oktober 2018, sebuah badan usaha berbentuk koperasi resmi terbentuk dengan nama Koperasi PASIKOLA Inovasi Makassar. Sejak bulan November 2018, orang tua siswa membayar layanan PASIKOLA yang tarifnya ditentukan berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Peraturan Walikota PASIKOLA juga sudah ditandatangani sejak bulan Februari 2018.

PASIKOLA merupakan hasil desain kolaborasi multi pihak antara lain; Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Organda, pelajar – mahasiswa, pakar transportasi, komunitas/pelaku usaha rintisan, aktivis NGO dan pakar tata kota. Selama masa ujicoba, program PASIKOLA berjalan dengan pendampingan penuh oleh Yayasan Bursa Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan UNDP dan juga dukungan PERTAMINA pada bulan Agustus 2018.

PASIKOLA, yang dalam pengembangannya mendapat dukungan dari City-I-LEAPS melalui UNDP Bangkok Regional Hub dan UNDP Indonesia juga merupakan contoh yang baik tentang bagaimana pemerintah kota sendiri dapat menggunakan inovasi sosial untuk mengatasi kesenjangan penyediaan layanan, dan memperkuat sistem secara keseluruhan untuk memastikan keberlanjutan layanan yang sukses, termasuk melalui mengadopsi kebijakan atau peraturan yang diperlukan.

PASIKOLA menjawab beberapa masalah - a) memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi - yaitu transportasi sekolah yang dapat diandalkan, b) mengurangi kemacetan lalu lintas, c) menghemat waktu bagi orang tua (hingga 2 jam per hari), d) menyediakan mata pencaharian alternatif bagi pengemudi pete-pete guna meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan inovasi sosial memberikan metodologi yang tepat bagi kota Makassar untuk mengembangkan dan memberikan layanan, termasuk dengan membangun sistem dan mengadopsi peraturan - dengan demikian meningkatkan

sistem tata kelola secara keseluruhan yang membuat lembaga lokal lebih responsif dan bertanggung jawab (SDGs-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16.6, dan 16.7).



Pasikola juga berkontribusi pada pencapaian SDGs-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan 4 pada pendidikan berkualitas, dan tujuan 11 pada kota dan masyarakat yang berkelanjutan.

Sistem manajemen transportasi sekolah PASIKOLA ini, juga berfokus pada peningkatan kapasitas pribadi pada supir PASIKOLA terpilih. Pemilihan supir PASIKOLA melewati proses seleksi dan pelatihan guna menambah kapasitas pribadi mereka. Adanya PASIKOLA bagi supir pete-pete konvensional yang beralih ke PASIKOLA juga memberikan kepastian pendapatan yang mereka dapatkan setiap bulannya. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan mereka.